

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH PERANG TELUK II (1990-1991) TERHADAP
PROSES PEMBENTUKAN NEGARA PALESTINA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah

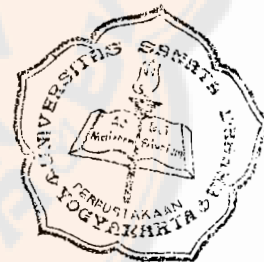


Oleh :

FLORENSIA TYASTUTI

NIM : 94 1314 005

NIRM : 940051120604120004



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2000**

**PENGARUH PERANG TELUK II (1990-1991) TERHADAP
PROSES PEMBENTUKAN NEGARA PALESTINA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

FLORENSIA TYASTUTI

NIM : 94 1314 005

NIRM : 940051120604120004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2000**

SKRIPSI

PENGARUH PERANG TELUK II (1990-1991)

TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN NEGARA PALESTINA

Oleh :

Florensia Tyastuti

NIM : 94 1314 005

NIRM : 940051120604120004

Telah Disetujui

Pembimbing I

(Drs. A.A. Padi)

Tanggal:.....

Pembimbing II

(Drs. Adisusilo, JR)

Tanggal:.....

SKRIPSI

PENGARUH PERANG TELUK II (1990-1991)

TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN NEGARA PALESTINA

Yang dipersiapkan dan ditulis oleh :

Florensia Tyastuti

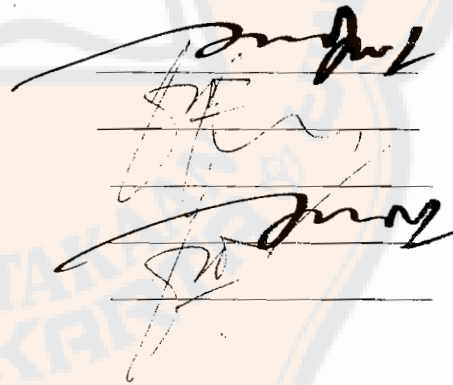
NIM : 94 1314 005

NIRM : 940051120604120004

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 1 September 2000
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

- Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd
Anggota : 1. Drs. A.A. Padi
2. Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.
3. Drs. B. Musidi, M.Pd

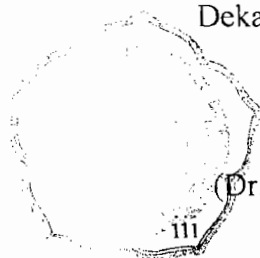


Yogyakarta, 7 OKTOBER 2000

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



(Dr. Paulus Suparno, S.J., M.S.T)

MOTTO

*Kehancuran Harga Diri Merupakan
Awal Kehancuran suatu Bangsa dan Negara
(Aniseto B)*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. *Papi R A J Probowardoyo, BA dan Ibu T H Sri*

Mulyani tercinta yang telah mendoakan dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

2. *Adik-adikku, Antonius Nirmala dan Albertus Prokoso*

Lelono yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

3. *Tata' Anis yang dengan setia mendampingi, memotivasi dan*

memberi masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi.

ABSTRAK

Judul : **Pengaruh Perang Teluk II (1990-1991) Terhadap Proses Pembentukan Negara Palestina.**
Nama : **Florensia Tyastuti**

Skripsi yang berjudul *“Pengaruh Perang Teluk II (1990-1991) terhadap Proses Pembentukan Negara Palestina”* membicarakan mengenai pengaruh Perang Teluk II terhadap Palestina sebagai sebuah negara yang sudah bertahun-tahun memperjuangkan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan Palestina tidak mudah diperoleh karena perbedaan persepsi tentang pemilik sah ‘tanah’ Palestina dan Yerusalem Timur.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan negara Palestina sampai Perang Teluk II, untuk mengetahui lebih jelas terjadinya Perang Teluk II, dan untuk mengetahui pengaruh Perang Teluk II terhadap proses pembentukan negara Palestina.

Palestina merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan termasuk negara dunia Arab. Kawasan Timur Tengah diidentikkan dengan kawasan konflik karena konflik antara Arab dan Israel hingga saat ini belum mencapai kata sepakat untuk berdamai terutama Palestina-Israel. Palestina sebagai sebuah negara pernah diproklamasikan tahun 1988 namun kemerdekaan dan kedaulatannya belum diakui oleh Israel. Kemerdekaan dan kedaulatan inilah yang diperjuangkan warga Palestina sampai meletusnya Perang Teluk II. Sejak dan sesudah Perang Teluk II kartu Palestina dimasukkan dalam agenda konflik Irak-Kuwait, yang kemudian berkembang menjadi perang Irak dan koalisi anti Irak/pasukan multinasional. Bahkan Perang Teluk II diklaim oleh Irak sebagai perang pembebasan/kemerdekaan Palestina.

Krisis Teluk yang berawal dari aneksasi Irak ke Kuwait 2 Agustus 1990 berkembang menjadi Perang Teluk II. Perang Teluk II ini untuk membedakan Perang Teluk I (Perang Irak-Iran). Ada 2 faktor yang melatarbelakangi terjadinya Perang Teluk II, yaitu faktor intern (faktor historis, ekonomi, politik dan psikologis Saddam) dan faktor ektern (faktor politik global dan intervensi pihak luar dalam menyelesaikan masalah Irak-Kuwait). Sejak Krisis Teluk, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 12 Resolusi agar Irak keluar dari Kuwait. Akan tetapi, perang tidak dapat dihindari bahkan Irak memasukkan Kartu Palestina dalam penyelesaian konflik Irak-Kuwait.

Oleh karena kartu Palestina dimasukkan oleh Irak dalam Perang Teluk II, maka Perang Teluk II mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan negara Palestina. Pengaruh yang signifikan itu jelas terlihat pasca Perang Teluk II dibidang Politik dengan langkah-langkah perdamaian yang dimulai dari Madrid, Oslo I, II dan III serta perundingan damai lainnya yang saat ini tetap diupayakan agar mencapai status final Palestina merdeka, yaitu sebagai negara merdeka. Selain langkah perundingan damai, warga Palestina pada tahun 1996 mengadakan pemilu untuk pertama kalinya. Tidak hanya itu pengaruh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perang Teluk II juga terlihat di bidang geografis, yaitu dengan penyerahan kembali wilayah Palestina yang diduduki Israel, seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan menguasai 40% wilayah Tepi Barat berarti otoritas Palestina sudah bertanggung jawab penuh atas kehidupan sekitar 60% penduduk Palestina di Tepi Barat dari total penduduk Palestina lebih dari 3 juta orang.

Melihat perkembangan Pasca Perang Teluk II sampai saat ini dengan semakin seriusnya perundingan-perundingan damai antara kedua belah pihak di Camp David, Amerika Serikat, dengan Amerika sebagai pihak penengah diharapkan sesudah 13 September 2000, Palestina dapat memperoleh hak *self determination*.



ABSTRACT

Title : *The Impact of the Gulf War II towards the Establishment of Palestine*

Name: Florensia Tyastuti

This thesis entitled *The Impact of the Gulf War II towards the Establishment of Palestine* talks about the influence of the Gulf War II towards Palestine. Palestine is a nation that has struggled to own its right to be an independent nation. It cannot gain its freedom easily for there is a difference of perception of whom the legal owner of the land of Palestine and East Jerusalem.

This thesis is aimed to know the process of the forming of Palestine as a nation until the Gulf War broke out, to know further the cause of the Gulf War II, and to know the influence of the Gulf War II towards the forming of Palestine.

Palestine is a nation that is geographically situated in the Middle East and is one of the Arabic Nations. The Middle East is identical with conflicts, for the conflicts between Arab and Israel, especially between Palestine and Israel, have not yet been settled. The nation of Palestine proclaimed its independence in 1988, while in the other hand Israel did not recognize it. Palestinian had been struggling to hold its independence and sovereignty until the Gulf War occurred. It was since the Gulf War II broke out and after it was ended Palestine had been involved in the conflict's agenda between Iraq and Kuwait. This conflicts, then, become Iraq's war and anti-Iraq / multinational troops. Iraq even claimed the Gulf War II as the war for Palestine's independence.

The Gulf crisis which was rooted from Iraq's annexation to Kuwait on August 2nd, 1990 turned to be the Gulf War II. This Gulf War II is indeed different with the Gulf War I, which is the war between Iran and Iraq. There are two factors behind the break out of the Gulf War II, such as internal factor (the factors of history, economics, politics, and psychology of Saddam) and external factor (the factors of global politic and other countries' interventions in solving Iraq-Kuwait's conflicts). Since gulf crisis, United Nation's Security Council has issued 12 resolutions to free Kuwait from Iraq. Moreover, war cannot be avoided. Iraq uses Palestine's influence in solving the conflicts.

For Iraq had involved Palestine in the Gulf War II, the war gives significant impact towards the establishment of Palestine as a nation. This impact was clearly seen in the period after the Gulf War II, especially in politics. The efforts to achieve reconciliation were begun from Madrid, Oslo I, II, and III, and the other negotiations to come to the main goal, making Palestine an independent nation. Beside these efforts, Palestinian itself held a general election for the first time in 1996. Not only that, the impacts of the Gulf War II were also seen in geographical result, like the hand over of the Palestine's areas colonized by Israel, Gaza and West Bank. By controlling over 40 % from West Bank areas, it means that the authority of Palestine controls about 60 % from totally 3 million Palestinians in West Bank.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Seeing the development of the peace negotiations of both sides after the Gulf War II in Camp David USA, with the United States as the mediator, hopefully in September 13th, 2000 Palestine can soon get its self determination right.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Murah atas penyertaan, bimbingan mulai dari proses persiapan-penulisan-sampai penyelesaian skripsi ini. Skripsi yang berjudul **Pengaruh Perang Teluk II (1990-1991) Terhadap Proses Pembentukan Negara Palestina** tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
3. Drs. A.A. Padi selaku pembimbing I atas bimbingan dan pendampingan pada proses penulisan skripsi hingga selesai skripsi.
4. Drs. Sutarjo Adisusilo.JR. selaku pembimbing II atas bimbingan dan pendampingan pada proses penulisan skripsi hingga selesai skripsi.
5. Staff perpustakaan USD, Fisipol UGM, UNY yang telah banyak memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis bagi penulisan skripsi.
6. Teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan 94 , rekan-rekan Dahlia dan teman-teman Wulung Tiga Sembilan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukunngan dan bantuan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih tidak sempurna, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini berguna bagi siapa saja dan dapat membantu untuk bahan studi selanjutnya.

Yogyakarta,

2000

Penulis





DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSetujuan	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PETA	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Proses Pembentukan Negara Palestina dan Permasalahannya	3
2. Perjuangan Rakyat Palestina dalam Upaya Mendirikan Negara Palestina	7
3. Perang Teluk II	9
B. Tinjauan Pustaka	13
C. Landasan Teori	15
1. Teori Politik dan Politik Luar Negeri	15
2. Teori Pengaruh, Perang, Konflik dan Perdamaian	16
3. Arti Nasionalisme	19
4. Nasionalisme Palestina	21
5. Faktor Pembentuk Nasionalisme Arab	23
D. Perumusan Masalah	29
E. Metode Penelitian	29
F. Tujuan Penulisan	32
G. Sistematika Penulisan	32
H. Manfaat Penulisan	33

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II	PROSES PEMBENTUKAN NEGARA PALESTINA SAMPAI PERANG TELUK II	34
A.	Proses Pembentukan Negara Palestina sebelum Perang Teluk II ..	34
1.	Lahirnya Pergerakan Nasional Palestina	38
2.	Faktor Pendorong Kebangkitan Rakyat Palestina dalam Gerakan Intifadah	44
3.	Pengaruh Gerakan Intifadah dalam Bidang Ekonomi, Sosial dan Politik	51
4.	Harapan Intifadah	54
B.	Kondisi Palestina Menjelang Perang Teluk II (1990-1991)	58
BAB III	PERANG TELUK II	63
A.	Latar Belakang	63
B.	Proses Perang Teluk II	64
1.	Faktor Penyebab Perang Teluk II	66
2.	Akibat Perang Teluk II	73
C.	Hubungan Perang Teluk II dengan Pembentukan Negara Palestina	76
BAB IV	PENGARUH PERANG TELUK II TERHADAP PEMBENTUKAN NEGARA PALESTINA MERDEKA	84
A.	Langkah Perdamaian Menuju Palestina Merdeka	84
B.	Pengaruh Perang Teluk II dan Tuntutan Negara Palestina Merdeka	87
1.	Pengaruh di Bidang Politik.....	88
2.	Pengaruh di Bidang Geografis.....	90
C.	Kemerdekaan Palestina sebuah Analisis	94
BAB V	KESIMPULAN	98
	DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR PETA

	Halaman
1. Peta wilayah Fertile Crescent	104
2. Peta Israel dan wilayah Arab yang diduduki sejak tahun 1948, 1949 dan 1967	105
3. Peta wilayah Perang Teluk II tahun 1990-1991	106
4. Peta perbesaran wilayah Perang Teluk II tahun 1990-1991.....	107-109
5. Peta wilayah Palestina sekarang (2000), Gaza dan sebagian kecil Tepi Barat (Jericho dan Hebron)	110
6. Tabel kekuatan Irak versus pasukan multinasional	111
7. Kronologi pembentukan negara Palestina dan Perang Teluk II	112-114
8. 12 Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Irak	115-116
9. Kronologi Perang Teluk tahun 1990-1991.....	117-126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah adalah suatu kawasan yang sangat luas di dalamnya terletak berbagai negara yang pada umumnya adalah negara-negara Arab yang telah berhasil membentuk negara yang berdaulat dan mempunyai masalah yang kompleks. Selain itu, kawasan Timur Tengah memiliki beberapa daya tarik dan juga mempunyai arti yang penting sehingga barang siapa menguasainya akan mempunyai kedudukan yang strategis di dunia. Letak kawasan Timur Tengah yang strategis ini dapat dilihat dari daerahnya yang merupakan pertemuan antara benua Eropa, Asia dan Afrika, sehingga kawasan Timur Tengah menguasai jalan masuk ketiga benua tersebut. Kawasan Timur Tengah juga memiliki tempat-tempat strategis yang lain seperti adanya Terusan Suez dan Laut Merah; Teluk Persia; Selat Bosphorus dan Dardanel. Kemasyuran kawasan Timur Tengah semakin besar dengan diketemukannya minyak dalam jumlah yang sangat besar. Seperti telah diketahui bahwa minyak merupakan bahan bakar utama dan bahan mentah yang paling diperlukan dalam peradaban industri kontemporer. Terbukti bahwa cadangan minyaknya adalah dua per tiga cadangan minyak dunia.¹

Kawasan Timur Tengah secara geografis terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Dunia Arab dan Non Arab. Dunia Arab terdiri dari 21 negara, yaitu Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Djibauti, Irak, Kuwait, Libanon, Lybia, Maroko, Mauritania, Oman, Yaman Utara, Yaman Selatan, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah,

¹ Kirdi Dipoyudo, 1977, *Timur-Tengah Dalam Pergolakan*, CSIS, Jakarta, hal; 29-30

Tunisia, Uni Emirat Arab, Mesir dan Yordania. Sementara itu Dunia Non Arab mencakup negara Israel, Iran, Turki dan Syprus.

Pengertian lain dari Timur Tengah adalah Fertile Crescent, suatu istilah kuno yang banyak dipergunakan oleh para ahli Timur Tengah untuk menyebut suatu kawasan subur yang terbentang luas mulai dari Laut Tengah terus mengarah ke Sungai Tigris dan Sungai Eufrat lalu berakhir di Teluk Persia. Bentangan ini seolah-olah membentuk gambaran setengah lingkaran layaknya sebuah bulan sabit (crescent). Dalam pengertian modern, seperti yang dimaksudkan dalam tulisan ini, wilayah tersebut mencakup negara Yordania, Libanon, Suriah dan Irak.²

Membicarakan Timur Tengah identik dengan membicarakan konflik, baik konflik internal di tingkat regional maupun di tingkat lokal. Konflik tersebut antara lain konflik Lebanon, Irak, Aljazair, Israel dan Palestina. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya ambisi setiap pemimpin negara Arab untuk menjadi pemimpin dan pemersatu negara Arab. Konflik yang menarik untuk disimak adalah masalah Palestina. Permasalahan Palestina berakar dari perkembangan sejarah yang panjang oleh dua macam bangsa yang berdiam di negeri itu, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Kedua bangsa menginginkan tanah Palestina dan bermaksud mendirikan negara merdeka di tanah yang sama. Akan tetapi, kedua bangsa ini tidak pernah berdamai, sehingga terjadi perang yang berkepanjangan.

² *The World Book Encyclopedia, vol.VIII*, 1971, Chicago Field Enterprises Educational Corporation, hal:82

1. Proses Pembentukan Negara Palestina dan Permasalahannya

Bangsa Arab Palestina pada dasarnya menghendaki suatu negara yang bebas merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan yang diinginkan Palestina hingga saat ini belum tercapai karena hak untuk hidup merdeka belum diakui oleh negara Israel. Ketegangan antara bangsa Palestina dan Israel selalu terjadi sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Konflik yang berlarut-larut sampai saat ini tidak menemui titik terang untuk perdamaian.

Masalah Palestina lebih terkenal dengan sebutan konflik Arab–Israel atau Perang Arab-Israel. Rakyat Arab Palestina mendapat dukungan dan bantuan dari negara-negara Arab, sedangkan rakyat Yahudi Palestina dibantu oleh gerakan zionis sedunia dan beberapa negara Barat, khususnya Inggris, Perancis dan Amerika.³ Negara yang terlibat dalam perang baik langsung maupun tidak tentu saja memiliki motivasi tertentu, baik kepentingan politik maupun ekonomi.⁴ Kepentingan politis yaitu membebaskan negara yang terlibat perang, sedang kepentingan ekonomi ingin menarik keuntungan sebesarnya dari cadangan minyak yang tersedia. Seperti halnya dalam Perang Teluk, negara Barat yang tergabung dalam pasukan multinasional memiliki motif ekonomi, mengingat besarnya produksi dan cadangan minyak yang ada di kawasan Teluk.

Konflik Palestina-Israel, zionisme sering dianggap biang keladinya. Zionisme sejak beberapa abad lalu sampai saat ini merupakan satu ideologi yang bersendikan nasionalisme Yahudi.⁵ Ideologi dan perjuangan Zionis bukan saja

³ Albert Hourani, 1971, *Palestina and Israel dalam Walter Laqueur, Ed; The Israel- Arab Reader*, Bantam, New York, hal. 273-280.

⁴ Sutarno, 1991, *Perang Teluk Malapetaka Dunia*, Media Interaksi Utama dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal: 229

⁵ Ibrahim Latief, 1991, *Zionisme Israel dan Kebangkitan Nasional Arab*, Metro Pos, Jakarta, hal : 7.

diarahkan untuk merampas tanah bangsa Arab tetapi juga untuk membendung agar bangsa Arab jangan sampai menjadi negara besar dan kuat. Sesuai dengan faham yang begitu fanatik dari kaum zionis, yang boleh menjadi negara besar dan kuat di kawasan Timur Tengah hanya Israel. Ikatan kekeluargaan antar etnis Yahudi sangat kuat, hal ini disebabkan etnis Yahudi merasa dipersatukan oleh kesamaan budaya, bahasa, dan sosial. Etnis Yahudi membentuk persatuan di setiap negara di mana mereka berada dengan pusat organisasinya berada di Israel.

Untuk meningkatkan pelaksanaan haluan politiknya, kaum zionis memerlukan langkah-langkah penyempurnaan secara menyeluruh. Orang Yahudi yang sudah terhimpun dalam berbagai organisasi disatukan dalam satu wadah, yaitu kongres Yahudi se-dunia, yang telah dibentuk sejak abad ke-18. Pada awal tahun 1800-an landasan politik zionisme diperbaharui.⁶ Salah seorang pelopor pembaharuan itu adalah Profesor Theodor Herzl (1860-1904) seorang sarjana Yahudi lulusan universitas Wina, Austria. Pada tahun 1896, Herzl menulis sebuah artikel berjudul “Der Judenstaat” (negara Yahudi)⁷. Setelah melihat perasaan anti Yahudi ada di mana-mana, Herzl sengaja mengangkat persoalan kaum Yahudi ke arena internasional.

Selanjutnya, lahirlah suatu gerakan yang memperjuangkan berdirinya sebuah negara Yahudi. Gerakan ini disebut Zionisme. Orang Yahudi akhirnya menghimpun kekuatan dan pada tahun 1897 berhasil menyelenggarakan kongres zionisme I di Basel, Swiss. Keputusan yang diambil kongres adalah mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina dan merebut kota suci Yerusalem. Mula-mula

⁶ *Ibid.* hal. 17.

⁷ M.Riza Sihbudi, 1991, *Islam, Dunia Arab, Iran : Bara Timur Tengah*, Mizan, Bandung, hal :74

selain Palestina ada wilayah lain yang ingin dijadikan sebagai wilayah negara Yahudi, yaitu Argentina dan Uganda.⁸ Akan tetapi, kaum Yahudi zionis lebih menginginkan Palestina daripada Argentina atau Uganda.

Untuk merealisasikan maksudnya, Herzl mendekati sultan Abdul Hamid dari Turki yang pada waktu itu menguasai Palestina, agar orang Yahudi diizinkan bermukim dan mendirikan negara di Palestina. Namun usaha itu ditolak oleh sultan Turki. Kaum zionis kemudian beralih mendekati Inggris. Berbeda dengan sultan Hamid, Inggris menawarkan daerah di Uganda atau di Argentina untuk pemukiman Yahudi. Akan tetapi zionis tetap menuntut Palestina sebagai nasional *homeland* mereka.

Kerjasama antara zionis dengan Inggris bersifat saling menguntungkan. Inggris mendukung zionisme dengan maksud agar kekuasaan Inggris di kawasan Timur Tengah tetap terjamin. Sedang zionis meminta dukungan Inggris untuk bisa memperlancar pemulangan orang Yahudi di perantauan lebih banyak lagi. Untuk keperluan itu menteri luar negeri Inggris Arthur James Balfour pada tanggal 2 November 1917 mengumumkan apa yang disebut sebagai Dokumen Balfour,⁹ yang isinya pengembalian orang Yahudi dan sekaligus mendukung orang Yahudi untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour sangat memungkinkan imigrasi orang Yahudi mengalir terus ke Palestina. Kejadian ini mengakibatkan munculnya protes keras dari masyarakat Arab Palestina yang sudah lama menetap di Palestina.

⁸ Amien Rais, 1990, *Timur Tengah dan Krisis Teluk : Sebuah Analisa Kritis*, Amarpres, Surabaya, hal : 10.

⁹ Ibrahim latief, *op. cit.* Hal : 38.

Akibat kekalahan Turki dalam PD I, zionis lebih intensif mengadakan hubungan dengan Inggris yang menggantikan Turki sebagai penguasa Palestina sejak tahun 1918. Pada 29 September 1923, LBB menyerahkan daerah Palestina kepada Inggris sebagai daerah mandat. Tahun 1930-an semangat nasionalisme Palestina mulai maju. Hal ini terbukti ketika tahun 1935 muncul persaingan partai politik di Palestina sebagai akibat semakin kuatnya gerakan zionisme dan pada tahun yang sama Lembaga Arab Tertinggi mulai memperjuangkan berdirinya Palestina merdeka. Antara tahun 1936 – 1939 terjadi resolusi Palestina menghadapi zionisme Yahudi. Pada tahun 1940-an konflik Israel-Palestina menjadi masalah internasional dan pada tahun 1947 masalah Palestina masuk menjadi agenda PBB.

Pergolakan politik di Palestina semakin mencemaskan. Oleh karena itu, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi nomor 181 tanggal 29 November 1947 memerintahkan supaya Inggris menarik pasukannya dari Palestina. Resolusi PBB nomor 181 juga menyebutkan bahwa di Palestina akan berdiri dua negara yaitu Palestina dan Israel. Adanya Resolusi itu mengisyaratkan bahwa bangsa Arab Palestina mempunyai hak untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Atas desakan PBB, Inggris mulai meninggalkan Palestina sejak bulan Maret 1948, kemudian pada tanggal 15 Mei 1948 secara resmi PBB mencabut mandat Inggris atas Palestina. Sehari sebelum mandat Inggris dicabut, yaitu pada tanggal 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan berdirinya negara Israel dengan Chaim Weizmann sebagai presiden dan David Ben Gurion sebagai perdana menteri.

Berdirinya negara Israel membangkitkan kemarahan negara-negara Arab, maka pecahlah perang Arab-Israel. Perang yang melibatkan sejumlah negara Arab

itu terjadi berulang kali. Ironisnya dalam setiap perang, yaitu tahun 1948, 1956, 1967 dan 1973, Israel selalu memperoleh kemenangan dan berhasil memperluas daerah kekuasaan mereka. Akibat perang tersebut, masyarakat Palestina menjadi terpecah, sebagian dari mereka mengungsi ke negara Arab tetangga dan sebagian lainnya tetap bertahan di Palestina. Di samping perang, bertambahnya jumlah pengungsi disebabkan sikap pemerintah Israel yang sengaja mempersulit warga Palestina di daerah pendudukan.

2. Perjuangan Rakyat Palestina dalam Upaya Mendirikan Negara Palestina

Dengan berdirinya negara Israel reaksi rakyat Palestina semakin keras dan melahirkan perang besar antara kedua belah pihak. Namun pada tahun 1949 perang berhenti. Gencatan senjata disetujui, tetapi hampir 50% kawasan itu jatuh ke tangan Israel. Persetujuan gencatan senjata ditandatangani oleh Israel dan negara-negara Arab. Tahun 1956 Pasukan Israel melakukan aksi dengan melakukan penyerbuan ke Mesir dan berhasil menduduki Gurun Sinai dan Jalur Gaza. Tahun 1957 di bawah tekanan Amerika Serikat dan Uni Soviet, Israel menarik mundur pasukannya. Akan tetapi dengan satu jaminan dari Amerika Serikat bahwa Israel dapat saja melewati Laut Merah meskipun diblokade oleh Mesir. Kekalahan ini tidak membuat surut semangat perjuangan rakyat Palestina dalam merebut kembali wilayah yang diduduki Israel. Perjuangan untuk merebut wilayah Palestina tidak hanya dilakukan oleh rakyat yang berada di daerah pendudukan tetapi juga di luar daerah pendudukan Israel.

Sementara itu warga Palestina di pengasingan telah mendirikan organisasi perlawanan yang bercita-cita ingin mendirikan negara Palestina. Tidak kurang

dari 15 nama organisasi perlawanan Palestina. Dari 15 organisasi itu yang dianggap sebagai wakil sah rakyat Palestina, yaitu *Palestine Liberation Organization* atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang didirikan pada tanggal 2 Juni 1964.¹⁰ Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina (PLO) didirikan dengan maksud untuk mengendalikan beberapa organisasi perlawanan Palestina yang telah ada. Sebelum tahun 1974, perjuangan rakyat Palestina didominasi oleh negara-negara Arab untuk kepentingan setiap pemimpin Arab sendiri. Akan tetapi, setelah tahun 1974, perjuangan untuk mendirikan “negara Palestina” merdeka dilakukan sendiri oleh rakyat Palestina. Apalagi setelah PLO di bawah pimpinan Yasser Arafat sedikit demi sedikit memisahkan keterkaitan dengan Arab. Pada tahun yang sama, PLO diakui sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina.

Kemudian pada tanggal 15 November 1988, PLO dan Dewan Nasional Palestina (PNC) mendeklarasikan berdirinya Negara Palestina Merdeka di Aljir, Aljazair, dengan wilayah jalur Gaza dan Tepi Barat serta Yerusalem sebagai ibukotanya.¹¹ Peristiwa proklamasi kemerdekaan Palestina yang diproklamasikan kurang lebih tiga bulan setelah berakhir Perang Irak-Iran menandai babak baru perjuangan rakyat Palestina yang dimulai sejak perang 1948. Dalam perkembangannya Palestina mengakui secara implisit eksistensi Israel, negara yang selama lebih dari 40 tahun hendak dilenyapkan oleh PLO. Perubahan drastis sikap PLO itu akan menjadi titik awal terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina.

¹⁰ William B. Quandt, 1971, *Palestinian Nationalism: Its Political and Military Dimensions*, Santa Monica, hal : 6. 38.

¹¹ Riza Sihbudi. *op. cit.* hal: 12.

3. Perang Teluk II

Proses peredaan ketegangan di wilayah Timur Tengah ternyata tidak bertahan lama. Kawasan Timur Tengah mulai memanas lagi ketika muncul ketegangan Irak-Iran (22 September 1980-20 Agustus 1988). Konflik Irak-Iran kemudian disebut Perang Teluk I. Dalam konflik ini, Iran mampu mengatasi serbuan para serdadu Irak karena kekuatan militer Irak belum kuat. Belum genap dua tahun Perang Teluk I berakhir, secara tiba-tiba Irak menganeksasi Kuwait (2 Agustus 1990). Kuwait sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti karena dalam segala hal kekuatan kedua negara (Irak-Kuwait) jelas sangat tidak seimbang. Misalnya dalam jumlah personil militer, Irak memiliki sekitar satu juta personil sementara Kuwait hanya memiliki 20.300 personil.¹²

Jika dilihat dari segi kekuatan militer dan pengalaman bertempur, angkatan bersenjata Irak jauh lebih unggul apalagi didukung oleh masyarakat Irak sendiri. Dilihat dari segi kekuatan militer, angkatan bersenjata Irak telah teruji dalam Perang Irak-Iran sehingga pasca perang Irak-Iran, Irak merupakan negara Arab terkuat bahkan kekuatan militernya menduduki urutan terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, Kuwait jelas bukan tandingan atau lawan yang berarti bagi negaranya Saddam Hussein. Konflik Irak-Kuwait kemudian berkembang menjadi konflik Irak-Amerika Serikat dan para sekutunya.

Ketegangan antara Irak dan Kuwait berawal dari pidato Presiden Saddam Hussein berpidato pada tanggal 17 Juli 1990. Dalam pidatonya, Saddam Hussein secara terang-terangan mengecam negara tetangganya, Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA), yang katanya menjadi penyebab turunnya harga minyak dipasaran

¹²*The Military Balance 1989-1990*, 1989, The International Institute For Strategic Studies, London hal: 101-105

internasional, yaitu dengan memproduksi minyak tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Organisation Of Petroleum Exportir Cauntries atau Organisasi Negara-negara Pengekpor Minyak (OPEC). Akibat pelanggaran kuota OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan UEA, harga minyak anjlok sampai 15 dolar AS per barel. Menurut presiden Saddam Hussein, selama delapan tahun Irak perang melawan Iran, Kuwait telah mencuri minyak senilai 2,4 milyar dolar AS di Rumaila wilayah ladang minyak, daerah persengketaan dan perbatasan antara Irak dan Kuwait.¹³ Anjloknya harga minyak menyebabkan Irak sangat terpukul karena Irak mengandalkan minyak sebagai komoditi utamanya. Apalagi Irak tengah giat-giatnya memacu pembangunan ekonomi dan militer dalam negerinya seusai perang delapan tahun yang mengakibatkan hancurnya infrastruktur sosial ekonomi Irak.

Menurut Dr. Kamran Mofid, nilai kehancuran infrastruktur ekonomi Irak sejak berkobarnya perang Irak-Iran sampai Juli 1988 mencapai angka 67 milyar dolar AS. Jumlah tersebut belum termasuk dana yang harus dikeluarkan Irak untuk belanja berbagai jenis mesin perang. Jika dijumlahkan nilai kerusakan infrastruktur ekonomi, utang luar negeri serta kerugian akibat perang di sektor-sektor lainnya, maka seluruh biaya ekonomi perang Irak dapat mencapai 452,6 milyar dolar US. Padahal pendapatan tertinggi Irak yang dapat dicapai dari hasil produksi minyak tidak lebih dari 12 milyar dolar AS per tahun. Sebenarnya Irak butuh waktu sedikitnya 40 tahun untuk dapat merekonstruksi negaranya serta melunasi utang luar negerinya.¹⁴

¹³ M.Risa Sihbudi, *Op.cit*, hal: 151

¹⁴ Kamran Mofid, 1990, *Economic Rekonstruksi of Irak: Financing The Peaace, Third Wold Quarterly (Januari 1990)*, hal: 41-61

Presiden Saddam Hussein berharap dapat memulihkan keadaan ekonomi negaranya dengan jalan menganeksasi Kuwait bahkan jika mungkin negara Saudi, UEA dan negara-negara kaya minyak lainnya. Ambisi Irak untuk menganeksasi Kuwait semakin jelas setelah Kuwait dalam perundingan di Saudi, 31 Juli 1990, dengan tegas menolak tuntutan Saddam agar membayar ganti rugi pada Irak sebesar 16,4 milyar dolar AS serta menghapus semua hutang Irak pada Kuwait dan memberikan daerah Rumailah dan pulau Bubiyan yang kaya akan minyak itu kepada Irak.

Oleh sebab itu, pasukan Irak pada tanggal 2 Agustus 1990 menyerbu dan menduduki Kuwait. Negara yang terlibat dalam Perang Teluk II adalah Irak di dukung oleh beberapa negara Arab (Suriah, Yordania, Lebanon, Lybia dan Palestina). Kuwait sebagai negara yang merasa diri dicaplok oleh Irak di dukung oleh beberapa negara Arab (Arab Saudi, Mesir, Iran, Turki) dan beberapa negara Eropa (Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Rusia) dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan sekutunya ini kemudian dinamakan pasukan *multinasional*. Perang Teluk II akhirnya berkembang menjadi perang antara Irak dengan pasukan *multinasional* dipimpin oleh negara adikuasa (Amerika Serikat). Tujuan utama Perang Teluk II sebenarnya secara politis membebaskan dan memerdekakan kembali Kuwait yang diduduki Irak atau membela kebenaran dan kedaulatan.

Perbuatan Irak tersebut sangat mengejutkan dunia internasional bahkan Dewan Keamanan PBB pun segera mengeluarkan resolusi yang menuntut penarikan kembali pasukan Irak dengan segera dan tanpa syarat dari wilayah Kuwait. Batas waktu yang ditetapkan untuk penarikan mundur itu adalah tanggal 15 Januari 1991. Menghadapi resolusi tersebut, Saddam melakukan propaganda

politik, yaitu penggunaan “kartu Palestina”. Artinya Saddam bersedia menarik mundur pasukannya dari Kuwait asalkan Israel juga bersedia meninggalkan wilayah Palestina yang sudah didudukinya lebih dari 70 tahun. Dengan demikian, masalah yang berawal dari sengketa Kuwait akhirnya melebar dengan menggunakan Palestina untuk memperjuangkan eksistensi Irak agar tetap memperoleh Kuwait.

Dalam seluruh uraian latar belakang kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

Kawasan Timur Tengah secara geografis terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Dunia Arab dan Dunia Non Arab. Negara-negara yang terletak di kawasan ini pada umumnya telah memperoleh kemerdekaan dan memiliki masalah yang kompleks. Kemasyuran kawasan Timur Tengah terkenal juga dengan cadangan minyaknya yang dua per tiga cadangan minyak dunia. Selain itu kawasan Timur Tengah juga disebut dengan kawasan konflik dan konflik yang menarik untuk dikaji adalah masalah Palestina. Konflik di kawasan Timur Tengah memang sudah berabad-abad dan terutama satu abad konflik Palestina-Israel belum juga selesai. Akar konflik Palestina-Israel adalah “tanah” karena di tanah yang sama dua negara didirikan, yaitu Israel dan Palestina.

Negara Palestina yang berlarut-larut belum diakui hak menentukan nasib sendiri disebabkan bangsa Yahudi (Israel) belum mengakui Palestina sebagai negara, sehingga konflik pun berlarut-larut. Dengan berdirinya negara Israel 1948, sejak itu pula Arab Palestina memperjuangkan haknya untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak terus berkembang melalui organisasi dan organisasi yang diakui sebagai wadah yang

mewakili rakyat Palestina adalah PLO (1964). Akhirnya PLO pada tahun 1988 memproklamasikan berdirinya negara Palestina secara de jure dan untuk diakui secara de facto masih perlu perjuangan yang panjang.

Penyebab Perang Teluk II adalah invasi Irak ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Alasan Irak invasi ke Kuwait karena Irak menuduh dan mencurigai Kuwait dan UEA menjadi penyebab turunnya harga minyak dipasaran internasional, yaitu dengan memproduksi minyak tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan OPEC. Presiden Irak Saddam Hussein dalam propaganda politiknya memakai “Kartu Palestina” agar Palestina cepat diberi kemerdekaan/haknya sebagai sebuah negara merdeka. Masalah ini kemudian berkembang menjadi perang antara Irak dengan pasukan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

B. Tinjauan Pustaka

Buku-buku yang membahas tentang Timur Tengah dan artikel tentang Perang Teluk II memang tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Karena buku-buku sumber primer, sekunder maupun pelengkap mudah diperoleh. Namun tulisan yang membahas tentang Pengaruh Perang Teluk II terhadap Proses Pembentukan Negara Palestina masih terbatas. Hal ini disebabkan sumber primer, sekunder maupun pelengkap yang menguraikan secara khusus tentang judul skripsi tidak mudah mendapatkannya. Oleh karena itu, secara umum dapat penulis sampaikan beberapa buku sumber yang sekiranya dapat mewakili untuk menjawab permasalahan yang ada. Buku-buku sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi hanya sumber sekunder dan pelengkap. Sumber sekunder dan pelengkap itu antara lain :

Buku karangan Ibrahim Latief dengan judul *Zionisme Israel dan Kebangkitan Nasionalisme Arab* diterbitkan oleh Metropos Jakarta tahun 1991. Isi buku ini mengenai gerakan Zionis Israel (1897) dan cita-cita gerakan Zionis untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Sebagai reaksi atas gerakan Zionis, nasionalisme Arab Palestina pun bangkit untuk menentang cita-cita gerakan Zionis Israel. Buku ini sebagai referensi untuk menjawab permasalahan bab II.

Buku karangan M. Nur El Ibrahimy dengan judul *Inggris Dalam Pergolakan Timur Tengah*, diterbitkan oleh N.V. Alma' Arif Bandung tahun 1955. Buku ini berisi tentang pertumbuhan dan perkembangan Palestina sejak dikeluarkannya statement politik atau deklarasi Balfour 1917 tentang pemulangan orang Yahudi ke Palestina untuk mendirikan pemukiman di Palestina. Dan juga keterlibatan Inggris, Amerika Serikat serta Rusia dalam mendukung deklarasi tersebut. Buku ini sebagai acuan untuk menjawab permasalahan bab II.

Buku karangan Amien Rais dengan judul *Timur Tengah dan Krisis Teluk*, diterbitkan oleh Amarpress Surabaya, tahun 1990. Buku ini berisi tentang beberapa persoalan di Timur Tengah terutama tentang krisis Teluk yang diawali dengan invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Buku ini sebagai acuan untuk menjawab permasalahan bab III.

Buku karangan M. Riza Sihbudi dengan judul *Islam, Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah* diterbitkan oleh Mizam Bandung tahun 1991. Buku ini membahas mengenai konflik negara-negara di Kawasan Timur Tengah dan gerakan Islam yang menghendaki agar menciptakan kawasan Timur Tengah menjadi suatu kawasan yang damai dan aman setelah Perang teluk II. Buku ini sebagai acuan untuk menjawab permasalahan dalam bab III dan IV.

Buku karangan Sutarno, dkk dengan judul *Perang Teluk Malapetaka Dunia*, diterbitkan oleh Media Interaksi Utama dan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, tahun 1991. Dalam buku ini membahas tentang Perang Teluk II antara Irak- Koalisi anti Irak, sebab-sebab dan akibat Perang Teluk II. Buku ini sebagai acuan untuk menjawab permasalahan bab III dan IV.

Buku karangan M. Risa Sihbudi, dkk dengan judul *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah* diterbitkan oleh PT. Eresco Bandung tahun 1993. Buku ini berisi tentang konflik dan diplomasi di Timur Tengah terutama mengenai posisi Palestina pada masa Perang Teluk II. Buku ini sebagai acuan untuk menjawab permasalahan bab IV.

C. Landasan Teori

Sebelum membahas permasalahan, perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep politik, politik luar negeri, teori perang, pengaruh, konflik dan perdamaian. Penjelasan beberapa konsep itu penting sebab merupakan landasan berpikir dan sebagai pembatasan masalah, di samping itu supaya tidak terjadi salah interpretasi dan multi interpretasi.

1. Teori Politik dan Politik Luar Negeri

Konsep politik yang dikemukakan oleh K.J. Holsti adalah segala macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut tujuan negara dan lembaga yang melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara lain.¹⁵ Konsep politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para

¹⁵ K.J. Holsti, 1988, *Politik Internasional, Kerangka Analisis*, Erlangga Press, Jakarta, Hal: 20-22

pembuat keputusan, dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasional. Politik luar negeri adalah suatu proses yang dinamis dalam menetapkan interpretasi yang relatif mantap terhadap kepentingan-kepentingan nasionalnya dalam menghadapi fakta-fakta situasional yang sering berubah di lingkungan internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti oleh usaha untuk mencapai garis kebijaksanaan politik luar negeri secara diplomatis.¹⁶

2. Teori Pengaruh, Perang, Konflik dan Perdamaian

'Pengaruh' menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh (orang/benda atau peristiwa,dll) yang memiliki kekuatan magis/gaib. Jika dikaitkan dengan judul skripsi maka peristiwa Perang Teluk atau Krisis Teluk memiliki kekuatan yang bisa mempercepat atau memperlambat proses perdamaian di Timur Tengah khususnya Palestina-Israel dan pembentukan negara Palestina merdeka. Dikatakan memiliki kekuatan atau pengaruh karena pasca Perang Teluk II telah diadakan berbagai upaya perundingan damai Palestina-Israel.

Ada berbagai macam batasan perang, namun yang dikemukakan hanya sebagian dari bermacam-macam definisi. Perang adalah suatu bentuk permusuhan antara dua negara atau lebih yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda dan melibatkan kontak senjata secara terbuka. Perang juga berarti perselisihan bersenjata yang terorganisasi diantara golongan masyarakat bangsa dan negara. Sejak sejarah umat manusia ada, perselisihan dan permusuhan terus

¹⁶ Jack C. Plano and Roy Olton, 1982, *The International Dictionary*, California Press, California, Hal: 17-20

berlanjut untuk tujuan yang berbeda-beda: kekuasaan, wilayah, kekayaan, dominasi ideologi, keamanan dan kemerdekaan. Sampai pada zaman modern, perang umumnya dilakukan dengan cara terbatas dan tujuan terbatas, tetapi persenjataan modern untuk penghancuran besar-besaran dan perang total dapat menyalakan seluruh penduduk serta mengancam kelangsungan hidup manusia.¹⁷

Menurut kamus Bahasa Indonesia (1990 : 668) perang diartikan saling bermusuhan antara dua negara, pertempuran bersenjata antara dua pasukan. Sejarah telah mencatat bahwa perselisihan atau pertempuran bersenjata secara terbuka terjadi hampir di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ada yang disebut perang gerilya, perang kemerdekaan, perang Padri, perang Jawa dan sebagainya. Pada tingkat internasional ada Perang Dunia I dan II, perang dingin, perang candu, Perang Salib, Perang Teluk dan sebagainya. Tentu saja tidak semua perang ini dibahas, yang menjadi fokus pembahasan adalah Perang Teluk II yang terjadi di kawasan Timur Tengah terutama di Teluk Persi. Disebut Perang Teluk II karena terjadi di Teluk Persi dan untuk kedua kalinya.¹⁸

Sedang teori konflik adalah persaingan antara kelompok individu yang satu dengan kelompok individu lainnya yang disebabkan oleh kepentingan yang sama tanpa melibatkan kontak senjata secara langsung.¹⁹ Konflik membuat hidup suatu bangsa atau negara diliputi ketidakamanan dan ketidaktenteraman serta kedamaian sulit didapat. Secara politis konflik berarti perselisihan dua kekuatan atau saling bertentangan dan berlawanan, misalnya: kekuatan Palestina dengan

¹⁷ *Ensiklopedi Indonesia* (5) 1984, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta, hal: 2654

¹⁸ *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, Depdikbud: Balai Pustaka, hal: 668

¹⁹ Andrew Glowers and Graham Thompson, 1983, *Ketidak Merataan, Konflik dan Perubahan*. Terj., Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal: 32-36

Israel, Irak dengan pasukan multinasional. Ada konflik yang disebut konflik kebudayaan, yaitu persaingan antara dua masyarakat sosial yang mempunyai kebudayaan hampir sama. Ada pula konflik sosial, yaitu pertentangan antar masyarakat yang bersifat menyeluruh. Konflik yang terus menerus terjadi antara dua kekuatan ini mengakibatkan damai yang di cita-citakan sulit tercapai.²⁰

Konflik dan perang yang tiada hentinya yang dialami suatu bangsa atau negara secara terus menerus menyebabkan ketertekanan dalam hidup, terutama kedamaian atau perdamaian yang merupakan cita-cita setiap orang tidak pernah terwujud. Perdamaian itu bisa terwujud apabila tidak ada lagi perang di dunia ini. Suatu kelompok / negara menahan diri dengan terlibat membawa damai, dan menjauhkan kekerasan merupakan tantangan sehari-hari. Ini dapat dimulai dengan perjuangan-perjuangan kecil untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri juga bangsa dan negara lain. Sikap yang tidak kenal kekerasan melibatkan konfrontasi, tetapi konfrontasi tujuannya adalah perdamaian.

Perdamaian menurut King, ada perdamaian positif dengan perdamaian negatif. Perdamaian negatif disamakannya dengan perihal mempertahankan situasi-situasi yang keras dan mengatakan bahwa tatanan atau tata tertib seperti ini sama dengan perdamaian. Perdamaian negatif yang berbau ketidakadilan atau “kekerasan lembagawi” haruslah tersingkap menjadi terang/terbuka, sehingga dapat diubah menjadi perdamaian positif.

Perdamaian positif, yaitu perdamaian yang bernafaskan keadilan dan cinta kasih. Pemikiran King ini dapat disimpulkan bahwa perdamaian itu ada kalau tidak ada perang, keadaan tidak bermusuhan/perselisihan, dan yang ada hanyalah

²⁰ *Eniklopedi Indonesia* (4) 1993, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta, hal: 1849

aman, tenang, tenteram. Pemikiran ini sangat relevan dengan perjuangan rakyat Palestina bahwa perdamaian harus diwujudkan sesuai dengan keinginan dan cita-cita rakyat Palestina sendiri. Jika ada damai maka rakyat Palestina dapat menentukan nasib sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat.²¹

3. Arti Nasionalisme

Pembahasan nasionalisme ini penting karena nasionalisme sebagai dasar perjuangan masyarakat bangsa untuk membentuk suatu negara. Ada beberapa ahli memberi arti yang berbeda tentang nasionalisme, antara lain :

Hans Kohn mencatat bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi individu diserahkan kepada negara kebangsaan, ini berarti negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik.²²

Charleton J.H. Hayes mengemukakan nasionalisme adalah kesetiaan yang sungguh-sungguh terhadap negara kebangsaan (nation state) yang mengungguli semua kesetiaan yang lain.²³ D.B. Heater menggambarkan nasionalisme sebagai suatu fakta dominan dalam menimbulkan jaringan yang menghubungkan berbagai kepentingan, perasaan dan ide-ide yang mengikat manusia ke dalam wilayah-wilayah yang mendasari terbentuknya kelompok-kelompok politik. Kelompok politik yang dimaksud adalah terbentuknya suatu negara.²⁴

L. Stoddart berpendapat nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa yang berupa kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia perorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Lebih lanjut dikatakan

²¹ James Mc Ginnes, 1997, *Menjadi Pembawa Damai*, Kanisius, Yogyakarta, hal: 54-55

²² Hans Kohn, 1961, *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya*, PT. Pembangunan, Djakarta, hal: 12

²³ Charleton J.H. Hayes, 1951, *Essey And Nationalism, Reading In World Politik*, Illinois: American Fondation For Political Education, hal: 160

²⁴ D.B Heater, 1967, *Political Ideans In Modern World*, London: George G, Barrap & Co, hal: 30

nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan (*sense of belonging*) sebagai suatu bangsa.²⁵ Nasionalisme yang dicatat Ernest Renan adalah paham dari sekelompok orang yang telah bersama-sama mengalami satu riwayat yang merasa diri satu dan kemudian mempunyai keinginan bersama untuk bersatu serta mempertahankan persatuan itu dengan jalan apapun.²⁶

Nasionalisme menurut Ir. Soekarno adalah keinsafan dan pendirian rakyat bahwa rakyat tersebut merasa dalam satu ikatan persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Bangsa di sini adalah sekelompok orang yang mempunyai persamaan watak dan mempunyai kehendak bersama yang berdiri di atas suatu wilayah yang nyata satu unit.²⁷ Nasionalisme menurut Hassan Sadily dkk, dalam ensiklopedi Indonesia adalah sikap politik dan sosial dari kelompok yang mempunyai kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian mereka merasa adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompoknya.²⁸

Nasionalisme menurut David K. Sill dkk, dalam International Encyclopedia of Social Science adalah suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberikan pengabsahan terhadap klaim atau tuntutan kekuasaan.²⁹ Berbagai definisi tersebut meskipun terdapat perbedaan rumusan, namun mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu kesamaan dalam hal keinginan bersatu dalam bidang politik dalam suatu negara kebangsaan (nasional). Unsur dasar yang selalu ada dalam setiap nasionalisme adalah sama, yaitu rasa cinta tanah air dan keinginan untuk mempertahankan eksistensi nusa

²⁵ L. Stoddart, 1964, *Dunia Baru Islam*, Balai Poestaka, Djakarta, hal: 137

²⁶ Soekarno, 1964, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Gunung Agung, Djakarta, hal: 3-4

²⁷ Soekarno, 1964, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Inti Idayu Press, Djakarta, hal: 57

²⁸ Hassan Sadily (ed), 1964, *Ensiklopedi Indonesia no. 4*, Elsevier Publishing Projects, hal: 2238

²⁹ David K. Sill (ed), 1972, *International Encyclopedia of Social Science*, The Macmillan Company and The Free Press, New York, hal: 63

dan bangsa dari berbagai bentuk tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

4. Nasionalisme Palestina

Berbicara tentang nasionalisme Palestina tidak terlepas dari nasionalisme Arab karena Palestina merupakan bagian dari dunia Arab. Semangat nasionalisme yang dimiliki bangsa Palestina muncul karena kehadiran Israel di kawasan Timur Tengah. Namun sebagai bagian dari negara Arab nasionalisme Palestina sudah lahir sebelum kedatangan bangsa Yahudi. Semangat nasionalisme orang Palestina ini disebabkan karena menuntut hak kemerdekaan atas wilayah Palestina seperti tercantum dalam Resolusi PBB nomer 181 bahwa Palestina akan dibagi dua, yaitu Palestina dan Israel.

Menurut Amos, ada tiga alasan utama yang menyebabkan timbulnya organisasi perlawanan terhadap Israel. Pertama, adanya kejadian-kejadian yang menimpa orang Palestina dan reaksi politik dari sebagian besar negara Arab. Kedua, adanya perasaan kepalestinaan sebagai identitas kultural untuk membentuk masyarakat Palestina. Ketiga, usaha untuk mempersatukan masyarakat Palestina yang secara geografis dan sosial tersebar diberbagai tempat dalam suatu organisasi.³⁰

Bangsa Arab pun memiliki rasa cinta tanah air dengan dasar kesamaan geografis, budaya, bahasa, sejarah dan sebagainya; negara-negara Arab ingin bersatu (Pan Arabisme/ Nasionalisme Arab) yang menjadi cita-cita bangsa Arab. Tujuan nasionalisme Arab adalah terciptanya sebuah negara merdeka yaitu

³⁰ M. Risa Sihbudi, dkk., 1993, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Eresco, Bandung, hal: 27

melepaskan diri dari kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Barat, membentuk suatu negara merdeka, suatu imperium Arab yang sempurna (dari sungai Euphrat/ Tigris hingga Terusan Zues dan dari Laut Tengah hingga Laut Arab (Teluk Persia). Pan-Arabisme sulit tercapai karena sering terjadi konflik di kawasan Timur Tengah.

Sulitnya persatuan Arab itu dapat dimengerti apabila diingat ada dua macam nasionalisme Arab yang sulit untuk dikompromikan³¹. **Pertama**, nasionalisme dalam arti yang luas (*Qaumiyah*) yang berusaha menyatukan seluruh dunia Arab dari Yaman sampai dengan Maroko. Dalam kerangka nasionalisme Qaumiyah seharusnya sekitar 21 negara Arab dapat bersatu menjadi satu kesatuan yang dahsyat di panggung politik internasional. Dengan kata lain, nasionalisme Qaumiyah bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kawasan yang ada di dunia Arab baik di bidang ekonomi, politik, militer, sosial-budaya dan lainnya agar menjadi satu kesatuan politik dan menginginkan agar kepentingan nasional tiap-tiap negara Arab dilebur untuk mencapai kepentingan Arab secara luas.

Kedua, nasionalisme lokal (*Wathaniyyah*) dalam arti setiap negara Arab akan mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri. Artinya apabila ada 21 negara Arab, maka pasti ada 21 macam kepentingan nasional. Tujuan nasionalisme lokal lebih diarahkan kepada perjuangan kemerdekaan tiap-tiap negara tersebut. Kepentingan nasional ini bukan saja berbeda satu sama lain akan

³¹ Alan R. Taylor, 1990, *Pergeseran-pergeseran Aliansi Dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*, Amarpres, Surabaya, hal : Xi-Xii

tetapi tidak jarang juga saling bertabrakan. Kegagalan ini terjadi karena kekuasaan tertinggi masing-masing negara dibayangi oleh kepentingan politik pribadi yang berpikir dengan cara yang berbeda serta tidak saling mempercayai satu sama lain. Walaupun begitu ide persatuan Arab sampai saat ini masih terus didengungkan oleh para pemimpin negara-negara Arab. Persatuan Arab secara politis memang agak sulit, namun negara-negara Arab pernah bersatu dan ingin membentuk sebuah negara Arab Merdeka. Sejarah telah mencatat bahwa nasionalisme Arab pernah ada yaitu pada zaman Umayyah dan Abassiah (membentuk Imperium Arab). Pemimpin-pemimpin Arab yang pernah membentuk sebuah negara Arab (dalam arti sempit): Sultan Muh. Ali dari Mesir, Syarif Husein dari Mekkah, Nasser dari Mesir, Saddam Husein dari Irak.

5. Faktor-Faktor Pembentuk Nasionalisme Arab

Ada dua faktor pembentuk nasionalisme Arab : *pertama*, faktor dari dalam negara Arab yakni bahasa Arab, sejarah, kepentingan bersama, tradisi/kebudayaan dan agama Islam.

1. Bahasa Arab

Faktor bahasa Arab merupakan yang utama dalam membentuk nasionalisme Arab karena bahasa membentuk dan memelihara kesadaran golongan. Pada zaman pra-Islam kesatuan Arab bukan merupakan kesatuan politis, melainkan memperkembangkan kesadaran sosial dan budaya, terutama karena persamaan bahasa. Syair-syair, peribahasa, tradisi-tradisi yang dinyatakan dalam kesusasteraan lisan dan yang diteruskan melalui tradisi lisan mempengaruhi perkembangan kesadaran nasionalisme Arab. Bahasa memang penting sebagai media, agar rakyat dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan. Bahasa Arab

pertama kali digunakan dalam lingkup yang kecil, sedangkan wilayah Arab saat ini luas, maka yang dilakukan oleh pemakai bahasa agar bahasa Arab bisa meluas; **Pertama**, bahasa Arab disebarluaskan melalui penyebaran agama Islam. Bagi masyarakat yang memeluk agama Islam harus berhadapan dengan Quran karena tulisan dan bahasa Quran adalah tulisan dan bahasa Arab. **Kedua**, pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abassiah. Kebudayaan Islam memperkaya diri dengan mentransfer kebudayaan luar yakni kebudayaan Yunani, kebudayaan India dan Persia. Kebudayaan luar ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. **Ketiga**, pada masa pra-pergerakan nasional dan awal pergerakan nasional, guna menyebarluaskan bahasa Arab, di Mesir buku-buku berbahasa Arab mulai dicetak, pengadaan literatur berbahasa Arab. Sekolah-sekolah mulai diajarkan mata pelajaran bahasa Arab, sejarah dan sosial budaya Arab.

2. Sejarah

Pengalaman sejarah masa lampau yang penuh dengan kegemilangan dan kemalangan bangsa Arab, mendorong bangsa Arab untuk bersatu dan menciptakan persamaan aspirasi bagi masa depan Arab. Kesadaran sejarah merupakan bagian penting dari kesadaran nasional karena pada hakikatnya faktor dari dalam bangsa Arab sendiri merupakan kekuatan untuk bangkit dan membangun persatuan dan kesatuan Arab. Kegemilangan sejarah Arab dan merupakan puncak kejayaan Islam, pada masa Umayyah (abad 7-8) dan Abassiah (abad 10-13). Pada masa



kejayaan ini Islam sangat kokoh dalam bidang militer, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya. Sebagai indikasi bahwa pernah berjaya dengan membentuk Imperium Arab (Islam) dari Maroko hingga Lembah Hindustan.

Masa kejayaan ini tidak mungkin abadi, karena mengalami pasang surut. Sebagai bangsa yang berjaya akhirnya mengalami penderitaan ketika bangsa Barat maupun Turki menyulut rasa persatuan. Trauma kolonialisme dan imperialisme inilah yang membuat bangsa Arab merasa senasib, lalu bersama-sama berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nasionalisme lokal juga menjadi milik bersama dan kebanggaan Arab. Misalnya Mesir pada masa Firaun, bangsa Phoenisia (Suriah/Libanon), Babylonia (Irak). Sejarah masa lalu tidak selalu menghadirkan nilai persatuan bahkan konflik sering terjadi seperti Umayyah (Damaskus, Suriah) dengan Abassiah (Irak). Sejarah lokal jika mengklaim diri 'lebih' maka dapat menimbulkan perbedaan dan pertentangan sesama negara Arab.

3. Kepentingan Bersama

Faktor kepentingan bersama seperti ekonomi, politik, militer, agama dan sosial budaya. Berdasarkan kepentingan bersama, maka kesepakatan bersama bisa tercapai oleh sesama negara Arab. Kepentingan bersama yang paling menonjol adalah politik dan ekonomi, karena pemulihan dan pertumbuhan ekonomi sehat dan baik jika stabilitas nasional terjamin. Berdasarkan kepentingan bersama

juga akhirnya negara Arab berhasil membentuk organisasi regional Liga Arab untuk menghadapi kekuasaan bangsa Barat.

4. Tradisi/Kebudayaan

Kebudayaan yang dimaksud adalah warisan Islam. Warisan Islam oleh kaum nasionalis Arab sebagai warisan nasional sehingga ditulis dalam bahasa Arab. Warisan Islam merupakan peradaban besar karena dengan warisan nasional menghidupkan kesadaran nasionalisme Arab. Justru warisan nasional inilah yang membentuk kepribadian suatu bangsa dan suatu negara tidak akan kehilangan penegaknya yang azasi kehilangan *raison d'etre*nya.

5. Agama Islam

Agama Islam merupakan unsur pokok nasionalisme Arab. Peranan agama Islam sebagai pengikat dan pemersatu masyarakat/ suku yang terlibat konflik yang tidak dapat didamaikan. Peranan Islam ini harus dilihat dari segi luasnya wilayah Arab pada awal pergerakan nasional sampai abad XIII (wilayah jazirah Arab atau dunia Arab). Masa ini agama Islam dan Arab masih identik. Dewasa ini agama Islam dan Arab tidak identik lagi karena universal sifatnya, sehingga bangsa Arab tidak bisa mengklaim bahwa agama Islam sebagai milik.

Faktor *kedua*, faktor dari luar Arab yakni :

1. Bangsa Barat

Penjajahan atau penguasaan terhadap negara Arab memiliki nilai positif dan negatif. Di bidang sosial dan budaya dilihat sebagai sesuatu

yang positif seperti pendidikan bangsa Barat banyak memberi sumbangan kepada bangsa Arab. Melalui pendidikan (diajarkan sejarah, sosial budaya Arab) bangsa Arab maju dan berkembang serta sadar akan ke-Arabannya. Dalam bidang politik, militer memiliki nilai negatif karena kehadiran bangsa Barat membawa kesengsaraan, akibatnya bangsa Arab melawan bangsa Barat.

2. Turki

Turki menjajah negara-negara Arab dari abad XIII-XX. Bangsa Arab awalnya merasa simpatik dengan kehadiran bangsa Turki. Hal ini disebabkan bangsa Turki dengan Arab satu agama yaitu Islam dan bahasa Arab sebagai bahasa formal. Rasa simpatik ini kemudian berubah menjadi perlawanan karena tumbuhnya nasionalisme Turki abad XIX yang menampilkan ke-Turkiannya; dan dipihak Arab sadar akan perbedaan Arab dengan Turki.

3. Israel

Nasionalisme Arab sebelum kedatangan Israel sudah lahir. Kehadiran bangsa Israel dalam pembentukan nasionalisme Arab bukan sebagai pendorong pertumbuhan melainkan sebagai penggalak/provokator. Dikatakan sebagai penggalak/provokator karena sejak pemulangan orang Yahudi ke Palestina (Deklarasi Balfour 1917) awal abad XX atau pertengahan abad XX telah terjadi konflik. Nasionalisme Arab semakin kuat ketika bangsa Yahudi mendirikan negara Israel di tanah

Palestina pada tahun 1948. Sejak tahun 1948 awal mula perang Arab-Israel yang hingga kini belum ada titik temu antara kedua negara.

Nasionalisme Arab sebenarnya mempunyai tujuan utama mendirikan sebuah negara Arab merdeka. Tujuan ini gagal dan yang berhasil adalah membentuk Liga Arab (1945). Kegagalan untuk mendirikan negara disebabkan perjuangan nasionalisme lokal sangat kuat. Dengan kata lain setiap pemimpin/penggerak tumbuhnya nasionalisme Arab (lokal) berambisi untuk menjadi pemersatu dan pemimpin bangsa Arab. Sebenarnya dari sekian banyak faktor pembentuk nasionalisme Arab itu yang menjadi faktor utama dalam pembentukan bangsa Arab ialah jenis bangsa³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik-cultural. Pendekatan cultural digunakan untuk menjelaskan hubungan Perang Teluk II dengan pembentukan Negara Palestina merdeka, yaitu adanya persamaan kebudayaan Arab, sejarah, agama dan bahasa. Palestina yang merupakan salah satu negara Arab merasa mendapat “angin segar” ketika pecah Perang Teluk II. Hal ini dikarenakan orang Palestina sedang gencar-gencarnya melakukan perlawanan dengan Israel untuk memperoleh kemerdekaan. Akan tetapi, Israel tidak ingin Palestina menjadi sebuah negara yang mandiri. Sedangkan dalam Perang Teluk II masalah Palestina menjadi salah satu syarat perdamaian krisis Teluk dan kawasan Timur Tengah pada umumnya. Dengan demikian, adanya persamaan kebudayaan, sejarah, agama, dan bahasa tersebut terjalin kerjasama di antara Irak dan Palestina apalagi kedua negara merasa satu saudara. Pendekatan politik digunakan untuk

³² Hasem Zaki Nuseibeh, 1969, *Gagasan Nasionalisme Arab*, Djakarta : Bhratara. hal : 2-45; W. Montgomery Watt, 1987, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Beunabi Cipta. hal: 144.

menjelaskan proses, wujud dan pengaruh Perang Teluk II dengan proses pembentukan Negara Palestina.

D. Perumusan Masalah

Setelah melihat gambaran di atas dapat penulis rumuskan beberapa masalah pokok yang akan menjadi obyek penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pembentukan negara Palestina sampai Perang Teluk II ?
2. Mengapa terjadi Perang Teluk II ?
3. Bagaimanakah pengaruh Perang Teluk II terhadap pembentukan negara Palestina merdeka ?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian tidak selalu sama bagi semua ilmu pengetahuan, dalam arti ada metode tertentu yang menjadi ciri bidang tertentu sehingga pesan yang spesifik akan tercermin melalui metode penulisan yang digunakan. Dalam penulisan sejarah tidak akan terlepas dari penulisnya sendiri, hal ini seperti ditulis oleh Sartono “dalam memilih sumbernya ahli sejarah tidak mungkin tanpa dipengaruhi oleh pribadinya, politik, kebangsaan, agama dan kebudayaannya”.³³ Jadi perlulah ditentukan subyek yang akan diteliti setelah itu dikumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diuji kebenarannya dan kemudian dipetik unsur-unsur yang dapat dipercaya dari sumber-sumber tersebut untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam sejarah, peneliti dan objek yang diteliti dipisahkan oleh jarak waktu, karena itu jawaban jangan memaksakan kepastian.

³³ Sartono K., 1990, *Ungkapan-ungkapan Sejarah Barat dan Timur*, Gramedia, Jakarta, hal: 7

Sumber sejarah tidak selalu memberikan informasi yang mencukupi dan jelas. Untuk itu, sejarawan harus berani menyatakan dengan kemungkinan yang mendekati kebenaran.³⁴

Metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi. Metode penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.³⁵

1. Pengumpulan Data

Menurut bentuknya sumber sejarah dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber tertulis, sumber benda (artefact) dan sumber lisan. Sumber tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi, laporan umum dan lain-lain. Ditinjau dari sumber penelitian, penulisan ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur yang ada di perpustakaan baik buku, dokumen, koran, majalah dan publikasi lainnya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data diperoleh dengan cara studi pustaka.³⁶

2. Pengolahan Data

Dalam penelitian sejarah setelah data-data terkumpul, dilakukan verifikasi (kritik sumber) untuk mencari keabsahan, baik berupa kritik intern maupun kritik

³⁴ G. Moedjanto, 2000, "Suplemen Sejarah Perlu Kreativitas Guru", dalam *Kompas*, 10 April.

³⁵ Louis Gottschalk, 1975, *Mengerti Sejarah* (terj), Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal: 32

³⁶ *Ibid.* hal: 33-34

ekstern. Kritik intern dipakai untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh. Sedangkan kritik ekstern digunakan untuk menguji otentisitas atau keaslian suatu sumber.³⁷ Secara umum dapat dikatakan bahwa tahap verifikasi bertujuan untuk membuang informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya serta kredibilitasnya.³⁸ Salah satu cara yang ditempuh untuk kritik intern adalah perbandingan antar sumber. Jika pembandingan ini semua positif maka sumber tersebut dapat diakui kredibilitasnya. Kritik ekstern sumber tertulis dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai beserta sifat dan wataknya, daya ingatnya, jauh dekatnya dari peristiwa. Sumber perlu diselidiki mana yang relevan dengan pokok penelitian kemudian diolah menjadi fakta-fakta. Hasil kritik sumber adalah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan atau rekonstruksi.³⁹ Namun, penulis tidak melakukan kritik sumber baik kritik intern maupun kritik ekstern.

Data yang telah diseleksi dan diuji kebenarannya kemudian diinterpretasikan atau dianalisis. Analisis merupakan tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Jenis analisis ditentukan oleh sifat data yang dikumpulkan, apabila data yang dikumpulkan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus maka analisisnya bersifat kualitatif. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu suatu proses penulisan kembali runtutan peristiwa-peristiwa masa lampau berdasarkan pada data-data yang sudah diperoleh dan diuji kebenarannya.

³⁷ Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hal : 98-100

³⁸ Sumadi Suryabrata, 1989, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, hal: 18

³⁹ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hal: 80-83

F. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Tujuan penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Perang Teluk II Terhadap Proses Pembentukan Negara Palestina adalah untuk mengetahui pengaruh Perang Teluk II dan akibat yang ditimbulkannya bagi proses pembentukan negara Palestina.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui proses pembentukan negara Palestina sampai Perang Teluk II.
- b. Untuk mengetahui lebih jelas terjadinya Perang Teluk II.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Perang Teluk II terhadap pembentukan negara Palestina merdeka.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang menyeluruh dari skripsi yang berjudul Pengaruh Perang Teluk II Terhadap Proses Pembentukan Negara Palestina ini, maka penulis sajikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Menguraikan secara umum latar belakang perang teluk dan masalah Palestina, rumusan masalah, metode penulisan, tinjauan pustaka, sistematika penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan.

BAB II : Proses Pembentukan Negara Palestina sampai Perang Teluk II

Menguraikan proses pembentukan Negara Palestina sebelum Perang Teluk II dan proses pembentukan negara Palestina menjelang Perang Teluk II

BAB III : Terjadinya Perang Teluk II.

Menguraikan latar belakang, proses dan dampak terjadinya Perang Teluk II.

BAB IV : Pengaruh Perang Teluk II Terhadap Pembentukan Negara Palestina Merdeka.

Menguraikan tentang upaya perdamaian Palestina-Israel sesudah Perang Teluk II; pengaruh Perang Teluk II dan tuntutan pembentukan negara Palestina merdeka.

BAB V : Kesimpulan

Merupakan bab akhir dari rangkaian keseluruhan skripsi yang berjudul Pengaruh Perang Teluk II Terhadap Proses Pembentukan Negara Palestina.

H. Manfaat Penulisan

a. Bagi penulis

1. Penulisan skripsi ini akan menambah pengetahuan tentang pengaruh Perang Teluk II terhadap proses pembentukan negara Palestina.
2. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.

b. Bagi Institut

Khususnya untuk Jurusan Pendidikan Sejarah, hasil penulisan ini akan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan Sejarah Timur Tengah tentang Pengaruh Perang Teluk II dengan Proses Pembentukan Negara Palestina.

BAB II

PROSES PEMBENTUKAN NEGARA PALESTINA

SAMPAI PERANG TELUK II

A. Proses Pembentukan Negara Palestina Sebelum Perang Teluk II

Pada zaman purbakala, negeri yang disebut Palestina itu didiami oleh rumpun bangsa Hananei dan terdiri atas beberapa suku bangsa.¹ Setelah itu secara berangsur-angsur datanglah suku-suku penggembala dari suku Semit termasuk keturunan Arab dan Yahudi pada abad ke 11 SM. Suku-suku ini kemudian membentuk kerajaan di Palestina. Sebagai akibat perselisihan yang sering muncul di dalam negeri, sekitar tahun 928 SM kerajaan ini kemudian terbagi menjadi 2, yaitu Israel dan Yuda (Yudea). Yerusalem menjadi ibukota kerajaan Yuda (Yudea). Kedua kerajaan ini tidak berumur panjang karena Israel dihancurkan oleh suku bangsa Assiria dan kerajaan Yuda (Yudea) direbut oleh raja Nebukadnezar dari Babylonia. Akan tetapi sesudah Babylonia jatuh, sebagian orang Yuda kembali lagi ke Palestina dan membangun kerajaan Yuda di sekitar Yerusalem. Nasib kerajaan ini juga tidak bertahan lama karena diserbu oleh kerajaan Romawi pada tahun 70 SM.

Sejumlah suku bangsa yang tadinya terpencar-pencar berusaha kembali, terutama orang Arab Palestina dan Israel. Pada tahun 637 Palestina dan Yerusalem direbut oleh kerajaan Islam Arab di bawah pimpinan Khalifah Umar Ibn al-Chathab². Keadaan seperti ini terus berlangsung selama ratusan tahun hingga

¹ Ibrahim Latief, 1991, *Zionisme Israel dan Kebangkitan Nasionalisme Arab*, Metro Pos: Jakarta, hal. 35-37

² M. Nur El Ibrahimy, 1955, *Tragedia Palestina*, Seri B. (*dalam Tjatur Politik Imperealis di Negra-negara Islam Timur Tengah*), N.V. Alma' Arif, Bandung, hal : 5

akhirnya pada tahun 1517 Palestina dan kota suci Yerusalem direbut oleh kerajaan Islam Turki yang berkuasa sampai pecah Perang Dunia I. Pada waktu meletus PD I Turki mendukung Jerman melawan sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh sekutu untuk mendekati negara-negara Arab agar berperang di pihak sekutu dengan maksud melepaskan bangsa Arab dari kelaliman Turki dan untuk membantu memerdekakan negara Arab. Untuk kepentingan ini Sir Henry Mc. Mohan, raja Muda Inggris di Mesir mengadakan perundingan dengan Syarif Husein. Syarif Husein mengemukakan satu syarat, yaitu seluruh daerah Arab yang berada di bawah kekuasaan Turki harus dibebaskan dan menjadi satu negara merdeka dan berdaulat termasuk Irak, Suriah, Palestina dan Jazirah Arabia kecuali Aden jajahan Inggris³.

Dalam sebuah buku yang berjudul *One Land, Two Peoples* tulisan Deborah J. Gerner memperlihatkan bagaimana sepetak tanah diakui oleh dua kelompok bangsa, yaitu Palestina dan Israel. Masing-masing mengaku sebagai pihak yang paling berhak atas tanah tersebut.⁴ Akibatnya, kedua kelompok bangsa itu berjuang untuk memperoleh apa yang diakuinya sebagai milik kelompok. Konflik antara dua kelompok bangsa itu tidak dapat dihindari ketika pada 2 November 1917, Inggris secara resmi mengumumkan *statemen politik* tentang Palestina yang dinamakan "Balfour Declaration". Deklarasi itu menegaskan bahwa Inggris telah menganugerahkan untuk mendirikan di Palestina sebuah perumahan nasional bagi bangsa Yahudi.⁵ Pada 19 Desember 1917, tentara

³ *Ibid*, Seri A, hal. 90

⁴ M. Riza Sihbudi, 1993, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung : PT Eresco, hal: 42

⁵ Oemar Amin Hoesin, 1953, *Gelora Politik Negara-Negara Arab*, Tirtamas, Djakarta, Hal : 203-204

Inggris mengalahkan tentara Turki di Yerusalem dan pada 29 September 1923, Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan daerah tersebut kepada Inggris sebagai daerah mandat.

Konflik Israel-Palestina semakin memanas ketika Israel mengumumkan berdirinya negara Israel di Palestina pada tanggal 14 Mei 1948. Pengumuman kemerdekaan Israel terjadi satu hari sebelum PBB secara resmi mencabut mandat Inggris atas Palestina. Dengan kemerdekaan ini tercapailah cita-cita orang Yahudi yang tersebar diberbagai belahan dunia untuk mendirikan negara sendiri.

Setelah Israel berdiri, orang Palestina banyak yang terusir dan menggungsi ke negara tetangga Arab lain. Setidaknya pernah terjadi empat kali perang antara Palestina dan Israel, yaitu tahun 1948, 1956, 1967 dan 1973. Perang itu tidak hanya melibatkan nagara-negara Arab yang menjadi tetangga wilayah konflik, seperti Mesir dan Suriah, tetapi juga telah melibatkan negara yang jauh dari wilayah itu, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Dengan berdirinya negara Israel tersebut berarti pihak Israel berkhianat karena dalam resolusi PBB tanggal 29 November 1947 No. 181 menetapkan bahwa di Palestina akan berdiri 2 negara, yaitu Palestina dan Israel. Sedangkan Yerusalem sebagai wilayah di bawah pengawasan internasional.

Sebenarnya perlawanan orang Palestina sudah dimulai sejak masuknya para imigran Yahudi ke Palestina dengan dukungan Inggris (Deklarasi Balfour 1917). Akan tetapi, baru pada paruh pertama tahun 1930-an proses pertumbuhan nasionalisme Palestina semakin maju. Tahun 1935, terdapat 5 partai politik yang bersaing, yaitu Partai Pertahanan Nasional Nashashibi, Partai Arab Palestina keluarga Hussein, Kongres Pemuda, Istiqlal, Partai Pembaharu Hussein Khalidi (yang beraliansi dengan partai Arab Palestina) dan Blok Nasional Abdullatif

Saleh. Berdirinya partai-partai politik tersebut sebagai akibat semakin kuatnya gerakan zionisme Israel. Untuk menghadapi zionisme, masyarakat Palestina mengadakan gerakan yang disebut dengan “Revolusi Palestina 1936-1939”.⁶ Gerakan ini pada intinya menolak kedatangan imigran Yahudi yang ingin mendirikan Negara Israel di Palestina. Akhirnya, pada tahun 1940-an konflik Israel-Palestina menjadi masalah internasional.

Konflik Palestina-Israel telah menarik perhatian dunia internasional sehingga diinginkan penyelesaian secara damai. Penyelesaian damai yang dikehendaki adalah sebagaimana tercantum dalam Resolusi PBB No. 181. Jika pihak yang bertikai ingin menyelesaikan masalah dan mewujudkan perdamaian, maka Israel harus mengembalikan wilayah yang telah dikuasainya sejak perang 1967 kepada Palestina. Sebagai kompensasi, Palestina dan negara-negara Arab mengakui keberadaan Israel dan hidup berdampingan secara damai. Ide ini sebenarnya cukup adil karena Israel mendapat pengakuan dari negara Arab dan Palestina mendapatkan wilayah untuk mendirikan negara. Akan tetapi, Israel bersikeras untuk mempertahankan daerah pendudukan dalam kekuasaannya. Israel selalu berdalih bahwa daerah Tepi Barat adalah wilayah Judea dan Samaria “yang dijanjikan” oleh Kitab Suci sebagai daerah orang Israel⁷.

Tindakan kekerasan Israel terhadap penduduk Palestina sudah terjadi sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Pembunuhan, pengusiran dan pengambilan lahan secara paksa baik yang dilakukan militer maupun penduduk sipil Israel sudah menjadi realitas kehidupan rakyat Palestina. Hampir setiap kali terjadi peperangan antara Arab dengan Israel selalu diiringi dengan perluasan

⁶ *Ibid*, hal: 49

⁷ *Ibid*, hal : 50

wilayah dan pengungsian warga Palestina. Dari berbagai peperangan sejak 1948, tampak perang 1967 merupakan perang yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara Arab-Israel. Perang Arab-Israel tahun 1967 itu hanya berlangsung singkat, yaitu 6 hari (5-10 Juni 1967), karena itu terkenal dengan sebutan Perang 6 hari. Perang ini merupakan kemenangan terbesar Israel, sekaligus kekalahan terbesar Arab.

Israel berhasil menguasai Dataran Tinggi Golan (Syria), Tepi Barat Sungai Yordan (Yordania) dan Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai (Mesir) pada perang 1976. Sejak tahun 1979, Sinai diserahkan kepada Mesir sebagai hasil persetujuan Camp David. Dengan demikian, tinggal tiga wilayah yang belum diserahkan kepada Arab. Ketiga wilayah ini dikenal sebagai daerah pendudukan. Rakyat Palestina yang hidup di daerah pendudukan mengalami berbagai tekanan dan perlakuan diskriminatif dari pemerintah pendudukan Israel, baik secara ekonomi maupun politis. Perlakuan Israel terhadap warga Palestina secara sewenang-wenang itu menimbulkan kebencian yang sangat besar terhadap Israel.

1. Lahirnya Pergerakan Nasional Palestina

Palestina sebagai suatu negara tentu saja mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). Namun hak tersebut sampai saat ini belum diakui oleh Israel. Walaupun demikian, semangat untuk memperjuangkan haknya tidak pernah surut. Semangat juang orang Palestina sebenarnya sudah ada sejak tahun 1908 saat munculnya pergerakan di Arab untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Dengan munculnya pergerakan nasional itu bangsa Arab umumnya dan terutama Arab Palestina memperjuangkan hak *self determination* sampai dengan

dikeluarkannya Balfour Declaration 1917, yaitu membangun tanah Yahudi (*Jewish National Home*) di Palestina.⁸

Tokoh-tokoh kaum nasionalis Arab umumnya dan terutama Arab Palestina untuk mencapai cita-cita Arab merdeka mengadakan kongres pertama Arab 1913, yaitu untuk mengusir Turki dari dunia Arab. Demi Palestina merdeka dalam perkembangannya tokoh nasionalis ini membentuk lembaga-lembaga Arab seperti, Lembaga Arab Tertinggi tahun 1935 untuk memperjuangkan Palestina merdeka. Kongres maupun lembaga tersebut sebagai alat perjuangan bangsa Arab untuk mengusir kolonialisme.⁹

Nasionalisme muncul khususnya di Arab Palestina sebenarnya disebabkan keberadaan orang Yahudi sejak dikeluarkannya Deklarasi Balfour 1917. Tokoh-tokoh Arab Palestina seperti, Fauziah-Quarqji, al-Hadj Amin al-Huseini, dkk memimpin warga Palestina untuk melawan orang Yahudi dan Inggris. Perjuangan warga Palestina menuntut kemerdekaan dan penentuan pemerintahan sendiri. Selain tokoh Arab Palestina, tokoh Arab lain seperti Amir Abdulah al-Amir Hussein (Mesir), Amir Faizal (Arab Saudi), Saiful Islam Amir Hussein (Yaman), Nuri as-Said (Irak) dan Taufiq abu as-Huda (Yordania) ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada tahun 1939.¹⁰

Walau pun Palestina hingga saat ini belum diakui sebagai suatu negara khususnya Israel, semangat nasionalisme warga Palestina tidak pernah padam. Indikasi semangat Arab Palestina tidak surut ditunjukkan dalam cara perjuangannya, yaitu diplomasi maupun perang dari tahun ke tahun sampai

⁸ M. Nur EL Ibrahimy, 1955, Seri B., Tragedia Palestina *dalam Tjatur Politik Imperialis di Negara-negara Islam Timur Tengah*, N.V. Alma'arif, Bandung, Hal: 6

⁹ *Ibid*, hal: 5. 16

¹⁰ *Ibid*, hal: 17. 20-21

masalah Palestina mulai masuk menjadi agenda PBB tanggal 2 April 1947¹¹. Suatu hal yang paling menyakitkan orang Arab Palestina adalah dengan berdirinya negara dalam negara, yaitu Israel di Palestina pada 14 Mei 1948. Sejak tahun 1948 perang pun berkobar antara Arab-Israel. Perang antara kedua belah pihak selalu dimenangkan Israel.

Sejak kekalahan Arab pada perang 1948 tersebut, rakyat Arab Palestina hampir separuhnya menjadi pengungsi. Sedangkan kaum zionis terus memperluas proyek pemukimannya. Sampai bulan Juni 1977 ada sekitar 36 pemukiman yang dapat menampung 4.200 orang Yahudi. Kemudian selama bulan Juni 1981, meningkat menjadi 30.000 orang yang tinggal di 100 pemukiman. Semua pemukiman ini ada di Tepi Barat dan belum termasuk di Jalur Gaza.¹² Pada umumnya rakyat Palestina yakin bahwa tuntutan atas wilayah Palestina yang telah dikuasai orang Yahudi secara historis dan moral tidak dapat diganggu gugat. Kemenangan Israel tahun 1948 telah mengakibatkan eksodus sekitar $\frac{3}{4}$ juta rakyat Arab Palestina ke negara-negara Arab tetangganya, terutama ke Yordania. Eksodus warga Palestina secara besar-besaran itu akibat dari serangkaian teror yang dilancarkan oleh Israel untuk mengusir orang Palestina dari wilayah pendudukan.

Secara sistematis serangkaian teror itu merupakan awal konflik terbuka antara Arab-Israel dan merupakan sumber utama instabilitas politik di Timur Tengah. Semakin banyak warga Palestina yang keluar dan menjadi pengungsi, penguasa Israel semakin senang. Golongan keras Israel memang menghendaki semua orang Palestina diusir dari daerah asalnya. Israel ingin membentuk negara

¹¹ *Ibid*, hal : 30

¹² Don Perez, 1986, *The West Bank: History, Political, Social and Economy*, Westview press, Boulder, hal: 56

Yahudi sebagaimana “dijanjikan” oleh Kitab Suci, termasuk Yudea dan Samaria (Tepi Barat). Menurut Israel, kalau orang Palestina masih ada yang tinggal, maka khawatir pada suatu saat nanti akan menjadi besar dan menggagalkan cita-cita zionisme.¹³

Di kalangan rakyat Palestina yang telah terusir dari wilayahnya inilah kemudian melahirkan keyakinan revolusioner bahwa apa yang telah diambil oleh Israel dengan kekerasan harus dapat direbut kembali. Apalagi setelah terbukti bahwa Israel menolak repatriasi rakyat Palestina dan sikap negara-negara Arab yang opresif (cenderung menindas) terhadap pendudukan Palestina di negara-negara tersebut menyebabkan situasi revolusioner semakin meningkat di kalangan massa Palestina. Sampai tahun 1967, rakyat Palestina masih mengandalkan kemerdekaan pada rezim-rezim Arab, berbeda halnya dengan al-Fatah (1957) yang tidak menyandarkan diri pada rezim Arab mana pun dan berusaha untuk tetap mandiri. Meskipun pada masa itu, al-Fatah menggunakan cara militer, bukanlah bertujuan untuk menghancurkan Israel, tetapi mengingatkan negara-negara Arab bahwa rakyat Palestina masih ada.

Negara-negara Arab tidak mengizinkan orang Palestina dalam perjuangan menggunakan gerakan militer. Akan tetapi, dalam perkembangannya negara-negara Arab tidak mampu menghalangi keinginan rakyat Palestina akan jalan perjuangannya. Demi mendapatkan hak kemerdekaan, rakyat Palestina tidak saja berjuang di daerah pendudukan akan tetapi juga berjuang di luar daerah pendudukan. Perjuangan warga Palestina melalui organisasi perlawanan Palestina yang berjumlah tidak kurang dari 15 organisasi dan semuanya bercita-cita

¹³ M.Risa, Sihbudi, 1991, *Islam, Dunia Arab, Iran : Bara Timur Tengah*, Bandung, Mizan, hal : 75

mendirikan negara Palestina yang merdeka. Organisasi perlawanan tersebut antara lain ada al-Fatah, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (PDFLP), Fron Rakyat untuk Pembebasan Palestina-Komando Umum (PFLP-GC), Al-Saiqah, Front Pembebasan Arab (ALF), dan lain-lain.¹⁴

Bagi warga Palestina organisasi-organisasi ini belum dapat mewakili aspirasi perjuangan mereka, maka tahun 1964 diadakan KTT Arab di Kairo.¹⁵ Keputusan yang ditetapkan dalam KTT adalah mengembalikan identitas orang Palestina, organisasi Palestina dan angkatan perang Palestina. Sementara itu bangsa Palestina menginginkan suatu organisasi yang bisa mewakili seluruh aspirasi orang Palestina, maka pada 28 Mei – 2 Juni 1964 diadakan kongres bangsa Palestina pertama di Yerusalem Timur. Kongres tersebut berhasil melahirkan PLO pada 2 Juni 1964 dengan maksud agar organisasi tersebut bisa mewakili identitas Palestina dan bisa diterima oleh semua negara Arab, dan bermarkas di Yerusalem. Selanjutnya, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dianggap sebagai wakil sah rakyat Palestina. Al-Fatah sebagai salah satu organisasi perjuangan Palestina di bawah pimpinan Yasser Arafat akhirnya pun ikut bergabung dengan PLO yang membuat organisasi ini lebih mandiri. Organisasi ini bisa mewakili identitas Palestina dan mengkoordinir organisasi perjuangan Palestina yang lainnya.

Setelah perang tahun 1967, markas PLO pindah ke Yordania. Tahun 1969, ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dipimpin oleh Yasser Arafat pamor PLO naik di kalangan Arab. Akibat peristiwa “September Hitam” markas

¹⁴ *Op.cit.* , hal : 75-76

¹⁵ M. Risa Sihbudi, hal : 27

PLO pindah ke Lebanon. Peristiwa September Hitam adalah peristiwa pengusiran orang Palestina dari Yordania dengan kekerasan pada bulan September 1970. Pada waktu itu banyak orang Palestina menjadi korban tentara Yordania. Pada tahun 1974, KTT Arab di Rabbat, Maroko memutuskan PLO sebagai satu-satunya wakil sah rakyat Palestina. Dalam perkembangannya, Majelis Umum PBB pada 22 Nopember 1974 mengukuhkan status PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Dan pada tahun 1983, markas PLO pindah ke Tunisia. Di bawah kepemimpinan Yasser Arafat, pamor PLO semakin meningkat karena perjuangan PLO dalam penyelesaian masalah tidak hanya dengan kekerasan tetapi juga dengan upaya diplomasi, sehingga di kalangan para pejuang Palestina timbul keyakinan baru bahwa orang Israel bukan tidak dapat dikalahkan¹⁶.

PLO telah banyak membawa perubahan di kalangan orang Palestina. PLO bukan hanya menjadi organisasi para gerilyawan, tetapi juga sebagai bangunan struktural sosial dan ekonomi masyarakat Palestina. Selain itu, dalam PLO ada beberapa organisasi sosial, seperti Perhimpunan Pekerja Palestina, Perhimpunan Wanita Palestina, Perhimpunan Mahasiswa Palestina, dan lain-lain. PLO juga memberikan pensiun dan tunjangan kesehatan kepada para janda dan anak pejuang yang gugur serta kepada para pejuang yang cacat¹⁷.

Salah satu hasil terbesar PLO adalah memproklamasikan kemerdekaan Negara Palestina pada 15 Nopember 1988 di Aljir, Aljazair. Kemerdekaan yang diproklamasikan 1988 merupakan berkat perjuangan organisasi yang ada di luar daerah pendudukan, dan kemerdekaan tersebut diakui dalam bentuk *de jure*. Oleh karena itu, Palestina masih membutuhkan perjuangan lanjutan yang

¹⁶ *Ibid*, hal : 27-28

¹⁷ M. Risa Sihbudi, 1991, hal : 77

memungkinkan berdirinya Negara Palestina secara de facto. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Negara Palestina menandai babak baru perjuangan rakyat Palestina yang dimulai sejak tahun 1948.

Selain PLO, kelompok pejuang Arab Palestina yang terkenal dengan sebutan Harakat Muqawwanrat Al-Islamiyyat (Hammas) merupakan pejuang yang semakin ditakuti Israel. Hamas yang bergerak di daerah pendudukan Israel, Jalur Gaza dan Tepi Barat, menganut kebijaksanaan melawan Israel dengan jalan kekerasan. Tujuan utama Hamas adalah mengusir Israel dari Palestina, lalu mendirikan negara Islam Palestina dan memelihara kesucian Masjidil Aqsha. Selain itu Hamas merupakan penggerak utama intifadah bangsa Palestina. Intifadah bangsa Palestina lahir sebagai akibat dari bentuk perlakuan diskriminatif Israel ditambah dengan tumbuhnya semangat keagamaan di kalangan Palestina.

2. Faktor Pendorong Kebangkitan Rakyat Palestina dalam Gerakan Intifadah

Perjuangan Palestina melawan Israel ini lebih terkenal dengan nama intifadah (perlawanan tanpa kekerasan) yang dimulai pada 8 Desember 1987.¹⁸ Intifadah berasal dari bahasa Arab yang berarti guncangan, sedang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan *uprising*. Istilah ini digunakan untuk menyebut pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Pemicu intifadah adalah peristiwa penabrakan dua mobil yang dikendarai orang Palestina

¹⁸ *Ibid*, hal: 28

oleh tentara Israel pada 8 Desember 1987 didekat sebuah pemukiman Gaza.¹⁹ Dalam tabrakan itu empat orang Palestina meninggal dan sembilan orang luka parah. Sore hari pada tanggal yang sama, sekitar 5.000 pemuda muslim aktifis gerakan ikhwanul muslimin mengadakan iring-iringan mengantar jenazah para syuhada ke kamp Jabaliya di jalur Gaza. Setelah penguburan selesai, warga Palestina menyerang serdadu Israel dengan batu. Tentara Israel tidak mampu menguasai keadaan sehingga bentrokan ini meluas keseluruh daerah jalur Gaza bahkan menjalar ke tepi Barat sungai Yordan.

Inilah hari pertama perlawanan rakyat Palestina dengan batu setelah selama 20 tahun dijajah oleh Israel. Rakyat Palestina seakan menemukan kesempatan untuk membalas perlakuan Israel kepada rakyat Palestina. Perlawanan semesta di kedua daerah penduduk Israel ini kemudian dikenal dengan sebutan intifadah bangsa Palestina. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi munculnya perlawanan masal rakyat Palestina, yaitu :

2.1 Faktor Sosial-Ekonomi

Penderitaan yang dialami rakyat Palestina di wilayah pendudukan akibat tekanan-tekanan Israel. Sejak perang 1967 dan dikuasanya wilayah yang sekarang dikenal sebagai daerah pendudukan, Israel telah menerapkan kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap rakyat Palestina. Sebenarnya kalau ditinjau dari sisi pendapatan perkapita terjadi peningkatan kualitas kehidupan rakyat Palestina. Sebagai gambaran, di Tepi Barat, pendapatan perkapita penduduk Palestina naik dari 300 US Dolar (1967) menjadi 1.400 US Dolar (1987).

¹⁹ *Jawa Pos*, 17-18 Maret 1988

Sedangkan di Jalur Gaza naik dari 100 US dolar (1967) menjadi 1.000 US dolar (1987). Namun jumlah ini tidak sebanding dengan tingkat pendapatan yang diperoleh Israel. Pendapatan perkapita warga Israel sebesar 5.000 US dolar (1987).²⁰ Jelas dalam hal ini terjadi kesenjangan antara warga Palestina dengan Israel. Kesenjangan ini disebabkan Israel menerapkan kebijakan diskriminatif dengan memberikan banyak fasilitas dan keuntungan kepada orang-orang Yahudi.

Di samping itu, sebagian besar warga Palestina hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Misalnya, sekitar 70% penduduk Jalur Gaza tinggal di kamp-kamp pengungsian. Kebijakan yang diskriminatif dan rasionalistis juga terlihat dari perlakuan Israel antara para nelayan Palestina dengan para nelayan Yahudi. Warga Palestina tidak diperbolehkan beroperasi sampai sejauh lima mil dari pantai dan tidak diperbolehkan menjual ikannya ke pasar-pasar di wilayah Israel. Sebaliknya, para nelayan warga Yahudi diberi kebebasan sepenuhnya untuk beroperasi. Kesenjangan sosial tidak terbatas pada hal itu saja, di bidang pendidikan pun terjadi perbedaan perlakuan. Kehidupan akademis mengalami penekanan dan pembatasan. Bahkan tidak jarang pemerintah Israel menutup kampus-kampus di Jalur Gaza dan Tepi Barat.²¹

Hal lain yang membuat kondisi warga Palestina semakin menyedihkan adalah pembangunan pemukiman orang-orang Yahudi di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Di kedua tempat itu jumlah pemukiman orang-orang Yahudi terus

²⁰ *Newsweek*, 25 Januari 1988

²¹ *Arabia* : Islamic World Review, Oktober 1986

meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1984, misalnya jumlah pemukiman Yahudi naik tiga kali lipat, yaitu dari 36 menjadi 100 pemukiman dan jumlah pemukiman bertambah enam kali lipat, yaitu dari 5.000 menjadi 30.000 orang. Untuk memperlancar pembangunan pemukiman, pemerintah Israel bekerjasama dengan organisasi Zionis Dunia (world zionist organization), di mana setiap tahunnya akan dibangun pemukiman yang dapat menampung 10.000 sampai 50.000 pemukim Yahudi. Akan tetapi untuk melaksanakan rencana pembangunan pemukiman tersebut, Israel tidak segan-segan menghancurkan perumahan warga Palestina, terutama di Yerusalem.²²

Kebijakan-kebijakan Israel dengan sendirinya menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan warga Palestina. Para warga Palestina tersebut merasa “dianaktirikan” oleh pemerintah Israel. Sikap pemerintah Israel yang diskriminatif dan rasialistis itu membuat para warga Palestina merasa tidak memiliki masa depan. Akibatnya timbul kebencian yang luar biasa terhadap pemimpin Israel.

Pembangunan bidang industri di wilayah pendudukan mengalami stagnasi. Barang-barang manufaktur yang diproduksi harus bersaing dengan penduduk Israel yang mendapat subsidi kredit dari pemerintah. Penggunaan listrik baik untuk kepentingan keluarga atau industri pun dibatasi. Sebagai gambaran, untuk satu keluarga Palestina akan diberikan separo kilowatt dari yang diberikan kepada satu keluarga Yahudi. Alasannya perbedaan standar hidup dan tingkat kegunaan antara warga Palestina dengan warga Israel.²³ Sektor tenaga kerja mengalami nasib yang sama. Guna menopang kelangsungan hidupnya, banyak warga

²² M.Risa Sihbudi, 1991, (*Bara Timur Tengah*), hal: 78

²³ Don Peretz, 1990, *Intifadah : The Palestinian Uprising*, Westview press, Colorado, Inc., hal:

Palestina yang mencari pekerjaan di wilayah-wilayah Israel. Mereka bekerja di pabrik-pabrik, menjadi buruh bangunan, petani penggarap dan lain-lain.

2.2 Faktor Politik

Buntunya hampir semua langkah militer maupun politik yang ditempuh negara-negara Arab dan PLO dalam mewujudkan negara Palestina merdeka. Kebijakan yang diskriminatif terhadap warga Palestina juga berlaku di bidang Politik. Hak-hak politik yang dimiliki orang-orang Palestina sangat minim, warga Palestina tidak memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan berorganisasi. Pemerintah Israel melarang setiap bentuk pertemuan politik yang diadakan warga Palestina. Memang di bawah kekuasaan Israel, warga Palestina dapat menikmati otonomi kultural dan keagamaan, tetapi tidak dapat menikmati hak-hak politik mereka.²⁴

Selain itu, warga Palestina merasa kecewa terhadap sikap para pemimpin Arab yang “serba tanggung” dalam memperjuangkan nasib orang-orang Palestina. Selama ini para penguasa Arab, baik yang moderat maupun yang radikal, lebih banyak memusatkan perhatian kepada kepentingan nasional dan kelangsungan kekuasaan sendiri dibandingkan memperjuangkan nasib warga Palestina. Sebagai contoh, apa yang telah dicapai Mesir dengan menandatangani Perjanjian Camp David (1979) jika bukan untuk kepentingan Mesir sendiri. Bagi orang-orang Palestina, Camp David tidak bermakna. Negara-negara Arab radikal atau garis keras juga bersikap sama saja. Negara-negara tersebut lebih mementingkan

²⁴ *Newsweek*, 25 Januari 1988

kepentingan nasional negaranya dan sikap anti Israel mereka sebenarnya tidak lebih dari sekedar retorika belaka.

Dalam perkembangan selanjutnya, warga Palestina menyadari hal itu, maka warga Palestina mencoba untuk tidak menggantungkan nasib mereka kepada negara-negara Arab mana pun. Warga Palestina tengah berusaha untuk mengandalkan kekuatan sendiri menghadapi Israel. Tindakan warga Palestina semakin keras bahkan sudah tidak peduli lagi dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh PLO, meskipun PLO masih cukup berpengaruh di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Namun, ketua PLO, Yasser Arafat, berulang kali menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah memberikan instruksi kepada warga Palestina di Israel untuk memberontak.

Bangkitnya keberanian yang luar biasa di kalangan kaum muda Palestina belakangan ini tidak lepas dari makin meluasnya pengaruh semangat keagamaan, yang oleh sementara kalangan disebut pengaruh “fundamentalisme Islam”.²⁵ Pengaruh fundamentalisme Islam cukup kuat terutama di Jalur Gaza dan Tepi Barat, sebagai buktinya telah didirikan sejumlah Taman Kanak-kanak dan mendirikan sebuah college Islam. Indikasi lain dari makin kuatnya pengaruh fundamentalisme Islam adalah makin kuatnya pengaruh kelompok-kelompok, seperti Jihad Islam dan Al-Mujama Al-Islamy di kalangan anak-anak muda Palestina. Al-Mujamam adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pembangunan masjid dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural. Dibandingkan Al-Mujama, kelompok Jihad Islam lebih radikal dan lebih sulit

²⁵ *Time*, 25 Januari 1988



dilacak. Kelompok Jihad Islam tidak jarang melakukan serangan terhadap tentara Israel.

2.3 Konflik Internal dalam Tubuh PLO

Melemahnya sikap politik PLO akibat konflik internal dan pukulan yang dialami organisasi ini baik oleh sesama negara Arab maupun Israel. Kondisi ini membuat PLO lebih suka menerima usulan-usulan negara-negara Arab moderat yang selama ini ditentangnya, yaitu menyelesaikan masalah Palestina dengan cara diplomasi bukan dengan kekuatan senjata.

PLO merupakan suatu organisasi terbesar di Palestina dan satu-satunya wakil sah rakyat Palestina. Dengan status tersebut, PLO dianggap sebagai wadah dari semua organisasi perlawanan Palestina terhadap Israel. Dalam kegiatan operasinya, organisasi-organisasi yang berada di dalam PLO tidak selalu sependapat dengan kebijakan PLO bahkan kadang berontak. Adanya hal itu mengakibatkan dalam tubuh PLO timbul kelompok-kelompok yang mempengaruhi jalan hidup PLO.

Kelompok-kelompok tersebut antara lain, kelompok radikal yang ingin menggunakan kekuatan senjata untuk menyelesaikan masalah Palestina. Kelompok ini terdiri dari organisasi PFLP, PFLP-GC dan Al-Saiqah, yang mendapat dukungan dari negara Suriah. Sedangkan kelompok yang satunya ingin menyelesaikan masalah Palestina dengan cara diplomasi. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Al-Fatah dan PDFLP. PDFLP mendapat dukungan dari kaum komunis Arab dan Uni Soviet sedangkan Al-Fatah mendapat dukungan dari negara-negara Arab moderat, seperti Arab Saudi, Kuwait dan Aljazair.

Walau pun demikian, PLO telah banyak membawa perubahan di kalangan orang Palestina. Meskipun begitu ada beberapa kritik yang dilontarkan terhadap PLO. Sebagian orang Palestina di Tepi Barat, misalnya, menilai PLO kurang pantas melakukan teror terhadap penduduk sipil Yahudi. Hal ini bukan berarti warga Palestina di Tepi Barat menolak perjuangan bersenjata, tetapi teror hendaknya ditujukan kepada militer atau Israel Defense Forces (IDF). Mereka juga menyayangkan dana PLO yang tidak mengalir ke daerah pendudukan yang kurang baik perekonomiannya. Warga Palestina memang mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina, namun setelah sekian lama tidak ada perubahan di daerah pendudukan.

3. Pengaruh Gerakan Intifadah dalam Bidang Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejak meletusnya intifadah, pamor Israel semakin merosot di mata dunia. Hal ini disebabkan tindak kekerasan Israel dalam upaya menghentikan intifadah berada di luar batas-batas kewajaran. Sebuah perlawanan sipil yang hanya bersenjatakan batu, dihadapi dengan peluru. Tidak dapat dipungkiri, meletusnya intifadah menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan politik Israel dan Palestina.

3.1 Pengaruh Ekonomi dan Sosial Gerakan Intifadah

Dalam jangka waktu satu tahun, gerakan intifadah telah menimbulkan pengaruh cukup besar terhadap perekonomian Israel. Menurut laporan Howard Rosen, ada 3 sektor ekonomi yang terpengaruh oleh maraknya intifadah. Ketiga

sektor tersebut adalah pertanian, konstruksi dan pariwisata.²⁶ Selama berlangsung intifadah, para buruh Palestina melancarkan aksi pemogokan kerja terhadap para petani Israel. Aksi pemogokan kerja yang dilancarkan para buruh Palestina ini selain menimbulkan kesulitan bagi Israel juga menimbulkan kesulitan bagi Palestina sendiri. Di pihak Israel, aksi pemogokan kerja ini menimbulkan kalangkaan tenaga kerja kasar yang dapat digaji murah. Sedangkan pihak Palestina merasa kebingungan menerima limpahan tenaga kerja Palestina yang dahulu bekerja di Israel. Aksi pemogokan kerja tersebut mengakibatkan terjadinya penundaan pengangkutan hasil pertanian Israel ke tempat-tempat penyimpanan.

Pengaruh intifadah juga terjadi dalam bidang konstruksi. Bidang konstruksi mengalami kemerosotan cukup tajam karena penopang utama bidang konstruksi adalah tenaga kerja Palestina. Padahal beberapa bulan selama berlangsungnya intifadah, 50% pekerja melancarkan aksi pemogokan. Aksi pemogokan tersebut membuat Israel sulit mendapatkan tenaga kerja pengganti yang sama murahannya dengan pekerja Palestina. Sebelum meletus intifadah ada sekitar 40.000-50.000 orang Palestina bekerja di sektor konstruksi Israel. Dari seluruh pekerja konstruksi tersebut, 70% pekerja berasal dari wilayah Jalur Gaza. Aksi pemogokan itu berdampak pada terbengkalainya proyek-proyek yang dilaksanakan Israel.

Bidang pariwisata merupakan andalan Israel. Di wilayah Israel, termasuk wilayah pendudukan, terdapat tempat suci bagi tiga agama besar, yaitu: Islam, Nasrani dan Yahudi. Tempat-tempat tersebut sangat potensial untuk menarik wisatawan asing. Nilai strategis dari sektor pariwisata adalah pendapatan dari sektor pariwisata ini dapat digunakan untuk membayar utang-utang luar negeri.

²⁶ Howard Rosen, 1991, *Economic Consequences of The Intifadah In Israel And Administered Territories*, (dalam Robert O. Freedman (ed), *The Intifadah: Its Impact On Israel, The Arab World and The Superpower*), Florida Internasional University Press, Miami, Hal : 375-379

Namun adanya instabilitas politik akibat intifadah menyebabkan jumlah wisatawan menurun. Sebagai gambaran pada bulan-bulan awal intifadah jumlah wisatawan dari Amerika dan Jerman turun 15%, dari Prancis 25%, dari Inggris 6%, dan dari negara-negara lain di luar keempat negara tersebut turun 16%.²⁷

3.2 Pengaruh Bidang Politik Gerakan Intifadah

Di bidang politik, kebangkitan rakyat Palestina menentang penguasa pendudukan membuka kedok kepalsuan demokrasi Israel. Dunia dapat menyaksikan kekejaman Israel dalam upaya menghentikan intifadah melalui berbagai media massa. Intifadah yang pada awalnya terjadi di kamp Jabaliya, Jalur Gaza dapat menyebar ke seluruh wilayah pendudukan. Gerakan ini mampu menyatukan rakyat Palestina dari berbagai latar belakang pemikiran dan kelompok. Solidaritas sesama bangsa Palestina bangkit tidak hanya di wilayah pendudukan tetapi juga di wilayah Israel.

Menurut sumber pemerintah Israel selama tahun 1987 terjadi 60 kali aksi teror dan sabotase di dalam wilayah Israel. Dua tahun setelah intifadah terjadi 208 kali insiden di dalam wilayah Israel. Insiden ini terjadi dari 170 kali serangan bom molotov, 20 kali aksi pemboman dan 18 kali aksi penusukan dan serangan bersenjata. Dari serangan-serangan ini 70% sampai dengan 80% dilakukan minoritas Arab yang tinggal di wilayah Israel.

Di dalam negeri Israel terjadi perpecahan serius antara kelompok yang menghendaki penarikan mundur seluruh pasukan Israel dari wilayah pendudukan dan kelompok menginginkan tetap dipertahankannya pasukan Israel. Oleh karena itu, satu-satunya jalan penyelesaian adalah mengembalikan hak-hak rakyat

²⁷ *Ibid*, hal ; 378

Palestina, sebagaimana dikehendaki dalam Resolusi PBB 242 dan diperkuat dengan Resolusi 338. Sementara pihak yang menentang penarikan mundur berpendapat bahwa penyerahan wilayah pendudukan kepada Palestina akan membahayakan eksistensi Israel dan merupakan langkah mundur bagi terwujudnya Israel Raya. Dengan demikian, adanya gerakan intifadah ini dapat menyatukan seluruh warga Palestina, baik yang ada di daerah pendudukan maupun di luar daerah pendudukan. Sementara itu, bagi Israel adanya gerakan intifadah berakibat terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan Israel.

4. Harapan Intifadah

Pada awal intifadah, cita-cita rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan semakin mendekati kenyataan. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, ketua PLO, Yasser Arafat, dalam Kongres Dewan Nasional Palestina (PNC - Parlemen Palestina di pengasingan) di Aljir pada 15 Nopember 1988 telah memproklamasikan kemerdekaan negara Palestina. Wilayah yang diklaim sebagai negara Palestina adalah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, warga Palestina menghendaki negara Palestina beribukota di Yerusalem. Proklamasi ini telah diakui oleh beberapa negara di dunia. Indonesia termasuk salah satu negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina. Wujud pengakuan ini adalah dengan mengizinkan membuka Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada Nopember 1989. Menanggapi proklamasi negara Palestina, Israel tetap tidak bergeming untuk meninggalkan daerah pendudukan²⁸.

²⁸ M.Risa Sihbudi, 1991, (*Bara Timur Tengah*), hal: 230

Sikap Israel tersebut menyebabkan semakin meningkatnya intensitas perjuangan warga Palestina dan warga Palestina semakin anti terhadap Israel. Dengan kondisi yang demikian, ada sebagian kalangan yang pesimis bahwa perdamaian antara Palestina dan Israel akan terwujud. Akan tetapi, ada juga yang optimis bahwa perdamaian akan terwujud mengingat semua yang terlibat dalam pertikaian menginginkan suatu perdamaian. Hal lain yang menyulitkan penyelesaian masalah Palestina adalah terjadinya frakmentasi yang cukup tajam, baik di kalangan elit politik Israel, negara-negara Arab maupun di kalangan orang-orang Palestina sendiri.²⁹

Di kalangan pemimpin Israel, misalnya, dikenal adanya kelompok “moderat” yang diwakili partai Buruh dan diketuai oleh Menteri Luar Negeri Shimon Peres. Kemudian ada kelompok “kanan” yang diwakili oleh Partai Likud dan diketuai oleh PM Yitzhak Shamir dan ada pula kelompok “ultra kanan” yang diwakili oleh Partai Kach yang diketuai oleh Rabbi Meir Kahane. Ketiganya tersebut mempunyai persepsi yang berbeda tentang masa depan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Partai Buruh pada prinsipnya bersedia melepaskan Jalur Gaza dan Tepi Barat demi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, Partai Likud dan Partai Kach justru cenderung untuk mengintegrasikan wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat ke dalam negara Israel.

Frakmentasi yang tidak kalah tajamnya juga terjadi di dunia Arab dan di kalangan Palestina. Para pemimpin Arab dan Palestina yang “radikal” dan berorientasi ke Moskow tidak bersedia berkompromi dengan Israel. Keduanya

²⁹ *Ibid*, hal: 82

tetap berkeinginan “melenyapkan” Israel dengan jalan kekerasan. Di pihak lain, para pemimpin Arab dan Palestina yang “moderat” dan berorientasi ke Washington bersedia dalam batas-batas tertentu mengakui eksistensi Israel dan bersedia berunding dengan Israel. Ditinjau dari aspek percaturan politik tingkat regional, proklamasi kemerdekaan negara Palestina dapat dianggap sebagai batu ujian untuk menggalang solidaritas Arab. Bukti tersebut dapat dilihat dari semakin kompaknya para pemimpin Arab yang dahulu berseteru kemudian saling berdamai. Pemimpin Arab tersebut adalah Hafiz Al-Asad dan Muamar Qadhafi yang bersalaman dengan Raja Hussein dan Housni Mubarak untuk mendukung intifadah bangsa Palestina.

Intifadah mempunyai akibat yang cukup serius bagi Israel karena pergolakan yang telah menelan korban ratusan orang Palestina menimbulkan citra kurang baik bagi Israel. Israel dianggap sebagai negara tidak menghargai hak hidup manusia. Pendapat ini wajar dilontarkan kepada Israel karena sifat kekejaman Israel terhadap orang Palestina dengan tanpa belas kasihan “membantai” anak kecil, wanita dan orang tua. Sikap Israel tersebut mendapat kecaman dari dunia. Berbeda halnya dengan orang Palestina yang mendapat simpati dunia internasional.

Walaupun orang Palestina terus berjuang di daerah pendudukan, tetapi intensitas perjuangannya naik turun. Bahkan sampai menjelang terjadinya Perang Teluk II, perjuangan kemerdekaan negara Palestina terus berlanjut. Meskipun pemberitaan perjuangan tersebut berkurang karena hampir semua media massa di dunia terpusat pada peliputan perang tersebut.

Dari uraian tentang proses pembentukan negara Palestina sebelum Perang Teluk II dapat disimpulkan sebagai berikut :

Palestina pada abad ke 11 SM hanyalah sebuah kerajaan dan negara mana yang pertama kali menduduki tanah ini, baik Arab Islam maupun Arab Yahudi memiliki versi yang berbeda jauh. Berdasarkan sejarah, agama dan kebudayaan inilah Palestina hingga saat ini tetap menjadi masalah yang sulit diselesaikan. Sejak berakhirnya PD I, Palestina diserahkan ke tangan Inggris, sebagai daerah mandat. Tahun 1917 diumumkan Statemen politik tentang Palestina yang disebut “Deklarasi Balfour”, bahwa bangsa Yahudi mendirikan pemukiman di Palestina. Tentu saja rakyat Palestina tidak menerima deklarasi itu, tetapi selanjutnya pada tahun 1948 bangsa Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel. Dengan berdirinya negara Israel, sejak itu pula konflik Arab-Israel pecah (1948, 1956, 1967 dan 1973) yang selalu dinenangkan oleh Israel.

Perjuangan rakyat Palestina tidak surut bahkan semakin keras dan menuntut agar Palestina harus diakui sebagai negara merdeka. Perjuangan mereka dengan cara diplomasi maupun perang. Sejak 1947 masalah Palestina menjadi agenda PBB dan PBB menjadi penengah dalam perdamaian di Timur Tengah. Perjuangan rakyat Palestina dilakukan melalui organisasi dan gerakan-gerakan rakyat lainnya (PFLP, PDFLP, ALF, PLO, Intifadah, Hamas dan Hisbullah). Perjuangan organisasi dan gerakan seperti PLO, Intifadah dan lain-lain membawa pengaruh terhadap perekonomian, sosial, politik di Israel sendiri. Dalam bidang perekonomian dan sosial, gerakan intifadah melumpuhkan aktifitas perekonomian dan kesenjangan sosial dalam masyarakat Israel, khususnya pertanian, konstruksi

dan pariwisata karena pemogokan buruh. Di bidang politik, dengan gerakan intifadah dan organisasi PLO demokrasi yang dijalankan di Israel dinilai sebagai sebuah demokrasi semu.

Perjuangan bangsa Palestina seperti mendapatkan “angin segar” ketika pecah Perang Teluk II. Peralpnya dalam menyelesaikan konflik Teluk Saddam mengaitkan dengan masalah Palestina, suatu masalah antara Palestina dan Israel, yang belum selesai walaupun Palestina sudah “merdeka”. Hal ini disebabkan Israel tidak bersedia mengakui keberadaan PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina.

B. Kondisi Palestina Menjelang Perang Teluk II

Strategi Saddam menggunakan “kartu Palestina” untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Irak dan negara-negara Arab lain sangat tepat. Dukungan terhadap Saddam sangat kuat di daerah pendudukan, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pada awalnya masyarakat Palestina di daerah pendudukan mengecam invasi Irak ke Kuwait karena menurut warga di daerah pendudukan, hal ini tidak ada bedanya dengan “pencaplokan” wilayah Palestina oleh Israel. Saddam menggunakan “kartu Palestina” karena menurut Saddam jika ingin menyelesaikan krisis Teluk secara damai di Timur Tengah harus dilakukan secara komprehensif. Masalah Palestina juga tidak bisa lepas dari penyelesaian krisis Teluk. Dengan kata lain, menurut Irak penggunaan “kartu Palestina” disebabkan sikap PBB dalam melaksanakan resolusi tidak adil, misalnya Israel tidak diambil tindakan setelah beberapa tahun menduduki wilayah Palestina.

Pandangan Irak bahwa Israel sebagai ancaman terhadap Arab dan karena itu soal Palestina juga harus diselesaikan segera. Menurut Irak, Perang Teluk

identik dengan perang kemerdekaan Palestina karena Palestina bagian dari Perang Teluk dan negara Arab. Karena pernyataan tersebut, pada hari-hari berikutnya opini masyarakat Tepi Barat dan Jalur Gaza berubah secara cepat. Bahkan dapat dikatakan bahwa warga tersebut berbalik mendukung keputusan Saddam. Dukungan terhadap Saddam ini berkaitan dengan perjuangan bangsa Palestina untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Israel sejak puluhan tahun lalu.³⁰

Perang Teluk II berawal dari terjadinya invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait pada 2 Agustus 1990 yang berkembang menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat. Dalam krisis Teluk ini, Saddam berhasil tampil sebagai “pejuang pembela rakyat Palestina” untuk memperoleh kemerdekaan negara Palestina secara menyeluruh. Bangsa Palestina yang selama ini merasa kecewa terhadap tingkah laku negara-negara Arab yang hanya memanfaatkan masalah Palestina sebagai alat untuk mempertahankan kalangsungan kekuasaannya, seolah-olah menemukan “tokoh Idola” baru pada diri Saddam. Apalagi setelah melihat kenyataan bahwa yang dihadapi Saddam adalah Amerika yang tidak lain sekutu terpenting Israel, musuh bebuyutan Palestina.³¹

Perjuangan bangsa Palestina di daerah pendudukan mengalami pasang surut. Warga Palestina tetap berjuang hanya intensitas perjuangannya tidak stabil. Akan tetapi ini tidak berarti masyarakat Palestina di daerah pendudukan menghentikan kegiatan perjuangannya. Menjelang krisis Teluk dukungan warga Palestina terhadap Irak semakin meningkat. Dukungan Palestina terhadap Irak tidak terlepas dari sejumlah faktor lain, *pertama*, ketergantungan Palestina kepada Irak karena hampir 170.000 warga Palestina tinggal di Irak. *Kedua*, kegagalan

³⁰ M.Risa Sihbudi, 1993, (*Konflik Timur Tengah*), hal: 32

³¹ M.Risa Sihbudi, 1991, (*Bara Timur Tengah*), hal: 176

proses perdamaian melalui jalur diplomatik dan kelangkaan dukungan internasional. *Ketiga*, perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh bekas penguasa Kuwait terhadap sekitar 400.000 warga Palestina yang tinggal di Kuwait dan *keempat*, desakan opini publik Palestina di daerah pendudukan, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dukungan Palestina terhadap Irak semakin meluas setelah Irak berhasil memanfaatkan momentum yang tepat, yaitu dengan menuntut penarikan mundur pasukan Israel dari daerah pendudukan, Tepi Barat dan Jalur Gaza, sebagai prasyarat mundurnya Irak dari Kuwait³².

Pecahnya Perang Teluk II semakin meningkatkan semangat gerakan Intifadah warga Palestina di daerah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sebelum pecah krisis Teluk yang berkembang menjadi Perang Teluk, perlawanan warga Palestina terhadap Israel tampak menurun. Akan tetapi, setelah Perang Teluk II berlangsung, semangat gerakan intifadah melawan Israel kembali berkobar. Bagi warga Palestina, krisis Teluk merupakan momentum paling tepat untuk kembali bangkit berjuang melawan penguasa Israel. Dukungan Palestina terhadap Irak mendapat reaksi keras dari pihak Israel. Sebuah negara yang telah menduduki wilayah Palestina sejak puluhan tahun lalu merasa berkepentingan apabila ada masyarakat Palestina yang ingin memerdekakan diri dan mendukung negara yang mamusuhi Israel.

Telah diuraikan di atas bahwa dalam pemerintahan Israel sendiri terdapat dua sikap dasar terhadap Palestina. Pertama, ada kelompok yang tidak menghendaki Negara Palestina merdeka yang didukung oleh Partai Likud disebut dengan kelompok kanan. Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa dalam

³² *Ibid*, hal: 176

batas-batas tertentu Tepi Barat akan dilepaskan yang didukung oleh Partai Buruh yang disebut sebagai kelompok kiri.

Akan tetapi setelah Palestina mendukung Irak dalam krisis Teluk, dukungan kelompok kiri Israel terhadap Palestina menyulitkan posisi kelompok kiri Israel sendiri. Sebelum pecah Perang Teluk, kelompok kiri secara terselubung telah mengadakan kontak dengan PLO untuk membicarakan masalah daerah pendudukan. Setelah pecah krisis Teluk dan Palestina mendukung Irak, dukungan kelompok kiri Israel “dibatalkan”. Pernyataan tersebut seperti ditulis oleh Yossi Sarid, salah seorang anggota *knesset* (parlemen Israel) sebagai berikut “kalau saya mendukung berdirinya Negara Palestina, hanya karena orang Palestina membutuhkan sebuah negara, sekarang saya mencabut dukungan saya”.³³

Keterlibatan masyarakat Palestina yang sedang berintifadah dan keterlibatan PLO yang sudah memproklamasikan Negara Palestina dalam Perang Teluk menyebabkan Palestina memasuki suatu fase dilematis. Di satu sisi, Palestina membutuhkan dukungan ekonomi dari negara-negara Teluk yang kaya. Untuk membiayai intifadah, Palestina mendapat bantuan dana dari negara Teluk, akan tetapi, posisi Palestina yang agak condong ke arah Irak dalam Perang Teluk II, menyulitkan dukungan ekonomi tersebut. Arafat mulai merasakan dampak dukungannya terhadap Saddam, yaitu dihentikannya bantuan finansial dari negara Teluk yang mencapai 120 juta dolar US per tahun. Negara Teluk yang dengan tegas menghentikan bantuan kepada Palestina adalah Arab Saudi. Arab Saudi

³³ M. Risa Sihbudi, dkk., 1993, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung : PT Eresco, hal : 33

memotong bantuannya kepada Palestina bahkan menghapuskan seluruh komitmen yang telah dibuat sebelumnya.³⁴

Di sisi lain, Palestina membutuhkan dukungan politik dari seluruh negara yang masih menghargai hak asasi manusia. Dukungan politik ini terutama diharapkan dari negara-negara Arab yang secara kultural dekat dengan Palestina. Akan tetapi, dalam kenyataannya dukungan itu tidak didapatkan dari negara-negara Arab kecuali Suriah yang masih mempertahankan sikap kerasnya terhadap Israel. Sikap negara-negara Arab tersebut dipengaruhi oleh karena posisi Palestina yang agak condong ke Irak dalam Perang Teluk II.

Dari uraian tentang kondisi Palestina menjelang Perang Teluk II dapat disimpulkan sebagai berikut : dengan menggunakan “kartu Palestina” berarti di satu pihak posisi Palestina berada pada pihak yang menguntungkan karena Perang Teluk II identik dengan perang pembebasan Palestina. Secara politis kemenangan berada di pihak Palestina karena dengan Perang Teluk II itu banyak upaya proses perdamaian menuju ke arah tuntutan pembentukan negara Palestina merdeka. Di lain pihak timbul prokontra antara negara Arab. Ada negara Arab yang mendukung tindakan Irak dan ada juga yang tidak simpati dengan tindakan Irak. Sedang Palestina lebih menunjukkan sikap pro Irak. Hal ini menimbulkan Palestina berada pada posisi yang dirugikan karena tidak mendapat bantuan, misalnya bantuan finansial dari negara Arab yang selama ini membantu Palestina.

³⁴ Setelah Perang Teluk selesai, Arab Saudi tidak bersedia lagi memberikan bantuan kepada Palestina. Bahkan Arab Saudi mempertimbangkan untuk mencari pemimpin baru Palestina untuk menggantikan Yaseer Arafat.

BAB III

PERANG TELUK II

A. Latar Belakang

Setiap bangsa dan negara berhak untuk hidup dengan aman, damai dan sejahtera. Oleh karena itu, sah bagi setiap bangsa dan negara untuk mempertahankan diri terhadap serangan dari pihak luar dan mengupayakan keamanan negeri serta rakyatnya. Cara yang digunakan tentu tanpa membahayakan keamanan dan kesejahteraan bangsa lain. Sebelum Perang Teluk II, hubungan Irak-Kuwait pada tahun 1980-an sebenarnya cukup harmonis. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Kuwait terhadap Irak selama perang Irak-Iran berlangsung. Namun awal tahun 1990, hubungan kedua negara menjadi renggang ketika Irak melakukan invasi ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Pada waktu itu dalam jangka waktu yang tidak lama, Irak berhasil melumpuhkan dan menduduki wilayah Kuwait. Oleh karena itu, dunia internasional terkejut ketika pasukan Irak menyerbu dan menduduki Kuwait.

Pendudukan terhadap Kuwait sebenarnya Saddam ingin menunjukkan kepada negara lain di dunia bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak. Saddam juga ingin membuktikan bahwa dia sebagai pemersatu Arab dan pemimpin bangsa Arab. Hal lain yang menyebabkan invasi dan aneksasi Irak ke Kuwait adalah krisis ekonomi. Menurut Saddam turunnya harga minyak di pasaran internasional merupakan salah satu faktor penyebab krisis ekonomi di Irak. Harga minyak di pasaran internasional rendah disebabkan Kuwait memproduksi minyak tidak sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh OPEC. Saddam juga menuduh Kuwait

mencuri minyak selama perang Irak-Iran. Tuduhan ini sebagai alasan untuk menduduki Kuwait.

B. Proses Perang Teluk II

Perang Teluk II ini terjadi sebenarnya Irak menunjukkan kepada dunia bahwa ada kekuatan lain di dunia yang berani menentang kekuatan adidaya Amerika Serikat. Konflik Irak-Kuwait yang berkembang menjadi konflik Irak-Amerika Serikat dan sekutunya berawal dari pidato Presiden Saddam Hussein pada tanggal 17 Juli 1990¹. Dalam pidato tersebut Saddam mengecam Kuwait bahwa selama perang melawan Iran, Kuwait telah mencuri minyak sebesar 2,4 miliar dollar AS di wilayah ladang minyak Rumaila, di perbatasan antara Irak-Kuwait.

Saddam Hussein menuduh Kuwait, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab sebagai biang kedok turunnya harga minyak di pasaran internasional dengan memproduksi minyak tidak sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Organization of Petroleum Exportir Countries, organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC). Tuduhan sekaligus ancaman Saddam direalisasikan dengan mengirimkan pasukan militer Irak ke arah jalan raya antara Basra-Kuwait. Sikap Saddam ini menimbulkan reaksi dari negara-negara Arab lainnya Arab Saudi, Kuwait, Oman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini pada masa perang Irak-Iran mendukung dan memberi bantuan kepada Irak.

Konflik antara Irak-Kuwait sebenarnya tidak perlu terjadi apabila antara Irak dan Kuwait bersedia menerima perundingan damai yang diprakarsai oleh

¹ Sutarno, dkk., 1991, *Perang Teluk Malapetka Dunia*, Media Interaksi Utama dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : ha. 12.

para pemimpin negara-negara Arab lainnya. Perundingan damai diusulkan oleh Raja Fahd dari Arab Saudi dan Presiden Housni Mubarak dari Mesir. Raja Fahd dan Presiden Housni Mubarak adalah kepala-kepala negara Arab pertama yang merasa perlu bertindak mendamaikan pertikaian antara Irak dengan Kuwait. Raja Fahd segera mengirim utusan khusus untuk menemui Presiden Saddam Husein dan Emir Kuwait. Presiden Housni Mubarak juga mengirim utusan ke Irak meminta kepada Saddam agar tidak menggunakan kekerasan militer dalam sengketa “sesama saudara” tersebut. Usul damai juga datang dari Sekretaris Jenderal Liga Arab, Chadli Kibli, yang mengusulkan penyelesaian masalah antara kedua negara secara damai tanpa kekerasan senjata.² Tujuan perundingan damai itu untuk memelihara persatuan diantara negara-negara Arab, tetapi usulan damai itu tidak mencapai titik temu sehingga meletuslah Perang Teluk II.

Campur tangan pihak luar seperti PBB dan Amerika Serikat pun tidak bisa mengambil hati Presiden Irak Saddam Hussein untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Nopember 1990 mengeluarkan 12 Resolusi antara lain mendesak agar Irak menarik mundur pasukan dari Kuwait dan embargo ekonomi terhadap Irak. Desakan yang datang baik dari negara-negara Arab maupun PBB dan Amerika Serikat tidak dihiraukan Irak. Usaha terakhir dengan suatu perundingan di Jenewa tanggal 9 Januari 1991 antara Menlu AS dengan Menlu Irak. Perundingan inipun tidak ada hasilnya karena Irak dan AS hanya menjelaskan pendirian negaranya masing-masing. Jalan terakhir adalah perang.

² *Ibid.* hal: 16

1. Faktor-faktor Penyebab Perang Teluk II

Invasi Irak yang dilancarkan tanggal 2 Agustus 1990 ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yaitu faktor intern dan ekstern.

a. Faktor Intern

Pertama, faktor historis, dalam hal ini menurut Saddam berdasarkan hak sejarah Kuwait termasuk wilayah Irak. Saddam mengklaim wilayah tersebut karena Kuwait termasuk dalam *vilayet* atau propinsi Basrah. Secara geografis, letak Kuwait masa penjajahan dulu memang termasuk wilayah Irak. Klaim terhadap Kuwait ini pernah dilancarkan Irak sebelumnya oleh Abdul Karim Kassim (Perdana Menteri Irak) pada tanggal 25 Juni 1961. Dengan alasan historis itu Saddam berusaha mengembalikan wilayah Kuwait kepangkuan Irak. Untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut, Saddam melancarkan invasi ke wilayah Kuwait. Invasi ke Kuwait ini dianggap sebagai kewajiban Irak dalam mempersatukan wilayahnya. Namun dunia internasional menentang semua itu dan invasi Irak justru dianggap sebagai sarana pemenuhan ambisinya.³

Kedua, faktor ekonomi merupakan faktor pemicu terjadinya invasi. Sebagaimana diketahui pada awal tahun 1990 terjadi pertentangan yang cukup tajam antara Irak dengan Kuwait, UEA dan negara Teluk pengeksport minyak lainnya mengenai kebijakan produksi minyak. Di satu pihak, Irak menginginkan agar negara-negara Teluk mengurangi produksinya untuk meningkatkan harga. Hal ini dilakukan Irak mengingat keberadaan

³ Ibid. hal. 9

ekonomi Irak yang morat marit akibat Perang Irak–Iran memerlukan perbaikan secepatnya. Padahal Irak sangat menggantungkan perbaikan ekonominya dari penjualan minyaknya. Sementara itu negara Teluk lainnya terutama Kuwait, UEA dan Saudi Arabia justru bertindak sebaliknya. Pada bulan Februari 1990, ketiga negara tersebut memproduksi 1,6 juta barel per hari di atas kuota. Akibatnya harga minyak merosot hanya berkisar 19 dolar AS per barel.

Ketiga, faktor politik, politik merupakan wadah aplikasi kekuasaan, seperti yang diungkapkan oleh Deliar Noer, pada dasarnya faktor politik ini terbagi menjadi beberapa hal, yaitu ambisi Saddam untuk menjadi pemimpin dunia Arab, rapuhnya basis kekuasaan Saddam dan faktor politik global. Ambisi Saddam untuk menjadi pemimpin dunia Arab merupakan faktor yang paling dominan dalam konteks politik. Usaha untuk mewujudkan ambisi ini Saddam menggunakan *strategi to make possible what seems impossible*. Saddam yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nebuchadnezzar ingin mengembalkan kemegahan Babilonia masa Nebuchadnezzar, raja Mesopotamia yang pernah menguasai Babilonia (605-562 SM)⁴.

Saddam tampaknya ingin mengikuti jejak “moyangnya” yang berhasil mendominasi kawasan Timur Tengah, sehingga dapat dimengerti apabila Saddam tidak senang dengan keberhasilan Presiden Mesir, Housni Mubarak, yang berusaha tampil sebagai pemimpin dunia Arab. Housni Mubarak, sampai sebelum invasi Irak ke Kuwait, telah tampil sebagai satu-satunya pemimpin

⁴ M. Riza Sihbudi, 1991, *Islam, Dunia Arab, Iran, Bara Timur Tengah*, Misan, Bandung : 152.

Arab yang mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam pertikaian di Timur Tengah.

Keempat, faktor psikologis Saddam, rapuhnya basis kekuasaan Saddam juga mempengaruhi kestabilan pemerintahannya. Oleh karena itu, Saddam hanya menyandarkan basis kekuasaannya pada kekuatan koersif, yaitu menekan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh dengan kekuatan militer dan intelejennya. Solusi yang dilakukan Saddam untuk mengatasi pergolakan di dalam negeri adalah dengan mencari-cari musuh bersama untuk menjalin persatuan bangsa Irak. Dengan demikian, Saddam berharap seluruh rakyat Irak akan selalu berada dibelakangnya. Politik mencari musuh ini dipakai oleh para penguasa yang tidak yakin pada kekuatan basis kekuasaannya sendiri.⁵ Salah satu bukti bahwa rapuhnya basis kekuasaan Saddam adalah adanya tiga organisasi oposisi dari kaum Syiah, yaitu gerakan Al-Dahwah, Al-Mujahidin dan Dewan Revolusi Islam Irak yang melancarkan perlawanan terhadap rezim partai Baath (partai Saddam). Selain itu adanya perlawanan dari minoritas Kurdi dan kaum Muslim fundamentalis Irak. Jadi secara politis, basis kekuasaan Saddam sebenarnya tidak cukup kokoh.

b. Faktor Ekstern

Pertama, faktor politik global yaitu masalah Palestina yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Dengan invasi Irak ke Kuwait, Saddam seakan-akan ingin membuka mata dunia internasional bahwa ada satu bangsa yang belum mendapatkan haknya sama sekali. Hak yang semestinya diperoleh bangsa

⁵ *Tempo*, 8 Agustus 1992, hal: 99

Palestina sesuai dengan Resolusi PBB tanggal 29 November 1947 No.181 yang isinya bahwa di Palestina akan berdiri dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Oleh karena itu, dengan cara menyerbu Kuwait, Saddam mengklaim dirinya sebagai “pembela perjuangan bangsa Palestina”.

Kedua, intervensi pihak luar (PBB dan Amerika Serikat) dalam menyelesaikan masalah di Kawasan Timur Tengah terutama pada waktu invasi Irak ke Kuwait. Pandangan Saddam bahwa Amerika selama ini menerapkan kebijakan yang tidak adil terhadap penyelesaian masalah di Kawasan Timur Tengah. Misalnya, Amerika Serikat menghendaki agar kekerasan/konflik di kawasan ini diselesaikan dengan cara damai di satu pihak, sedang kekerasan yang dibuat oleh Israel dibiarkan berlarut-larut di pihak lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan kecaman lewat resolusi seperti mengerahkan pasukan multinasional, melakukan embargo ekonomi terhadap Irak. Kedua faktor tersebut diatas baik intern maupun ekstern yang menyebabkan Perang Teluk II meletus.

Pecahnya Perang Teluk II sebenarnya dapat dihindari seandainya presiden Irak, Saddam Hussein, bersedia menerima usulan lima pasal yang disampaikan oleh Sekjen PBB, Perez de Cueller. Lima pasal perdamaian tersebut adalah *pertama*, adanya jaminan bahwa Irak tidak akan diserang; *kedua*, kehadiran pasukan pengamat PBB untuk memantau penarikan pasukan Irak dari Kuwait; *ketiga*, dibentuk pasukan pemelihara perdamaian setelah penarikan tersebut; *keempat*, diadakan konferensi internasional mengenai Timur Tengah termasuk masalah Palestina setelah penarikan dan *kelima*, adanya jaminan bahwa pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat akan ditarik dari kawasan Teluk. Akan

tetapi suatu kejadian tidak bisa diselesaikan dengan “seandainya” bahkan Perang Teluk telah terjadi dan menelan banyak korban dikedua belah pihak⁶.

Perang Teluk II ini akibat adanya Resolusi DK PBB yang mengizinkan pasukan multinasional menggunakan cara apapun untuk mengusir Irak dari Kuwait setelah tanggal 15 Januari 1991. Sejak terjadi krisis Teluk sampai terjadinya Perang Teluk, DK PBB telah mengeluarkan 12 resolusi, mulai dari kecaman, pengerahan pasukan multinasional, blokade ekonomi sampai persetujuan penggunaan militer.⁷ Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB antara lain: resolusi no. 660/1990 isinya mengutuk serbuan Irak terhadap Kuwait dan menuntut negara tersebut untuk menarik pasukannya dari Kuwait; resolusi no. 661/1990 isinya menggunakan sanksi ekonomi terhadap Irak karena belum mematuhi resolusi yang pertama; resolusi 662/1990 isinya menyatakan aneksasi Irak terhadap Kuwait tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional; resolusi no.664/1990 isinya menuntut Irak segera mengizinkan warga asing keluar dari Irak dan Kuwait dengan aman⁸.

Tidak hanya itu, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi no. 665/1990 yang isinya memberikan hak dan keleluasaan kepada negara-negara anggota PBB untuk mencegah keluar masuk kapal Irak dalam rangka boikot ekonomi; resolusi no. 678/1990 yang menetapkan tanggal 15 Januari 1991 sebagai deadline bagi penarikan mundur pasukan dari Kuwait dan jika tidak, Irak akan berhadapan dengan segala cara yang “diperlukan” termasuk kekuatan militer.

Dalam situasi yang demikian rawan dan eksplosif itulah tiba-tiba Saddam di Baghdad mengajukan inisiatif perdamaian. Saddam menyatakan bahwa tentara Irak akan ditarik mundur dari Kuwait dengan syarat, yaitu *pertama*, Syria menarik pasukannya dari Lebanon; *kedua*, Amerika Serikat menarik pasukan dan

⁶ M.Risa Sihbudi, 1993, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung, PT. Eresco, hal: 23

⁷ The Gulf Crisis: Nations of The World Take a Stand, US Information Agency, Desember 1990

⁸ *Opcit*, hal: 23

persenjataan dari kawasan Timur Tengah; *ketiga*, Israel menarik pasukannya dari wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dua wilayah Arab Palestina yang masih diduduki Israel dan keempat sanksi ekonomi oleh DK PBB terhadap Irak dicabut.⁹ Inilah taktik lihai Saddam untuk mengalihkan titik api persoalan dari dianeksasinya Kuwait oleh Irak ke persoalan Palestina. Usulan damai yang diserukan oleh Saddam menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro tentu saja berasal dari negara-negara yang mendukung Irak, yaitu Yaman, Tepi Barat dan Jalur Gaza dan pihak yang kontra berasal dari negara-negara yang tergabung dalam pasukan multinasional. Sedangkan opini dunia internasional pada umumnya mengecam Saddam dan menuntut Irak agar keluar dari Kuwait dengan segera dan tanpa syarat.

Seperti telah diketahui bahwa konflik Irak-Kuwait berkembang menjadi konflik Irak- Amerika Serikat dan sekutunya. Menanggapi usulan damai Saddam, maka pada 9 Januari 1991 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker dan Menteri Luar Negeri Irak, Tareq Aziz, mengadakan pertemuan di Jenewa. Kedua belah pihak diharapkan membahas kemungkinan pengunduran Irak dari Kuwait secara damai. Dalam pertemuan ini Tareq Aziz telah diberi mandat bahwa tanpa membicarakan nasib bangsa Palestina tidak setapak pun bumi Kuwait akan diserahkan. Sebaliknya James Baker hanya diberi kuasa untuk membicarakan masalah penarikan pasukan Irak dari Kuwait. Perbedaan-perbedaan pendirian yang muncul dari pihak Amerika dan Irak mengakibatkan pertemuan gagal untuk mencapai suatu terobosan baru dalam menyelesaikan krisis Teluk. Kegagalan perundingan antara James Baker dan Tareq Aziz tersebut menandakan bahwa krisis Teluk telah mencapai tingkat yang sangat membahayakan.

⁹ *Tempo*, 18 Agustus 1990, hal: 34

Perang sudah diambang pintu dan harapan satu-satunya tinggal bagaimana hasil pertemuan tanggal 12 Januari 1991 antara Sekjen PBB, Perez de Cuellar dengan Saddam Husein. Pertemuan ini pun mengalami kegagalan karena Saddam tetap pada pendiriannya bahwa penarikan pasukan Irak dari Kuwait harus berkaitan dengan masalah Palestina, yaitu penarikan mundur Israel dari daerah pendudukan. Kegagalan pendekatan yang dilakukan oleh Sekjen PBB tersebut menyebabkan tidak ada spekulasi lain untuk menyelesaikan krisis Teluk kecuali perang. Dan memang meletuslah perang Teluk yang melibatkan berbagai pihak. Perang antara Irak dengan pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat ini dikenal dengan sebutan Perang Teluk II. Sebutan Perang Teluk II ini untuk membedakan Perang Teluk I, yaitu Perang Irak-Iran yang terjadi antara tahun 1980-1988.

Perang Teluk II ini ternyata membawa akibat yang buruk bagi dunia Arab karena terjadi perpecahan dunia Arab.¹⁰ Maksudnya, dalam menghadapi krisis Teluk ini, 21 negara Arab terpecah menjadi dua kelompok. Di satu pihak, 12 negara menentang pendudukan Irak atas Kuwait dan mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang memutuskan embargo ekonomi terhadap Irak. Keduabelas negara tersebut juga mendukung usaha Amerika untuk mengeluarkan Irak dari Kuwait. Negara tersebut adalah Mesir, Syria, Maroko, Lebanon, Djibauti, Somalia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Arab Saudi dan sudah tentu Kuwait sendiri. Di pihak lain, 8 negara Arab lain secara terselubung ataupun

¹⁰ Amien Rais, 1990, *Timur Tengah dan Krisis Teluk*, Amarpress, Surabaya, hal: 123

terang terangan membela Irak. Negara tersebut adalah Yordania, Yaman, Sudan, Mauritania, Tunisia, Aljazair, Lybia dan PLO (Palestina).

Ketidakkompakan negara Arab dalam menyelesaikan Perang Teluk ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar terutama diderita oleh negara Irak dan Kuwait. Kedua negara tersebut menjadi ajang pertikaian yang memporak porandakan sumber kehidupan yang vital, yaitu hancurnya kilang-kilang minyak dan yang lebih parah adalah hancurnya generasi penerus Arab¹¹. Dengan kata lain perang tersebut selain menghancurkan negara juga menghancurkan rakyat sesama Muslim. Akan dijadikan apa negara ini nantinya bila sesama “saudara” saling bertikai. Masalah tersebut tidak dipedulikan oleh para pemimpin Arab yang sedang bertikai. Kalau bangsa Arab yang sudah merdeka tidak menghargai dirinya sendiri lalu bagaimana dengan bangsa Palestina yang sedang memperjuangkan keberadaan bangsanya. Padahal selama ini bangsa Palestina banyak dibantu oleh negara-negara Arab untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

2. Akibat Perang Teluk II

Perang Teluk II yang berlangsung selama 42 hari tidak berhasil mengatasi persoalan, seperti Palestina-Israel, juga menimbulkan akibat buruk bagi pihak yang terlibat perang. Akibat yang paling menonjol dalam Perang Teluk II :

Bagi Irak, di bidang ekonomi, berkurangnya anggaran pemerintah menimbulkan masalah sosial-ekonomi yang lebih serius yang berkaitan dengan sektor lapangan kerja, perumahan dan pendidikan. Perang Teluk II memporak-

¹¹ M.Risa Sihbudi, 1993(*Konflik Timur Tengah*), hal: 25

porandakan sumber kehidupan yang sangat vital. Pemerintah Irak tidak mempunyai dana cadangan yang cukup kuat untuk membiayai pembangunan sendiri. Dengan adanya embargo ekonomi dari PBB menimbulkan kemiskinan merajalela dalam masyarakat Irak¹². Di Irak terjadi kemelut politik dalam negeri baik dari aliran-aliran agama maupun politisi disekeliling Saddam Hussein. Ketidaksetabilan politik ini berakibat munculnya pemberontakan dari golongan Syiah yang disebabkan kemiskinan yang merajalela di masyarakat.

Bagi Arab, secara politis Perang Teluk II itu telah mempertajam polarisasi di dunia Arab, yaitu kelompok Arab moderat yang mempertahankan status quo peta politik di kawasan itu, yang dimotori oleh rezim monarkhi kaya minyak, para sekutu mereka yang dari segi ekonomi-politik-militer sangat tergantung pada Barat/Amerika. Kelompok lain, yaitu reformis, kelompok yang menginginkan perubahan atau kelompok Arab radikal yang dimotori oleh rezim Pan-Arabisme. Pihak negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, UEA, Mesir dan Syria mengusulkan tentang perdamaian Timur Tengah¹³

Bagi Kuwait, selain hancurnya kilang-kilang minyak, parlemen hasil pemilu 1985/1986 diaktifkan kembali, masyarakat menuntut agar melaksanakan pemerintahan secara demokratis. Segi keamanan menjadi prioritas di Kuwait untuk mengantisipasi balas dendam dari warga Kuwait terhadap warga Palestina di Kuwait yang mendukung Irak selama Perang Teluk II¹⁴

Bagi masyarakat Arab Palestina secara politis nasib perjuangan bangsa Palestina semakin sulit dan tidak pasti. Padahal Palestina menghendaki perubahan

¹² Sutarno, 1991, *Perang Teluk Malapetaka Dunia*, Media Interaksi Utama dan Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, hal : 214.

¹³ *Ibid*, hal.221-222.

¹⁴ *Ibid*, hal: 215.



sistem politik dan bentuk negara. Perubahan sistem politik artinya Palestina segera diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sebenarnya Perang Teluk II itu Palestina dapat dianggap sebagai “pemenang” karena kesediaan Israel untuk memberikan tanah air merdeka bagi bangsa Palestina dan dukungan internasional untuk Palestina merdeka. Dilihat dari sektor ekonomisnya, warga Palestina kekurangan finansial karena beberapa negara Arab menghentikan bantuan finansial. Warga Palestina yang berada di Irak kehilangan lapangan kerja, perumahan, mengalami penderitaan karena memburuknya ekonomi Irak.

Bagi Yordania, kedatangan pengungsi dari Irak memperberat perekonomian Yordania yang sebelumnya sudah menderita karena adanya potongan pasokan minyak dari Arab Saudi. Akibat dukungan Yordania kepada Irak, Yordania tidak mendapatkan lagi subsidi dari negara-negara Teluk yang berjumlah 300 juta dolar pertahun.¹⁵ Bagi Arab Saudi, dengan meletusnya Perang Teluk II Arab Saudi menarik kembali subsidi minyak dari negara yang mendukung negara Irak.

Bagi PBB, sikap PBB terhadap Irak tetap keras dalam hal embargo ekonomi, PBB tidak mencabut resolusi yang dikeluarkan sejak November 1990 sampai sekarang (April 2000). Perserikatan Bangsa Bangsa tetap mengawasi zona penerbangan bagi Irak. Hubungan Irak-PBB kurang harmonis karena Irak tidak melaksanakan resolusi, artinya tidak menghargai PBB sebagai organisasi dunia.

Bagi Amerika Serikat, hubungan Amerika Serikat-Irak tidak harmonis juga. Indikasi ketidakharmonisan Amerika-Irak dilihat dari tekanan-tekanan Amerika melalui PBB supaya tidak mencabut resolusi tentang embargo ekonomi, mengirimkan militer ke Timur Tengah untuk mengawasi zona penerbangan Irak.

¹⁵ *Ibid*, hal: 25

Segi ekonomi, Amerika tetap mendapat keuntungan karena sumber minyak di kawasan Teluk tidak dikuasai Irak. Hubungan Amerika dan negara-negara lainnya semakin kuat untuk menghadapi politik Saddam (Irak).

Akibat Perang Teluk II bagi pertumbuhan perekonomian dunia, khususnya harga minyak mengalami penurunan dari di atas 30 dolar AS menjadi sekitar 20 dolar AS per barel. Sebenarnya ada tiga hal yang dipecahkan sesudah Perang Teluk II oleh negara-negara yang terlibat perang, baik secara fisik maupun politis, yaitu penyelesaian masalah Palestina mengenai hak bangsa Palestina untuk menentukan pemerintahan sendiri; jaminan pengakuan Israel atas wilayah di kawasan Timur Tengah dan jaminan keamanan di wilayah Teluk bukan dari negara-negara asing melainkan negara Arab sendiri.¹⁶ Dampak lain adalah Palestina-Israel mulai membuka perundingan damai yang menjadi mediator adalah Amerika Serikat, walaupun sampai sekarang belum tahu status final Palestina.

C. Hubungan Perang Teluk II Dengan Pembentukan Negara Palestina

Konflik antara Irak dan Kuwait yang berawal dari pidato Saddam Husein pada tanggal 17 Juli 1990 tentang tuduhan Irak terhadap Kuwait dan UEA mengenai pelanggaran kuota OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan UEA yang mengakibatkan turunnya harga minyak dunia, berkembang menjadi konflik Irak-

¹⁶ *Ibid*, hal. 223

Amerika dan akhirnya meletus perang yang terkenal dengan sebutan Perang Teluk II. Perang Teluk II ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika masing-masing pihak yang sedang bertikai bersedia menahan diri untuk dapat mencapai perdamaian. Perdamaian yang sangat dinantikan oleh banyak bangsa ini ternyata tidak terwujud karena masing-masing pihak yang bertikai sama keras pendiriannya. Pihak Irak bersedia berunding apabila dalam perundingan tersebut juga membicarakan masalah Palestina. Sedangkan pihak Amerika, perundingan tersebut hanya membahas tentang penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait dengan segera dan tanpa syarat.

Pihak DK PBB telah memberikan batas waktu penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait tanggal 15 Januari 1991. Akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, Irak tidak juga menarik pasukannya dari Kuwait. Hal inilah yang mendorong DK PBB mengizinkan pasukan multinasional menggunakan cara apa pun untuk mengusir Irak dari Kuwait.

Setelah mendapat izin dari DK PBB, pasukan multinasional disiagakan di sekitar wilayah Kuwait. Kendati Amerika bersama dengan koalisinya memperlihatkan supremasi teknologi militer yang serba canggih, namun Irak tidak patah semangat. Hal ini dikarenakan Saddam telah memiliki “senjata “ ampuh untuk menghadapi Amerika dan sekutunya. Senjata ampuh Saddam untuk menghadapi Amerika dan sekutunya dan untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya serta negara-negara Arab lain adalah dengan semangat spiritual sakral dan penggunaan “kartu Palestina”. Propaganda Saddam ini bukannya tanpa

dukungan malah sebaliknya di jalan-jalan raya di Yordania, Tepi Barat dan Jalur Gaza, Yaman dan Aljazair dan negara-negara Arab yang lain melakukan demonstrasi mendukung langkah Saddam dan memuji Saddam sebagai pahlawan Arab. Selain itu, negara-negara Arab tersebut juga memuji Saddam sebagai pejuang Islam dan membela bangsa Palestina. Saddam digambarkan sebagai Sultan Saladin, pahlawan Islam semasa Perang Salib di Timur Tengah dahulu, yang menentang para penyerbu Kristen dari Eropa.

Pernyataan Saddam yang mengaitkan penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait dengan penarikan mundur Israel dari daerah Palestina telah membangkitkan kembali semangat nasionalis masyarakat Palestina berarti pula membangkitkan semangat anti-Israel. Pemimpin PLO, Yasser Arafat, mendukung usul Saddam bahwa tidak ada perdamaian di kawasan Timur Tengah tanpa penyelesaian Palestina secara menyeluruh. Pada dasarnya dikaitkannya Perang Teluk dengan masalah Palestina oleh Saddam merupakan alasan yang cedik dan tepat untuk menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk membenarkan tindakan penganeksasian Kuwait ke dalam wilayah Irak.

Dukungan Arafat kepada Irak disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu: faktor politik, sama-sama negara Arab¹⁷. Kelihaihan Saddam menggunakan kartu Palestina untuk mendapatkan dukungan negara-negara Arab mulai menampakkan hasil. Masyarakat Palestina yang mulai terbakar politik propaganda Irak semakin anti kepada Amerika dan Israel. Perasaan anti-Amerika dan anti-Israel masyarakat Palestina ditransformasikan menjadi dukungan kepada Irak. Saddam dianggap sebagai seorang tokoh Arab kuat yang bisa mendukung perjuangan

¹⁷ *Ibid*, hal: 32

rakyat Palestina. Selain itu, Saddam dianggap seorang nasionalis Arab “sejati” karena membantu saudaranya sesama Arab untuk mendapatkan hak kemerdekaan yang selama ini dihalang-halangi oleh Israel. Dukungan masyarakat Palestina terhadap Saddam hampir merata di semua lapisan, baik yang berada di daerah pendudukan maupun yang berada di daerah pengasingan. Sebagai contoh, pada 15 Agustus 1990 di daerah pendudukan melakukan aksi demonstrasi dan menyebarkan *leaflet* yang menolak hasil pertemuan puncak Kairo.¹⁸ Dalam *leafet* itu juga menyebutkan bahwa masyarakat Palestina akan menghadapi pasukan multinasional di Arab Saudi yang menekan Irak secara militer dan ekonomi.¹⁹

Dukungan Palestina kepada Irak diperlihatkan pula secara militer ketika Perang Teluk meletus. Hal ini dapat dilihat dari pasukan PLO yang berada di Lebanon ikut serta membuka front dengan Israel. Bahkan menurut Zeid Wehbeh, wakil PLO di Lebanon, diserangnya daerah-daerah Israel sebagai balasan atas diserangnya Irak oleh pasukan multinasional. Lebih lanjut Zeid Wehbeh mengatakan bahwa Palestina adalah bagian dari pertempuran di Teluk.²⁰ Adanya Perang Teluk ini semakin memperjelas situasi kawasan Timur Tengah yang tidak kompak. Sehingga tidak mengherankan apabila masyarakat Palestina semakin memuji Saddam karena “kepedulian” Saddam pada nasib bangsa Palestina dalam menentukan kemerdekaannya. Apalagi dengan tegas Saddam mengatakan bahwa Perang Teluk merupakan perang untuk kemerdekaan Palestina. Pernyataan Saddam ini semakin memperkuat dukungan masyarakat Palestina terhadap Irak.²¹

¹⁸ Resolusi Kairo yang disebut dengan “Penyelesaian Arab” berisi antara lain: menyetujui adanya pasukan multinasional Arab di Arab Saudi dan Irak harus keluar dari Kuwait tanpa syarat.

¹⁹ *The Middle East*, Oktober 1990

²⁰ *Pelita*, 31 Januari 1991

²¹ *The Middle East*, Februari 1991

Faktor ekonomi, Palestina tidak puas dengan bantuan negara-negara Arab selama ini terhadap perjuangan intifadah. Negara Arab membantu Palestina hanya untuk kepentingan dan kelangsungan kekuasaan mereka sendiri. Keterlibatan masyarakat Palestina yang sedang berintifadah dan keterlibatan PLO dalam Perang Teluk menyebabkan Palestina memasuki suatu fase dilematis. Di satu sisi, Palestina membutuhkan dukungan ekonomi dari negara-negara Teluk yang kaya di lain pihak Palestina kecewa dengan negara-negara Arab. Dana dari Kuwait ataupun Arab Saudi yang sudah mengalir ke daerah pendudukan masih tetap dibutuhkan. Di samping itu, potongan gaji dari pekerja Palestina di negara Teluk bisa menambah biaya intifadah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Akan tetapi posisi Palestina yang agak ke arah Baghdad dalam Perang Teluk akan menyulitkan dukungan ekonomi tersebut²².

Faktor agama, Irak dan Palestina sama-sama beragama Islam, sehingga tidak mengherankan apabila mempunyai hubungan yang “akrab”. Keakraban antara Irak dan Palestina ditunjukkan lewat kebersamaan kedua belah pihak dalam menyambut kedatangan pasukan Amerika dan koalisinya di daerah Arab Saudi. Kedatangan pasukan Amerika dan sekutunya telah menyebabkan masyarakat Palestina merasakan bahwa saudara seperjuangannya, Irak, akan dihancurkan. Masyarakat Palestina juga curiga kepada Amerika yang selalu membantu kepentingan Israel, musuh Palestina. Palestina kecewa kepada Amerika Serikat yang telah membatalkan dialog langsung dengan PLO sebagai upaya perdamaian

²² *Ibid*, hal: 34

masalah Palestina yang sudah berlart-larut. Persamaan seperti ini menimbulkan rasa simpati kepada Saddam Hussein²³.

Kesimpulan yang diambil sebagai berikut, hubungan Perang Teluk dengan pembentukan Negara Palestina ini pada hakekatnya adalah adanya perasaan sama-sama saudara se-Arab dan juga saudara seiman. Palestina merasa mendapat dukungan dari Irak untuk lepas dari Israel dan mendirikan Negara Palestina merdeka.

Meletusnya Perang Teluk II seakan-akan membawa “berkah” bagi Negara Palestina karena dunia internasional kembali memperhatikan nasib Palestina. Dukungan kepada Irak dan Palestina semakin meluas, baik dari negara Arab maupun dari negara-negara lainnya. Dapat dikatakan bahwa kemenangan politis terbesar dari perjuangan Palestina karena setelah Perang Teluk II ada berbagai perundingan damai Israel-Palestina dan Palestina harus diberi hak untuk merdeka sebagai negara. Bahkan Amerika Serikat akhirnya bersedia mengaitkan masalah Palestina dengan krisis Teluk, yaitu Amerika berjanji membuka konferensi untuk perdamaian Timur Tengah, termasuk penyelesaian masalah Palestina secara menyeluruh.

Sebelum Amerika Serikat berjanji membuka konferensi untuk pertemuan Timur Tengah, sudah ada banyak pihak yang mengusulkan diselesaikannya konflik Teluk dengan mengaitkan masalah Palestina. Antara lain, menjelang tiba batas waktu yang ditetapkan, muncul beberapa konsep baru penyelesaian krisis Teluk di meja sidang PBB. Pihak Perancis mengusulkan agar permintaan Irak mengenai imbalan bersyarat penarikan mundur Israel dari wilayah Tepi Barat dan

²³ *Ibid*, hal: 31

Jalur Gaza dipenuhi. Sedangkan konsep lainnya dari pihak Non Blok menyatakan agar pertikaian Irak-Kuwait diselesaikan secara damai tanpa harus melibatkan pasukan asing. Dilain pihak, Inggris dan Amerika Serikat bersikeras bahwa Irak harus ditindak jika tidak bersedia menarik mundur pasukannya dari Kuwait sebelum tanggal 15 Januari 1991. Sikap Amerika Serikat dan Inggris tersebut mendapat dukungan dari Uni Soviet.

Dewan Keamanan PBB pun akhirnya menyetujui resolusi no. 681 yang mengusulkan diadakannya konferensi Jenewa untuk membicarakan nasib rakyat Palestina.²⁴ Resolusi no.681 diharapkan bakal membuahkan hasil positif ke arah penyelesaian damai konflik Arab-Israel. Konferensi internasional tentang perdamaian di Timur Tengah yang di dalamnya tercakup perlindungan terhadap bangsa Palestina ini akan menjadi kemenangan politis terbesar bagi perjuangan Palestina. Hal ini dapat mengarah kepada terbentuknya negara Palestina merdeka dalam arti yang sebenarnya. Apalagi di kalangan Partai Buruh Israel sudah mulai terdengar suara yang menghendaki Jalur Gaza dijadikan sebagai negara Palestina. Bahkan Palestina sekarang sudah menguasai 40 % Tepi Barat dari total jumlah penduduk Palestina sebesar 3 juta orang.²⁵

Dari uraian tentang Perang Teluk II dapat disimpulkan sebagai berikut : akar Perang Teluk II adalah invasi Irak atas Kuwait yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 1990. Penyebab utama Irak menduduki Kuwait adalah kecurigaan Irak bahwa Kuwait mencuri minyak sebesar 2,4 milyar dolar AS di wilayah ladang minyak Rumaila. Selain itu Kuwait dan UEA dituduh sebagai biang kedok turunnya harga minyak di pasaran internasional.

²⁴ *Tempo*, 5 Januari 1991, hal: 28

²⁵ *Kompas*, 23.28 Maret 2000.

Perang Teluk II ini sebenarnya tidak terjadi kalau Saddam menaati usul damai dari PBB dan negara-negara Arab lainnya untuk diselesaikan secara damai/diplomasi. Sikap keras Saddam ini sebenarnya Saddam ingin membuktikan bahwa dirinya sebagai pemersatu Arab dan pemimpin bangsa Arab. Ada tiga faktor invasi Irak ke Kuwait, yaitu historis bahwa berdasarkan sejarah, Kuwait termasuk wilayah Irak. Faktor ekonomi, dengan turunnya harga minyak di dunia merugikan pihak Irak karena perekonomian Irak tergantung pada minyak. Faktor politik, Saddam berambisi menjadi pemimpin dunia Arab. Memang ada upaya damai namun menemukan jalan buntu dan jalan terakhir adalah perang.

Konflik Irak-Kuwait akhirnya berkembang menjadi perang terbukabukannya Irak-Kuwait melainkan Irak-pasukan multinasional. Perang terbuka ini kemudian disebut Perang Teluk II (42 hari). Perang Teluk II pun membawa akibat mempertajam polarisasi di dunia Arab. Secara ekonomi Irak mengalami kerugian besar karena tidak mempunyai cadangan minyak yang menyebabkan penderitaan merajalela dalam masyarakat Irak. Dipihak Kuwait masyarakat Kuwait menuntut pemerintahan yang demokratis, karena dinilai selama ini pemerintahan Kuwait kurang demokratis. Selain itu hubungan Irak dengan PBB (AS) kurang harmonis karena tekanan PBB dengan embargo ekonomi terhadap Irak. Dengan menggunakan “kartu Palestina” dalam Perang Teluk II, hal ini berarti ada hubungan Perang Teluk II dengan masalah Palestina-Israel. Hubungan Perang Teluk II dengan pembentukan negara Palestina adalah Perang Teluk II didentikan dengan perang kemerdekaan/ pembebasan Palestina dan karena sesama Islam. Oleh karena itu, wajarlah jika warga Palestina begitu bersemangat mendukung *statement political* Saddam Hussein.

BAB IV

**PENGARUH PERANG TELUK II TERHADAP PEMBENTUKAN
NEGARA PALESTINA MERDEKA**

Dalam bab IV ini akan diuraikan tentang : langkah-langkah perdamaian menuju Palestina merdeka, pengaruh Perang Teluk II dengan tuntutan negara Palestina merdeka dan kemerdekaan Palestina sebuah analisis.

A. Langkah-langkah Perdamaian Menuju Palestina Merdeka.

Kalau George Orwell menyatakan bahwa perdamaian adalah peperangan, hal ini sangat dimengerti karena perdamaian itu terwujud justru karena adanya perang. Ada juga yang mengatakan perang adalah bapak pembangunan karena selama perang baik fisik maupun mental porak poranda. Selanjutnya ketika perang berakhir, yang hancur dibangun kembali entah fisik maupun mental. Perang memang malapetaka yang besar di muka bumi.¹

Ketika Perang Teluk II berlangsung Irak dan Kuwait mengalami kehancuran dan kelumpuhan aktivitas. Tidak hanya itu Perang Teluk II membawa pengaruh yang sangat luas dalam bidang politik pemerintahan Palestina-Israel terutama pengaruh terhadap upaya-upaya perdamaian. Sudah ada upaya untuk perdamaian Palestina-Israel setelah Perang Teluk II berakhir. Upaya-upaya yang dibuat adalah upaya diplomasi dengan diadakan perundingan-perundingan damai antara pemerintah Palestina-Israel.

¹ Dom Helder Camara, 1971, *Spiral Kekerasan*, (dalam Kedaulatan Rakyat, 9 April 2000), Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Palestina sebagai sebuah negara sudah berdiri sejak 1988, namun kenyataan sebagai negara 'merdeka' belum diakui hingga sekarang. Sebelum, ketika dan sesudah Perang Teluk II meletus masalah Palestina menjadi salah satu agenda hangat yang dibicarakan. Perang Teluk II secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap pembentukan negara Palestina merdeka. Indikasi bahwa Perang Teluk II membawa pengaruh, yaitu dengan diawali perundingan damai di Madrid 30 Oktober 1991 antara Palestina-Israel. Proses perundingan damai ini diupayakan 9 bulan sesudah Perang Teluk II berakhir. Konferensi perdamaian ini dihadiri oleh wakil Israel-Suriyah-Yordania dan Lebanon. Delegasi Palestina terdiri dari warga yang ada di wilayah pendudukan.

Dua tahun kemudian, 13 September 1993, juru runding Palestina-Israel menandatangani "Deklarasi Prinsip", kesepakatan damai yang menggarisbawahi rencana otonomi Palestina di wilayah pendudukan. Kesepakatan ini disebut Kesepakatan Oslo I, dan yang menandatangani adalah Arafat (palestina) dan Perdana Menteri Yitzhak Rabin (Israel). Pada tahun yang sama juru runding Palestina-Israel bertemu di Taba (Mesir) guna membahas rancangan otonomi Palestina.

Setahun kemudian, 4 Mei 1994 Israel dan PLO menandatangani kesepakatan yang memberikan otonomi pertama kepada Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel sejak 1967. Sesuai dengan kesepakatan itu pada tanggal 11 Mei 1994 Israel mentransfer kekuasaan PLO, dan menyerahkan pangkalan militer Jalur Gaza ke Palestina. Pada tanggal 13 Mei 1994, Israel menyerahkan Jericho ke polisi Palestina. Tanggal 1 Juli 1994, Yasser Arafat menjadi kepala Otoritas Palestina setelah wilayah Gaza diberi otonomi. Pada

tanggal 26 Oktober 1994, Israel-Yordania menandatangani perjanjian perdamaian. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menghadiri perjanjian itu. Clinton kemudian mengunjungi Damascus namun tidak membuat kemajuan dalam melahirkan kesepakatan damai antara Israel dan Suriah.

Tahun 1995, PLO dan Israel berunding untuk memperluas otonomi Palestina sebagian besar Tepi Barat, Suriah-Israel memulai lagi perundingan di Maryland (Amerika Serikat). Israel memcabut pengawasan atas Ramallah dan menyerahkan enam kota di Tepi Barat kepada Palestina berdasarkan kesepakatan Oslo II bulan September yang menetapkan memperluas otonomi Tepi Barat. Kesepakatan Oslo II ditandatangani Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin.

Pada tanggal 26 Januari 1996, warga Palestina mengadakan pemilu pertama untuk memilih presiden Palestina dan anggota parlemen di Tepi Barat dan Jalur Gaza, sesuai dengan perjanjian damai dengan Israel. Yasser Arafat terpilih sebagai presiden Palestina. Pada tanggal 24 April 1996, Dewan Nasional Palestina mengamandemen Piagam Nasional Palestina PLO dengan mencabut klausul yang menyerukan penghancuran Israel. Keputusan itu mendorong penarikan tentara Israel dari Hebron dan dimulainya perundingan setatus final wilayah Palestina. Dalam perundingan ini ditegaskan lagi bahwa Yerusalem harus menjadi fokus status final.² Dari semua perundingan damai Palestina-Israel sebagai penengah perundingan adalah PBB (baca:AS). PBB sangat berperan dalam proses perdamaian Timur Tengah karena posisi PBB dalam memberikan bantuan kepada rakyat Palestina dan proses perdamaian. Amerika Serikat sebenarnya menjadi sponsor utama perundingan perdamaian Timur Tengah, meskipun perundingan itu

² *Kompas*, 4. 6 Mei 1996, "Yerusalem harus jadi fokus status final" ; Palestina menuntut negara merdeka.

didasarkan pada resolusi DK PBB 1967 dan 1973 no. 242 dan no. 338 yang menyerukan pertukaran “tanah” untuk perdamaian dan PBB sebagai pendukung. Pada tanggal 7 Mei 1996 Israel-Palestina membuka perundingan ‘tahap akhir’ menuju penyelesaian damai permanen yang akan memutuskan masa depan Yerusalem, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina menuntut agar pembentukan negara Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur. Perundingan damai tahap akhir itu diadakan di Mesir (Taba) kemudian menghasilkan Komunike Taba yang memutuskan status permanen Palestina dengan ibukota Yerusalem Timur. Penandatanganan Komunike Taba terjadi di Oslo sehingga disebut Oslo III.³

Perundingan-perundingan damai sesudah Perang Teluk II merupakan pengaruh dari Perang Teluk II tersebut karena sebelum Perang Teluk II berlangsung presiden Irak mengeluarkan ultimatum dan menggunakan kartu Palestina bahwa sebelum Irak mundur dari Kuwait; Israel terlebih dahulu menarik mundur pasukannya dari daerah pendudukan Palestina. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa jika Perang Teluk II meletus maka Perang Teluk II merupakan perang kemerdekaan Palestina/ perang pembebasan Palestina.

B. Pengaruh Perang Teluk II dan Tuntutan Negara Palestina Merdeka

Palestina sudah berdiri tahun 1988 sebagai sebuah negara, namun sebagai sebuah negara yang menentukan nasib dan pemerintahan sendiri (sebagai negara merdeka belum terealisasi). Sudah banyak upaya/langkah proses perdamaian yang dilakukan Palestina-Israel namun belum juga diakui status permanen Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Israel tetap tidak mengakui pembentukan

³ *Kompas*, 6 Mei 1996, “Palestina menuntut negara merdeka”.

suatu negara Palestina merdeka. Berdasarkan alasan-alasan agama dan sejarah Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibukota negara Israel.

Pemerintah Israel karena memiliki posisi yang lebih kuat maka dalam perundingan-perundingan, penafsiran itulah yang banyak dijadikan patokan-patokan. Kenyataan-kenyataan di lapangan yang telah banyak berubah juga menguntungkan posisi Israel umpamanya: Israel tetap melakukan pembangunan di Yerusalem dan daerah-daerah pendudukan lainnya. Antara konsep dan di lapangan tidak sinkron karena selalu bertentangan dengan keinginan rakyat Palestina yang menghendaki pembentukan negara di tanah air Palestina dengan Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukota.⁴

1. Pengaruh di bidang Politik

Pengaruh di bidang politik ditunjukkan dengan sikap kedua belah pihak bersedia mengadakan perundingan damai. Padahal sebelumnya antara Israel-Palestina (PLO) belum pernah berunding dalam satu meja perundingan. Israel menganggap PLO sebagai suatu organisasi teroris yang tidak pantas mewakili rakyat Palestina. Akan tetapi setelah terjadi Perang Teluk II, Israel bersedia mengakui PLO sebagai walik sah rakyat Palestina. Melemahnya sikap Israel untuk berunding dengan PLO tidak terlepas dari tekanan pihak Amerika Serikat. Dengan berakhirnya Perang Teluk II perundingan damai pun berlangsung mulai dari Madrid, Oslo I, Oslo II, Oslo III memutuskan bahwa pada bulan Mei 1999 status permanen Palestina berlaku. Bahkan perundingan ini masih terus berlangsung pada tahun 2000. Selain itu pada tahun 1996 Palestina mengadakan pemilu pertama dan memilih Yasser Arafat sebagai presiden pertama Palestina.

⁴ *Kompas*, 4 Mei 1996, "Perundingan Status Permanen Palestina".

Sebenarnya perundingan ini merupakan jalan menuju pembentukan negara Palestina merdeka.

Langkah menuju Palestina merdeka antara kenyataan dan di lapangan lain karena sampai saat ini kemerdekaan Palestina belum diakui apalagi terealisasi.⁵ Kalau dilihat secara politis maka langkah perdamaian yang berupa perundingan damai itu sesungguhnya kedua belah pihak (Arab-Israel) memiliki kadar sensitifitas dan emosional yang tinggi. Karena itu usaha untuk berdamai dengan mengadakan kampanye damai atau pertemuan antara pemerintah kedua belah pihak tetap pada level retorika. Hal ini disebabkan aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak ditampung. Rupanya hal inilah yang hingga kini masih belum terlihat dalam kasus Palestina-Israel. Yang terjadi justru ketika pembicaraan gagal, masing-masing pihak menuduh pihak lain sebagai penyebab kegagalan, sama-sama gagal memberi konsesi.

Gagalnya pembicaraan damai yang sudah bertahun-tahun hingga Januari-Mei 2000 pun masih pada tingkat pembicaraan seperti antara Menteri Luar Negeri Suriyah, Farouk Al-Sharaa dan Ehud Barak Perdana Menteri Israel; di Amerika Serikat dan Swiss, Jenewa maupun Eilat.⁶ Kegagalan menuju pembentukan negara Palestina merdeka selain disebabkan kegagalan proses perdamaian juga disebabkan visi kedua negara berbeda bahkan antara pemimpin Arab pun memiliki visi yang berbeda. Pihak Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka asalkan Yerusalem tetap sebagai milik Israel, dan proses menuju kemerdekaan pun harus secara bertahap. Dari pihak Palestina (Arab) bersikeras

⁵ *ibid*

⁶ *Kompas*, 28 Maret 2000, "Pertemuan Clinton-Assad Memang tidak untuk satu terobosan damai; *Kompas* 2 Mei 2000, "Israel isyaratkan setuju negara Palestina".

dan menghendaki agar dalam proses damai kedua belah pihak berdiri sama tinggi, sebab Israel selama ini selalu ingin menang sendiri.

Antara pemimpin Arab ada yang menghendaki agar damai dan kemerdekaan diberikan ke Palestina tanpa tahap sedangkan yang lain menghendaki agar perdamaian dan kemerdekaan itu diberikan secara bertahap. Maksud dari perdamaian dan kemerdekaan secara bertahap bahwa Israel menarik mundur pasukannya dari daerah pendudukan secara bertahap.

Walaupun demikian, harapan mungkin ada pada komitmen pemimpin Israel- Arab (Palestina) dan pemimpin negara mediator dalam hal ini Amerika Serikat untuk terus berunding agar mencapai kesepakatan, yang kemudian diwujudkan agar perdamaian yang menjadi roh setiap bangsa tercipta. Di satu pihak perdamaian hanya bisa tercapai bila aspirasi pihak yang bertikai harus diakomodasi dan pihak negara penengah jangan menerapkan kebijakan standart ganda.⁷

2. Pengaruh di Bidang Geografis

Pengaruh di bidang geografis tampak pada sikap lunak Israel yang telah mengembalikan beberapa wilayah yang pernah diduduki. Indikasi sikap lunak Israel dapat dilihat dari pengembalian wilayah, yaitu tanggal 21 Maret 2000 Israel mengembalikan lagi 6,1% wilayah Tepi Barat kepada bangsa Palestina dan Israel mengisyaratkan pembentukan negara Palestina merdeka, dengan menarik mundur militer Israel dari Lebanon.⁸ Dengan demikian Otoritas Palestina sekarang menguasai sekitar 40% wilayah Tepi Barat, artinya Otoritas Palestina sudah

⁷ *Kompas*, 9 Mei 1996, "Standar Ganda AS dan Laporan PBB tentang Serangan Israel ke Lebanon"

⁸ *Kompas*, 23 Maret 2000, "Jalan Menuju Pembentukan Negara Palestina Merdeka Semakin Dekat"; *Kompas* 2 Mei 2000, "Israel Isyaratkan Setuju Negara Palestina"; Siaran *RRI*, tanggal 3 Mei 2000.

bertanggung jawab penuh atas kehidupan sekitar 60% penduduk Palestina di Tepi Barat dari total penduduk Palestina lebih dari 3 juta orang. Kemudian mulai tanggal 2-23 Mei 2000, Israel menarik mundur pasukanya dari Lebanon Selatan yang telah diduduki Israel selama 22 tahun. Sedang dengan Suriah perundingan untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan belum mencatat kemajuan. Pemecahan masalah Lebanon maupun Suriah akan membantu penyelesaian kasus Palestina karena semula persoalan Lebanon dan Suriah merupakan komplikasi kasus Palestina.⁹

Cakupan wilayah kekuasaan Otoritas Palestina yang semakin luas memperbesar harapan dan keinginan untuk segera mengumumkan pembentukan negara merdeka, yaitu Palestina. Bahkan disebut-sebut, Palestina akan mengumumkan kemerdekaan akhir tahun 2000. Kalau dilihat dari kedua bidang tersebut di atas ada titik terang menuju Palestina merdeka, walau pun di lapangan kedua belah pihak masih terus bertikai.

Berbagai negara memang sedang mengharapkan penyelesaian tuntas konflik Israel-Palestina akan berakhir tahun 2000 ini agar dapat memasuki milenium III dalam suasana perdamaian. Tampaknya pembentukan negara Palestina merdeka semakin berada di depan mata. Sudah begitu jauh Israel dan Palestina sepakat agar perjanjian final akan tercapai pada bulan September 2000, yang akan mengatur batas-batas wilayah. Akan tetapi, status Yerusalem tetap menjadi persoalan sensitif kedua belah pihak.¹⁰

Inti terdalam konflik Palestina-Israel terletak pada “tanah” yang sangat bersejarah dari segi agama, dan kebudayaan di Timur Tengah. Pertikaian itu

⁹ *Ibid*, 23 Maret 2000

¹⁰ *Kompas*, 23 Maret 2000, “Jalan Menuju Pembentukan Negara Palestina Merdeka Semakin Dekat”

meningkat karena Israel mendirikan negara merdeka 1948. Sebaliknya keinginan Palestina mendirikan terus dihalangi. Padahal Palestina sebagai sebuah bangsa berhak merdeka di tanah airnya sendiri. Harapan pembentukan negara merdeka itu mulai muncul sejak Israel dan Palestina mencapai kesepakatan damai 1993 (Oslo I) dua tahun sesudah Perang Teluk II berakhir. Atas prinsip tanah dikembalikan demi perdamaian, Israel harus mengembalikan tanah milik Arab-Palestina yang diduduki sejak tahun 1967.

Jalan menuju perdamaian sejati mungkin masih panjang dan berliku-liku, tetapi orang semakin membicarakan kemungkinan Palestina membentuk negara dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Secara embrional, Otoritas Palestina sesungguhnya sedang menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Dengan menguasai Gaza dan 40% wilayah Tepi Barat, Otoritas Palestina bertanggung jawab atas dinamika kehidupan 60% dari total penduduk. Tantangan yang dihadapi Otoritas Palestina tentu tidak kecil.¹¹

Penguasa Palestina harus menjadi sistem keamanan, ketertiban dan pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya. Lapangan pekerjaan perlu disiapkan untuk mencegah timbulnya keresahan sosial. Memang hampir dipastikan Palestina akan lebih leluasa mengatur dan merancang pembangunan ekonomi jika benar-benar seluruh wilayah lepas dari Israel. Sesungguhnya perdamaian itu tercapai jika Israel-Palestina yang memiliki kemauan politik bukan Amerika Serikat. Lebih jauh lagi seperti halnya perdamaian tanpa Amerika Serikat adalah fatamorgana politik.

Berdasarkan uraian tentang pengaruh Perang Teluk II terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dapat disimpulkan : *pertama*, Perang

¹¹ *Ibid*, 23 Maret 2000

Teluk II mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses perdamaian Palestina-Israel, karena sebelum Perang Teluk II pecah “Kartu Palestina” dimasukkan dalam salah satu alasan invasi Irak ke Kuwait. *Kedua*, di bidang politik, Israel telah bersedia mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina karena sebelumnya PLO dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel. Selain itu sesudah Perang Teluk II ada langkah-langkah konkrit yang dibuat oleh pejabat Palestina-Israel dan juga peran PBB serta Amerika Serikat dalam membantu proses perdamaian. Langkah yang tampak adalah perundingan damai mulai dari Madrid 1991, Oslo I (1993) tentang Otonomi Palestina, Oslo II (1995) tentang perluasan Otonomi Palestina, Oslo III (1996) yang menghasilkan Komunike Taba, yaitu status permanen Yerusalem, Tepi Barat dan Jalur Gaza pada bulan Mei 1999. Perundingan damai di Eilat, Israel sudah mengisyaratkan sikap setuju atas adanya negara Palestina. Berdirinya negara Palestina adalah hasil dari perundingan Israel-Palestina. Di bidang geografis secara bertahap daerah-daerah pendudukan dikembalikan ke pemiliknya (Palestina).

Ketiga, antara konsep dan realita di lapangan tidak sinkron karena tarik ulur waktu dari pihak Israel, yang menyebabkan perdamaian belum tercipta sehingga belum diakuinya Palestina sebagai negara merdeka. Tidak terealisasinya upaya itu juga disebabkan kedua belah pihak saling menang sendiri untuk menyelesaikan persoalan dan juga negara penengah menerapkan kebijakan standar ganda serta aspirasi kedua negara yang bertikai tidak diakomodasi.

Keempat, dinamika politik Timur Tengah melaju lebih kencang dalam kenyataan, daripada berbagai proses perdamaian, karena kedua belah pihak tidak menahan diri. Buktinya bahwa perdamaian semakin dekat namun dalam bulan Mei

2000 konflik antara tentara Israel dengan Lebanon Selatan berkembang sejalan dengan proses menuju perdamaian. Konflik ini akhirnya ditanggapi oleh Liga Arab dengan mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan Israel selama ini adalah termasuk kejahatan perang.

Kelima, harapan masyarakat dunia agar setiap negara menciptakan perdamaian termasuk Palestina-Israel. Dan hampir ada titik terang bahwa damai akan datang, hal ini ditunjukkan lewat sikap lunak Israel yang dengan bebas menyatakan menarik mundur pasukan militernya dari daerah pendudukan. Ini memang suatu kemajuan dan diharapkan kemajuan terus berlanjut sampai tanah Palestina seluruhnya diserahkan agar damai tercipta dan kemerdekaan dan kedaulatan sebagai negara diakui. Sesuai dengan rencana bahwa bulan September 2000, Israel akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka, mungkinkah?

C. Kemerdekaan Palestina Sebuah Analisis

Kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa dan negara di dunia bahkan sangat mempribadi karena termasuk hak asasi manusia. Kemerdekaan ini sejak manusia ada kemerdekaan pun hadir selalu bersama perkembangan manusia. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara sebagai suatu kelompok masyarakat bangsa yang memiliki kemerdekaan, maka sebagai anggota suatu bangsa dan negara pun menuntut kemerdekaan dan kedaulatan sebagai warga negara. Namun kemerdekaan ini jarang juga sulit diperoleh walaupun merupakan hak azasi manusia. Untuk memperoleh kemerdekaan yang merupakan hak azasi setiap

orang/bangsa membutuhkan perjuangan yang lama dan panjang, serta pengorbanan diri.

Perjuangan memperoleh kemerdekaan yang penuh dengan pengorbanan sering terjadi secara revolusioner dan heroik. Perjuangan revolusioner dan heroik inilah yang dilakukan oleh rakyat Palestina melalui berbagai organisasi dan gerakan sosial masyarakat lainnya yang menuntut kemerdekaan. Tuntutan kemerdekaan rakyat Palestina yang sudah berabad-abad dan yang telah membawa banyak korban belum juga diperoleh. Kemerdekaan sulit diperoleh karena selalu dihalang-halangi oleh bangsa Israel.

Sudah banyak yang dilakukan dalam rangka mengusahakan perdamaian. Akan tetapi, langkah-langkah perdamaian itu selalu gagal dan tidak selalu membawa hasil yang menggembirakan. Semakin banyak langkah perdamaian semakin kencang pula konflik yang terjadi bahkan berjalan lebih kencang daripada upaya perdamaian.

Melihat perkembangan saat ini melalui berbagai buku, media cetak dan media elektronika, penulis mempunyai beberapa analisis tentang kemerdekaan Palestina dari dua versi. *Versi pertama* sebagai berikut : *Pertama*, kemerdekaan yang dituntut akan mengalami hambatan bahkan prosesnya menjadi lama. Menciptakan perdamaian kalau ada kemauan saling menghargai dan menahan diri dari pihak Palestina dan Israel.

Kedua, kedua negara yang berkonflik sebaiknya melupakan “tanah” yang bersejarah baik dari segi agama dan kebudayaan. Persoalan kedua negara yang berlarut-larut itu diprediksikan akan berdamai dan diakuinya Palestina sebagai

negara merdeka apabila urusan dalam negeri kedua negara dan penyelesaian persoalan diserahkan kepada masyarakat Palestina Israel. Diprediksikan demikian karena selama ada pihak ketiga tetap tidak menjamin perdamaian di Kawasan Timur Tengah bahkan memperumit masalah. Sepertinya perdamaian itu tercipta kalau ada Amerika Serikat, bahwa tanpa Amerika Serikat merupakan fatamorgana politik.

Ketiga, dari sudut pandang Israel kemerdekaan bisa diberikan ke Palestina asal ada ganti rugi (kompensasi) daerah lain. Misalkan, jika Yerusalem diberikan menjadi ibukota Palestina. Perdamaian tidak mudah tercipta dan kemerdekaan tidak mungkin diperoleh jika kedua belah pihak memiliki versi berbeda tentang sejarah dan agama serta kebudayaan .

Versi kedua tentang kemerdekaan Palestina : *Pertama*, penulis merasa optimis bahwa Palestina akan merdeka kerana Israel telah menunjukkan sikap simpatik terhadap perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah dan warga kedua negara telah menyadari pentingnya perdamaian dan kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan wilayah akhir-akhir ini ke Palestina.

Kedua, penulis berpendapat bahwa jika kedua belah pihak melupakan 'tanah' yang menjadi sejarah dan kebudayaan berkembang sekaligus menjadi sumber konflik. Dalam hal ini kedua belah pihak saling menghargai dan menahan diri. *Ketiga*, perdamaian dan kemerdekaan tercapai apabila konflik antara kedua belah pihak diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat negara itu sendiri. *Keempat*, Palestina dapat merdeka jika Israel mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina. *Kelima*, pihak ketiga untuk saat ini sebaiknya jangan mencari

keuntungan dengan menerapkan kebijakan standar ganda. Analisis ini sifatnya sementara karena masih ada kemungkinan lain dengan melihat perkembangan yang akan datang.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ada yaitu : proses pembentukan negara Palestina merdeka, Perang Teluk II (1990-1991), dan pengaruh Perang Teluk II terhadap pembentukan negara Palestina merdeka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Palestina abad ke 11 SM didiami oleh suku bangsa Semit termasuk keturunan Arab dan Yahudi serta membentuk kerajaan di Palestina. Tahun 928 SM terpecah menjadi 2, yaitu Israel dan Yudea (Yuda). Yerusalem menjadi ibukota Yuda dan Israel beribukota di Samaria. Israel kemudian diduduki oleh Assiria dan Yuda oleh Nebukadnezar dari Babylonia. Setelah Babylonia jatuh, orang Yuda kembali lagi ke Yerusalem dan membangun kerajaan. Tahun 70 SM kerajaan ini ditakhlukkan oleh Romawi.

Keterpecahan ini tidak berarti orang Arab Palestina dan Israel telah hilang, tetapi berusaha kembali ke tanah airnya. Tahun 637 Palestina dan Israel direbut oleh Islam Arab dibawah pimpinan Khalifah Umar Ibn Chatab. Selanjutnya tahun 1517 Palestina dan kota suci Yerusalem direbut oleh Islam Turki dan berkuasa hingga pecah PD I. Tahun 1917, Inggris mengalahkan Turki dan PM Inggris Balfour mengumumkan statemen politik tentang pemulangan orang Yahudi ke Palestina. Statemen politik itu kemudian dikenal dengan nama Balfour Declaration. Dengan adanya deklarasi itu masyarakat Arab menentang, namun tidak pernah ditanggapi sampai akhirnya tahun 1948 diproklamasikan

negara Yahudi (Israel) di Palestina. Sejak saat itu konflik antara Arab Palestina-Israel terjadi secara berangsur-angsur hingga saat ini.

Perjuangan Arab Palestina tidak pernah surut melalui organisasi dan gerakan-gerakan lainnya, seperti PLO, Intifadah, Hamas, Hizbollah. Cara yang paling mencolok adalah perang sejak (1948, 1956, 1967, 1973). Pada tahun 1988, PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina mengumumkan kemerdekaan di bawah pimpinan Yasser Arafat. Kemerdekaan ini diakui secara de jure, secara de facto belum diakui hingga saat ini.

- 2) Kemerdekaan Palestina menjadi hangat kembali dibicarakan ketika Perang Teluk II berlangsung. Perang Teluk II terjadi di kawasan Teluk Persi tahun 1990-1991. Perang Teluk II ini diawali dengan invasi dan aneksasi Irak ke Kuwait kemudian berkembang menjadi perang antara Irak dengan pasukan multinasional. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Teluk II, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain : sejarah, ekonomi, politik dan psikologis Saddam. Sedangkan faktor ekstern, yaitu politik global tentang masalah Palestina dan intervensi pihak luar dalam menyelesaikan masalah di kawasan Timur Tengah. Adapun akibat Perang Teluk II, yaitu kedua belah pihak yang bertikai khususnya Kuwait-Irak mengalami kehancuran material/ fisik maupun mental. Kemiskinan merajalela di Irak sedang rakyat Kuwait menghendaki pemerintahan yang demokratis. Hubungan Irak dengan Amerika tidak harmonis dan terjadi polarisasi negara-negara Arab.



3) Dikatakan Perang Teluk II mempengaruhi pembentukan negara Palestina merdeka, di bidang politik pasca Perang Teluk II dilakukan perundingan damai yang dimulai dari Madrid (1991), Oslo I (1993), Oslo II (1995), Oslo III (1996) dan perundingan-perundingan lainnya yang masih berlangsung. Semua upaya perundingan damai ini mengisyaratkan bahwa satu hari nanti Palestina menjadi sebuah negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukota. Di bidang geografis daerah-daerah yang diduduki Israel dikembalikan ke Palestina, seperti Jalur Gaza, Tepi Barat dan Lebanon. Dengan adanya perundingan dan pengembalian wilayah, penulis memprediksikan bahwa cepat atau lambat konflik/perang Palestina-Israel akan segera berakhir dan Palestina akan mendapatkan *self determination* pada akhir tahun 2000.

Melihat perkembangan akhir-akhir ini boleh dikatakan bahwa Perang Teluk II sangat berperan dalam mengusahakan perdamaian dan tuntutan pembentukan negara Palestina merdeka. Memang tidak dapat disangkal bahwa kemerdekaan Palestina diperoleh sekali jadi, namun hampir pasti diakui Palestina akan merdeka secara bertahap. Negara Palestina boleh diproklamasikan namun harus mempersiapkan sungguh-sungguh dasar negara baru Palestina, bentuk negara, institusi-institusi, sistem hukum, sistem pemilihan umum. Hal dasar seperti inilah yang paling segera dibutuhkan oleh sebuah negara baru. Saat ini Palestina menguasai 40% Tepi Barat, 60% Jalur Gaza, dan tidak menguasai sama sekali Yerusalem. Namun, jika deklarasi kemerdekaan Palestina diumumkan, maka wilayah yang diumumkan adalah seluruh Palestina termasuk tanah-tanah yang diduduki Israel pada perang Arab-Israel tahun 1967 dengan ibukota Yerusalem.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Camara, Dom Helder, 1971. *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dipoyudo, Kirdi, 1977. *Timur Tengah Dalam Pergolakan*. Jakarta : CSIS.
- Gayo, Luqman Hakim, 1993. *Zionis Israel Atas Hak Palestina*.
Jakarta : Arikha Media Cipta.
- GINNES, James Mc, 1997. *Menjadi Pembawa Damai*. Yogyakarta : Kanisius.
- Glowers, Andrew and Graham Thompson, 1983. *Ketidak Merataan, Konflik dan Perubahan* (Terj.). Jakarta : Universitas Press.
- Gottschalk, Louis, 1975. *Mengerti Sejarah* (Terj.). Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Hart, Alan, 1989. *Arafat Teroris atau Pendamai* (Terj.). Jakarta : Grafitipres.
- Haurani, Albert, 1971. *Palestinian and Israel* (ed.). New York : Walter Laqneur, Bantam.
- Holsti.K.J., 1988. *Politik Internasional, Kerangka Analisis*. Jakarta : Erlangga Press.
- Husein, Oemar Amin, 1953. *Gelora Politik Negara-Negara Arab*. Djakarta : Tintamas.
- Hayes, Charleton.J.H., 1951. *Essey And Nationalism, Reading in World Politic*. Illionis: American Fondation Political Education
- Heater.D.B., 1967. *Political Ideans In Modern World* London : George G, Barrap & Co.
- Ibrahimy, El., M., Nur, 1955. *Tjatur Politik Imperialis di Negara-Negara Islam Timur Tengah*. Bandung : N.V. Alma'Arif.
- Kohn, Hans, 1961. *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya*. Jakarta : PT. Pembangunan.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.

- Latief, Ibrahim, 1991. *Zionisme Israel Dan Kebangkitan Nasionalisme Arab*. Jakarta : Metro Pos.
- Plano, Jack.C. and Roy Olton, 1982. *The International Dictionary*. California : California Press.
- Quandt, William B., 1971. *Palestinian Nationalism: Its Political and Military Dimensions*. Santa Monica :
- Rais, Amien, 1990. *Timur Tengah Dan Krisis Teluk: Sebuah Analisis Kritis*. Surabaya : Amar Press
- Sartono Kartodirjo, 1990. *Ungkapan-Ungkapan Sejarah Barat Dan Timur*. Jakarta : Gramedia.
- Sihbudi, M.Riza, 1991. *Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah*. Bandung : Mizan.
- Sutarno, dkk., 1991. *Perang Teluk Malapetaka Dunia*. Jakarta : Media Interaksi Utama dan Pustaka Sinar Harapan.
- Stoddart, L., 1964. *Dunia Baru Islam*. Djakarta : Balai Pustaka.
- Soekarno, 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Djakarta : Gunung Agung.
- _____, 1964. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Djakarta : Inti Idayu Press.
- Sadily, Hassan, 1964. *Ensiklopedia Indonesia no. 4*, Elsevier Publishing Projects
- Sill, David K., 1972. *International Encyclopedia of Social Science*. New York : The macmillioan Company end Pree Press.
- Suryobrata, Sumadi, 1989. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Taylor, Alan R., 1990. *Pergeseran-Pergeseran Aliansi Dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*. Surabaya : Amarpres.
- Watt, Montgomery, 1987. *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Beunebi Cipta
- Newsweek*, 25 Januari 1988
- Tempo*, 28 Juli 1990.
- Tempo*, 18 Agustus 1990.

Tempo, 5 Januari 1991.

Tempo, 8 Agustus 1992.

Jawa Pos, 17-18 Maret 1988.

Kompas, 1996. “Perundingan Status Permanen Palestina” & “Yerusalem harus jadi fokus status final”. 4 Mei.

Kompas, 1996. “Palestina Mendukung Menuntut Negara Merdeka”. 6 Mei.

Kompas, 1996. “Standar Ganda AS dan Laporan PBB tentang Serangan Israel ke Lebanon”. 9 Mei.

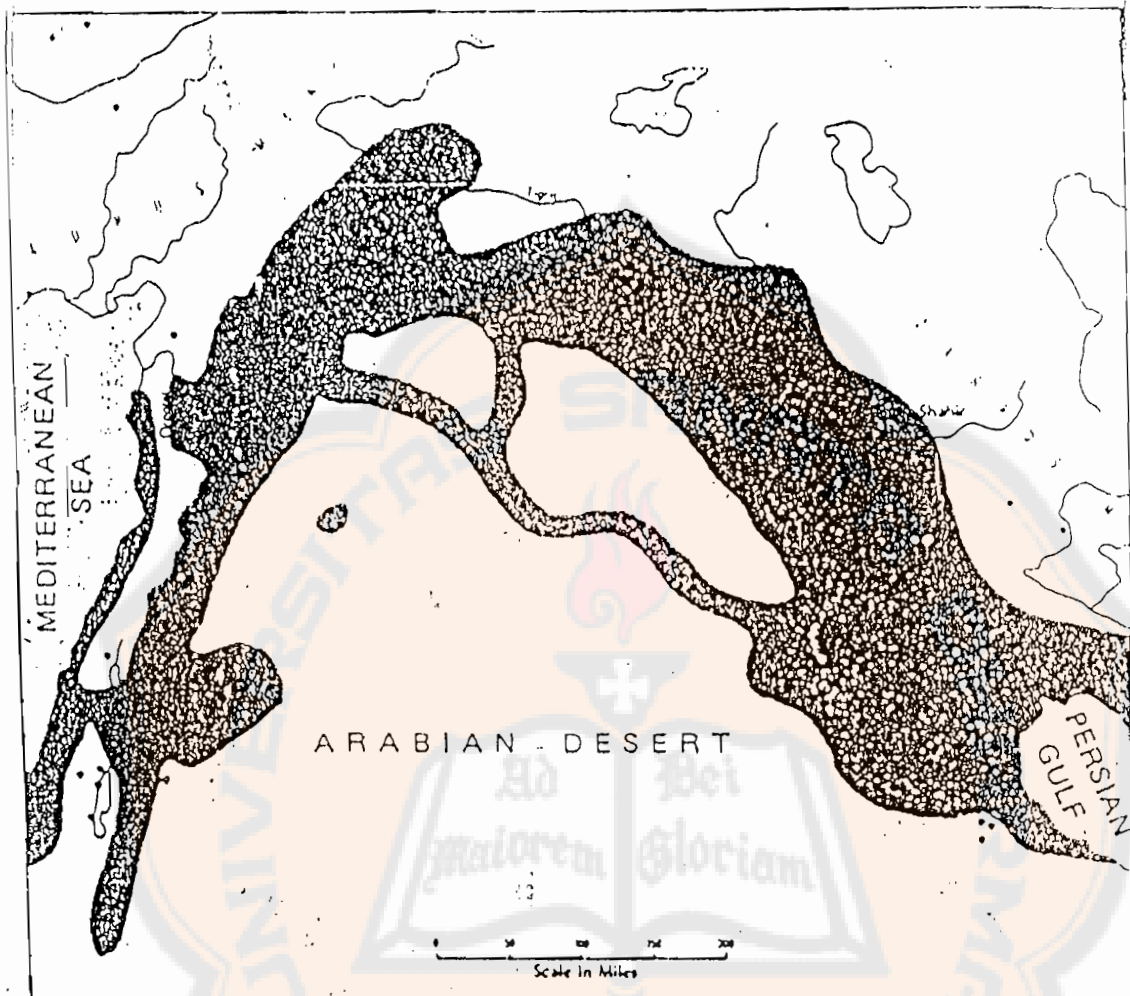
Kompas, 2000. “ Jalan Menuju Pembentukan Negara Palestina Semakin Dekat”. Kamis, 23 Maret.,

Kompas, 2000. “ Pertemuan Clinton-Assad Memang tidak untuk satu terobosan damai”. Selasa, 28 Maret.

Kompas, 2000. “ Israel Isyaratkan Setuju Negara Palestina”. 2 Mei.

Suara Pembaharuan, tahun 1991

Gambar 18. THE FERTILE CRESCENT (BULAN SABIT SUBUR)

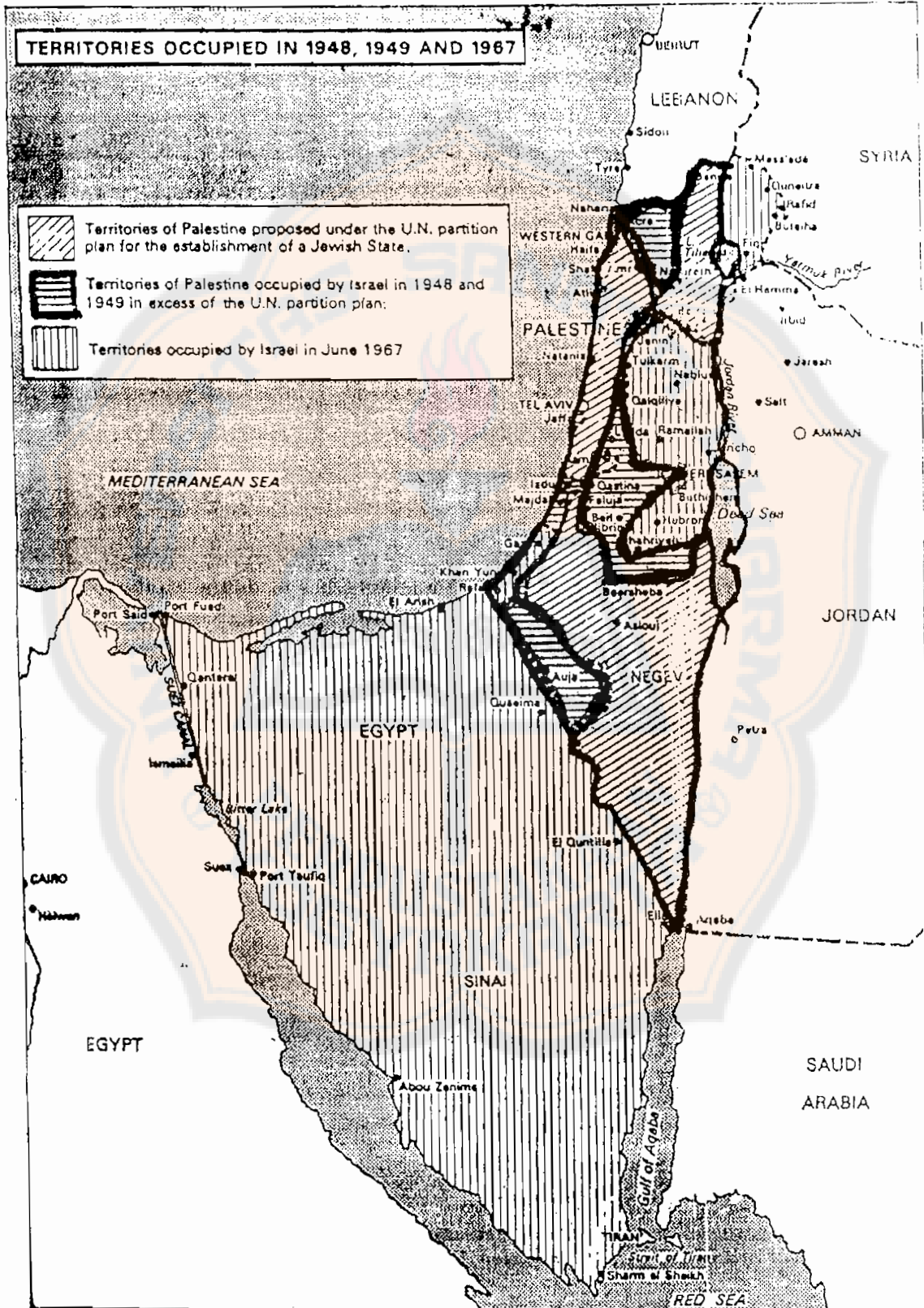


(Brook & Webb, hlm. 47).

Wilayah berwarna gelap itu yang disebut Bulan sabit subur. Dulunya teluk Parsi lebih menjorok ke pedalaman. Titik-titik hitam itu lokasi-lokasi usaha pertanian yang pertama (sekitar Laut Mati). Titik-titik sisanya adalah kota-kota pertama di lembah Efrat dan Tigris.

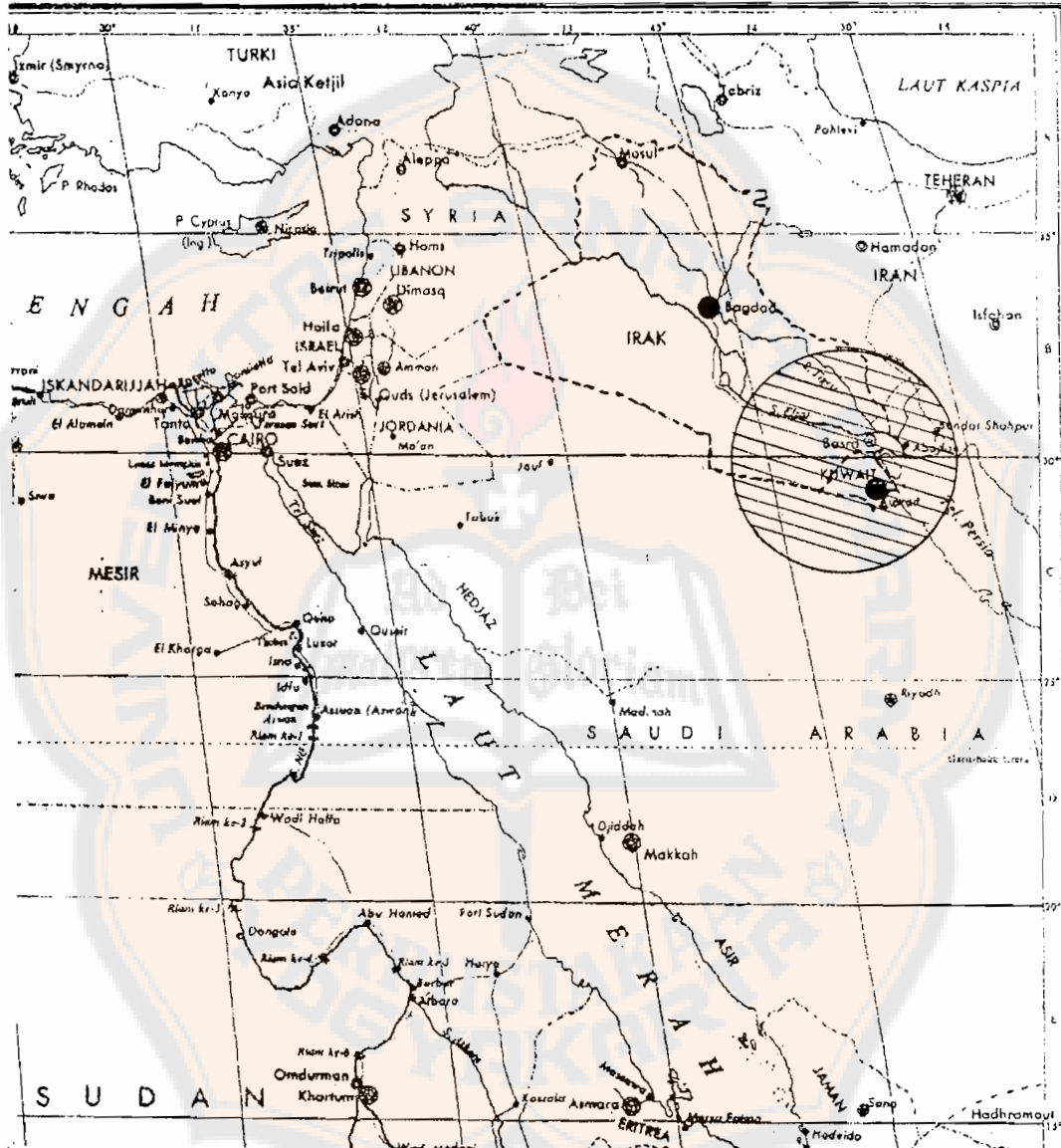
(Sumber : Geografi Kesejarahan I Peradaban Dunia, Bandung, 1995, hlm. 90)

ISRAEL DAN WILAYAH ARAB YANG DIDUDUKINYA



Sumber : *The Middle East and North Africa 1976 - 1977* (London, 1977), 61.

WILAYAH PERANG TELUK II (Agustus 1990 - Februari 1991)



Keterangan :

Konflik Irak - Kuwait akhirnya berkembang menjadi perang Irak - Koalisi anti Irak/
Pasukan Multinasional dibawah komando Amerika Serikat.



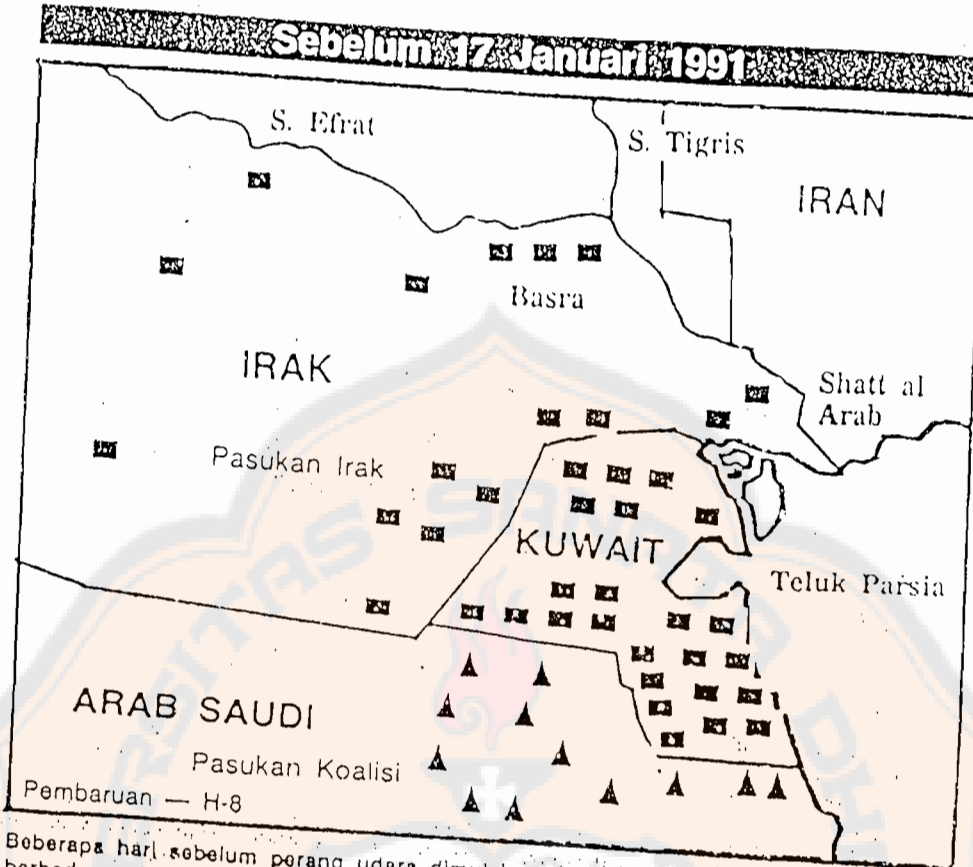
Wilayah Perang Teluk II

(Sumber : Atlas Dunia)

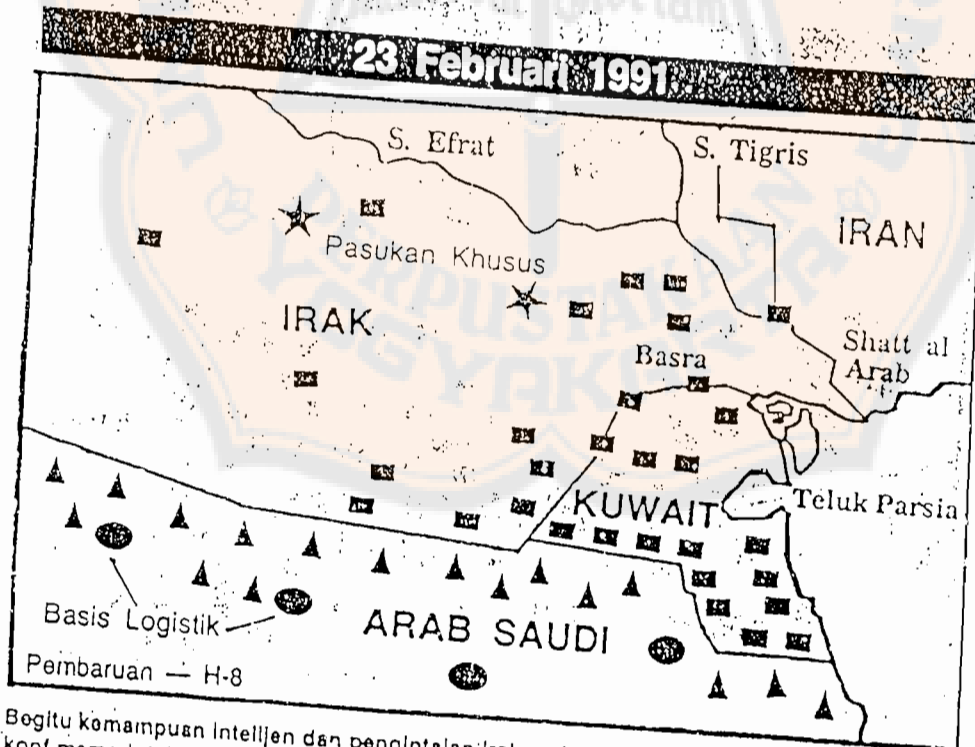
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

WILAYAH PERBESARAN PERANG TELUK II TAHUN 1990-1991

107

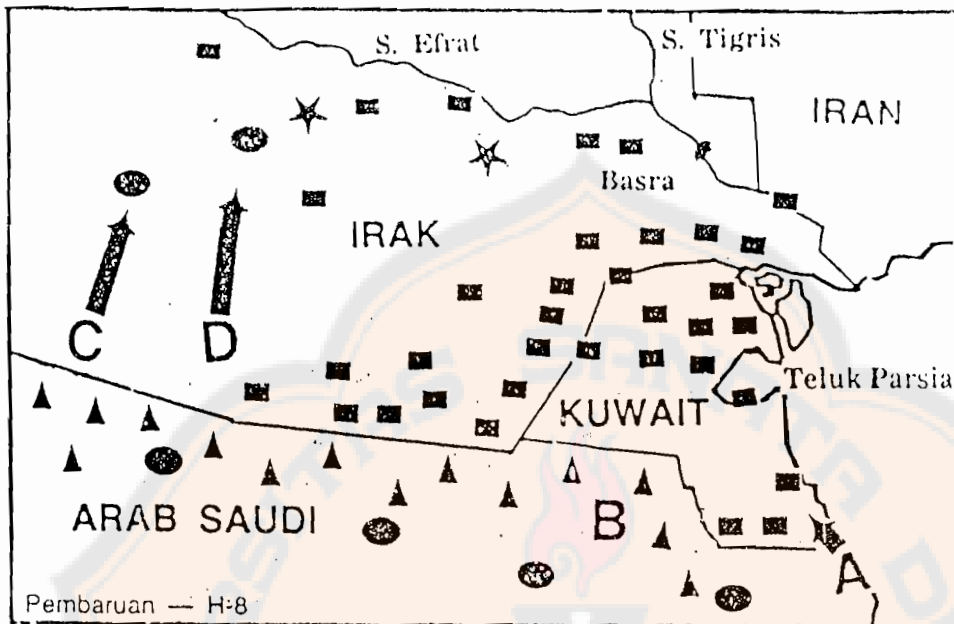


Beberapa hari sebelum perang udara dimulai, pasukan Irak dan koalisi multinasional berhadapan langsung di sepanjang perbatasan Kuwait - Arab Saudi. Pasukan-pasukan tersebut melakukan gerak seolah-olah koalisi nantinya akan menyerbu melalui perbatasan itu.



Begitu kemampuan intelijen dan pengintalan Irak sudah lumpuh, maka Jenderal Schwarzkopf memerintahkan pasukan-pasukan tempur untuk berpindah ke bagian barat (perbatasan Irak - Arab Saudi) yang lemah. Gerak pemindahan pasukan dan logistik dimulai sepuluh hari sebelumnya, dan semuanya harus dilakukan secara cepat tetapi sekaligus diam-diam. Pada 23 Februari pemindahan selesai, sementara itu pasukan-pasukan khusus (tanda bintang) ditempatkan di belakang lawan.

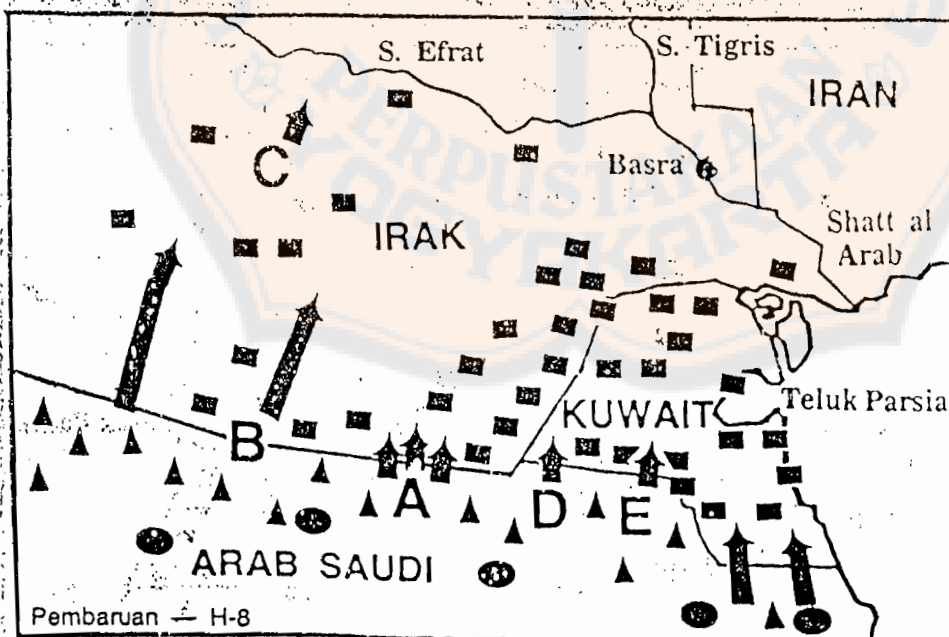
Pagi hari, 24 Februari 1991



Pada dinihari (pukul 04,00 waktu setempat) dua satuan tugas Arab Saudi (A) menerobos masuk garis pertahanan Irak, sementara itu dua divisi Korps Marinir AS (B) menyusuk masuk melalui wilayah yang sejak semula Irak menduga akan menjadi poros utama serangan.

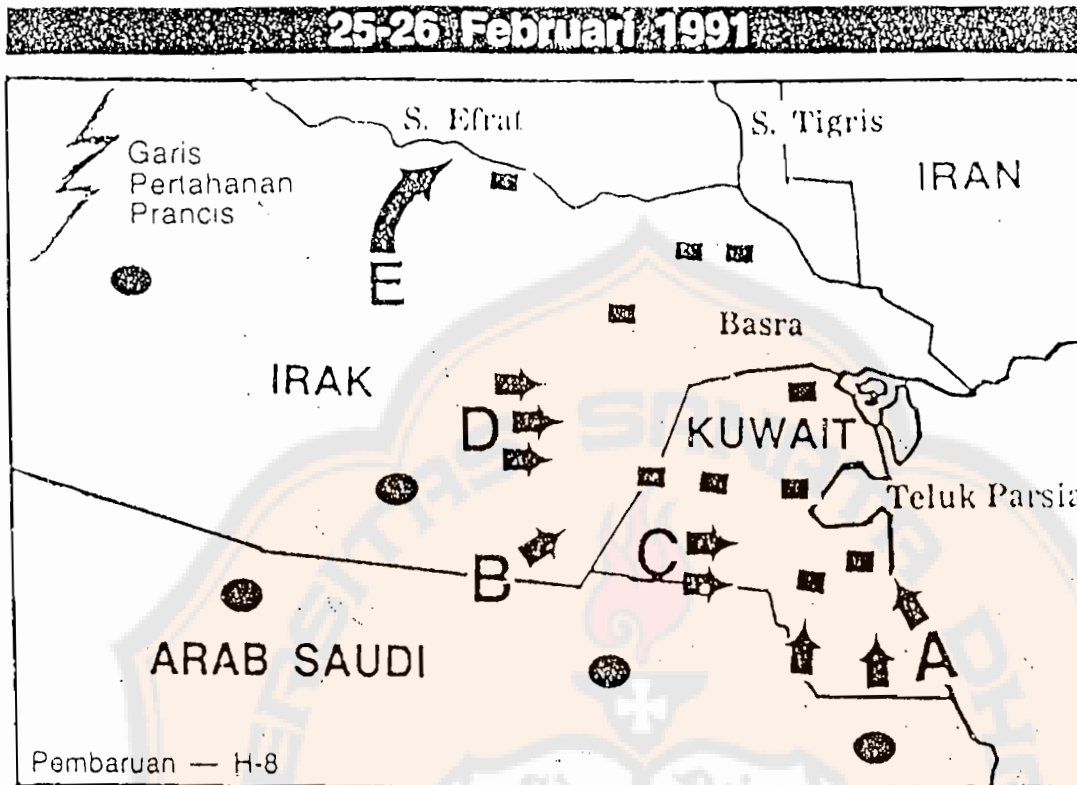
Tetapi kejutan terjadi di bagian barat: pasukan Perancis dibantu dari brigade dari Divisi Linud ke-82 (C) masuk melalui wilayah kosong dan menduduki pangkalan udara AS Salman, beberapa jam kemudian, Divisi Serbu Udara ke-101 dengan helikopter (D) masuk ke Irak dan mendirikan dua pangkalan logistik.

Siang hari, 24 Februari 1991



Kejutan masih berlangsung terus. Korps ke-7 AD-AS masuk ke wilayah Irak (A) dibantu Divisi Lapis Baja Inggris ke-1 ("Desert Rat"). Divisi Mekanis ke-24 (B) juga mematahkan pertahanan Irak di bagian baratnya, sementara Divisi ke-101 yang lincah dengan helikopter-helikopter menyusuk terus ke utara menuju Sungai Tigris-Euphrat.

Sore itu, satuan tugas Arab Saudi dipimpin Mesir (D) dan sebuah satuan tugas Arab Saudi lainnya (E) masuk ke Kuwait agak di sebelah timur.

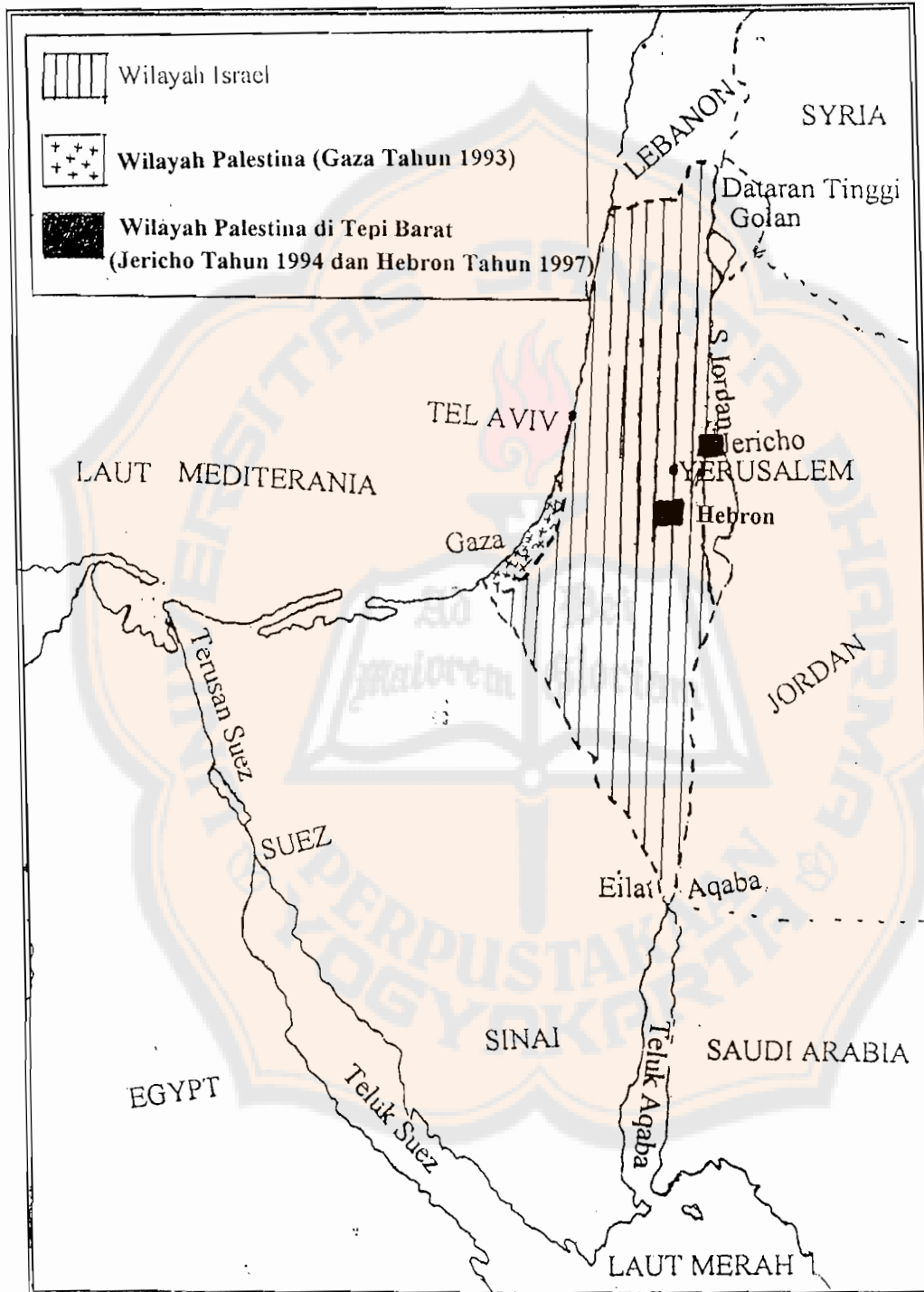


Pasukan Arab Saudi (A) bergerak menyusuri pantai ke utara, ke Kota Kuwait; sementara itu kapal-kapal angkut AL-AS mondar-mandir seolah bersiap melakukan pendaratan amfibi, ini membuat sedikitnya 10 Divisi AD-Irak tidak bisa meninggalkan tempatnya untuk membantu satuan lain yang terdesak.

Sementara itu, satuan tugas Inggris (B) bergerak ke timur diikuti oleh satuan Arab (C) dan Korps ke-7 (D). Pasukan dari Divisi ke-24 menuju jembatan di Sungai Euphrat, menghalangi usaha mundur Irak melalui jalan raya satu-satunya menuju Baghdad. Pasukan Prancis membentuk garis pertahanan di sebelah barat, bersiap kalau ada usaha bala bantuan Irak dari arah barat. Ini tidak pernah terjadi sampai perang darat 100 jam berakhir.

(Sumber : Suara Pembaharuan, Tahun 1991)

PETA WILAYAH PALESTINA SEJAK TAHUN 1993



Keterangan : Wilayah Lebanon Selatan sudah dikembalikan oleh Israel bulan Mei 2000.
Kota Yerusalem masih dalam perdebatan antara Palestina dan Israel.

KEKUATAN IRAK VS MULTINASIONAL

PERANG Teluk untuk membebaskan Kuwait antara pasukan multinasional pimpinan AS lawan pasukan Irak telah berakhir dengan dibebaskannya Kuwait. Di bawah ini adalah daftar negara beserta pasukan dan perlengkapan perangnya yang ambil bagian maupun langsung terlibat dalam perang Teluk.

Irak : 545.000 Tentara, 5.500 Tank tempur, 3.500 Senjata berat/artileri, 700 Pesawat tempur a.l. MIG-29 buatan Uni Soviet, Mirage buatan Perancis dan 17 Kapal perang.

Pihak Multinasional

1. **AS** : 527.000 Tentara (295.000 Tentara darat, 94.000 Marinir, 82.000 Angkatan laut, 56.000 Angkatan udara), lebih 100 Kapal perang a.l. Kapal induk, 1.800 Pesawat tempur dan pesawat pembom, 1.700 Helikopter dan 1.200 Tank.
2. **Inggris** : 43.000 Tentara, 170 Tank, 16 Kapal perang, 72 Pesawat tempur.
3. **Perancis** : 16.000 Tentara termasuk 2.000 Angkatan udara dan 2.000 Angkatan laut, 80 Pesawat tempur, 120 Helikopter anti-tank, 40 Tank.
4. **Turki** : 135.000 Tentara & para militer, 50 Tank, 50 Pesawat tempur F-16, 3 Kapal perusak, 2 Kapal selam, 1 Kapal penyapu ranjau dan 2 Kapal fregat, disiagakan di perbatasan Irak untuk jika perlu diterjunkan ke perang Teluk.
5. **Belgia** : 2 Kapal penyapu ranjau dan sebuah Kapal pemasok.
6. **Kanada** : 1.700 Tentara, 3 Kapal perang, 1 Skuadron pesawat tempur.
7. **Denmark** : Satu Korvet.
8. **Yunani** : 1 Fregat dengan 200 Tentara.
9. **Italia** : 3 Fregat, 1 Kapal amfibi dan 8 Pesawat tempur.
10. **Belanda** : Dua Fregat, sebuah Kapal pemasok dengan awak 600 orang.
11. **Norwegia** : Satu Kapal penjaga pantai.
12. **Spainol** : Satu Fregat dan 2 Korvet.
13. **Arab Saudi** : 118.000 Tentara (38.000 Angkatan darat, 56.000 para militer, 7.200 Angkatan laut dan 16.500 Angkatan udara), 550 Tank, 180 Pesawat tempur, 8 Fregat.
14. **Kuwait** : 20.300 Tentara, 275 Tank, 90 Artileri, 20 Pesawat tempur Mirage, 18 Helikopter.
15. **Mesir** : 40.000 Tentara.
16. **Emirat Arab** : 40.000 Tentara, 200 Tank, 80 Pesawat tempur, 1.500 Angkatan-udara, 15 Kapal, 1.500 Angkatan laut.
17. **Oman** : 25.500 Tentara, 63 Pesawat tempur, 4 Kapal perang.
18. **Siria** : 15.000 Tentara, 300 Tank.
19. **Maroko** : 1.300 Tentara.
20. **Bahrain** : 2.300 Tentara darat, 450 Tentara udara, 600 Tentara laut.
21. **Argentina** : 1 Fregat & 1 Korvet.
22. **Australia** : 600 Tentara (pria & wanita), 1 Kapal perusak, 1 Kapal fregat, 1 Kapal pemasok.
23. **Bangladesh** : 2.000 Tentara.
24. **Bulgaria** : 276 Tentara.
25. **Cekoslowakia** : 2.000 Tentara & Unit antisenjata kimia.
26. **Selandia Baru** : 2 Pesawat angkut Hercules.
27. **Nigeria** : 500 Tentara.
28. **Pakistan** : 11.000 Tentara.
29. **Polandia** : 2 Kapal penolong.
30. **Senegal** : 500 Tentara.
31. **Uni Soviet** : Dua Kapal perang.
32. **Rumania** : Tim Medis 360 orang, 180 Penasihat militer antisenjata kimia.
33. **Korea Selatan** : 5 Pesawat angkut militer C-130 dan 150 Pilot.
34. **Singapura** : 30 Perawat.

**KRONOLOGI PEMBENTUKAN
NEGARA PALESTINA DAN PERANG TELUK II**

- ◆ Abad ke-11 SM ada kerajaan di Palestina dibentuk oleh Suku Semit keturunan Arab dan Yahudi.
- ◆ 928 SM kerajaan terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan Yuda (Yudea).
- ◆ 722 SM Israel dihancurkan oleh Asiria.
- ◆ 625 SM Kerajaan Yuda direbut oleh kerajaan Babylonia dengan rajanya Nebukadnezar.
- ◆ 70 SM Yerusalem dihancurkan oleh Kerajaan Romawi.
- ◆ 638 Palestina dan Yerusalem direbut kerajaan Islam Arab di bawah pimpinan Khalifah Omar.
- ◆ 1517 Palestina dan Yerusalem dikuasai Islam Turki sampai Perang Dunia I.
- ◆ 1896 Theodor Herzl menulis artikel tentang Negara Yahudi.
- ◆ 1897 kongres Zionis I di Swiss untuk mendirikan negara Yahudi Palestina.
- ◆ 1913 kongres I Arab diprakarsai oleh tokoh kaum nasionalis Arab untuk mengusir Turki dari Dunia Arab.
- ◆ 1917 Inggris mengalahkan Turki dan dikeluarkannya Deklarasi Balfour.
- ◆ 1918 Inggris sah sebagai penguasa Palestina.
- ◆ 1923 PBB menyerahkan Palestina ke tangan Inggris.
- ◆ 1930-an proses pertumbuhan nasionalisme Palestina.
- ◆ 1935 berdirinya partai politik di Arab Palestina dan Lembaga Arab Tertinggi.
- ◆ 1936-1939 Revolusi Palestina menghadapi Zionisme Yahudi.
- ◆ 1940-an masalah Palestina menjadi masalah internasional dan 1947 masuk menjadi agenda PBB.
- ◆ 1948 Israel berdiri sebagai negara di Palestina (perang Arab-Israel berkobar).
- ◆ 1956 perang Arab-Israel (Israel menyerbu ke Mesir), menduduki Sinai dan Jalur Gaza.

- ◆ 1964 kongres I Palestina di Yerusalem Timur dan melahirkan organisasi pembebasan Palestina (PLO); KTT Arab di Kairo.
- ◆ 1967 konflik terbesar Arab-Israel selama 6 hari (5-10 Juni) menduduki seluruh Gurun Sinai Jalur Gaza, Jalur Timur Terusan Zues, wilayah Barat Yordania dan Dataran Tinggi Golan di Syria. Pada tahun yang sama markas PLO pindah ke Yordania dari Yerusalem.
- ◆ 1969 PLO mulai dipimpin oleh Yasser Arafat.
- ◆ 1970 PLO dipindahkan ke Lebanon.
- ◆ 1973 Konflik Arab-Israel : Mesir, Syria, Irak menyerang Israel bertepatan dengan hari suci orang Yahudi.
- ◆ 1974 Status PLO sebagai wakil sah Palestina dikukuhkan dalam KTT Arab di Rabbat dan oleh Majelis Umum PBB.
- ◆ 1976 Israel menguasai Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat Sungai Yordan, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai.
- ◆ 1979 penyerahan Semenanjung Sinai ke Mesir sesuai dengan persetujuan Camp David.
- ◆ 1980 Israel memindahkan pusat pemerintahan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
- ◆ 1980-1988 Perang Teluk I (perang Irak-Iran).
- ◆ 1983 markas PLO pindah ke Tunisia.
- ◆ 1987 muncul gerakan intifadah.
- ◆ 1988 Palestina memproklamasikan kemerdekaan (diakui secara de Jure 15 Nopember).
- ◆ 1990-1991 Perang Teluk II (berawal dari konflik Irak-Kuwait berkembang menjadi perang terbuka antara Irak dengan pasukan multinasional.
- ◆ 1991(30 Oktober) dimulai perjanjian damai Palestina-Israel di Madrid.
- ◆ September 1993 kesepakatan Oslo I dengan melahirkan Deklarasi Prinsip, yaitu rencana Otonomi Palestina di wilayah pendudukan.
- ◆ Mei 1994 Palestina Israel menandatangani kesepakatan yang memberikan otonomi I kepada Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Israel mentransfer kekuasaan ke PLO dan menyerahkan Yerico ke Palestina.

- ◆ Juli 1994 Yasser Arafat menjadi kepala Otoritas Palestina setelah Gaza diberi otonomi.
- ◆ Oktober 1994 diadakan penandatanganan perjanjian damai Israel-Yordania.
- ◆ September 1995 Kesepakatan Oslo II : PLO-Israel berunding untuk memperluas Otonomi Palestina sebagian besar Tepi Barat dan Suriah. Israel juga menyerahkan 6 kota di Tepi Barat ke Palestina.
- ◆ 26 Januari 1996 Pemilu I di Palestina dan Arafat dipilih sebagai presiden I Palestina.
- ◆ Mei 1996 Kesepakatan Oslo III. Perundingan diadakan di Taba (Mesir) menghasilkan Komunike Taba. Perundingan ini menuju penyelesaian damai permanen masa depan Yerusalem, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina menuntut kemerdekaan dan Yerusalem sebagai Ibukota.
- ◆ Mei 1999 lanjutan Kesepakatan Oslo III tentang status final Palestina.
- ◆ Awal 2000 beberapa perundingan damai dilakukan pemerintah Palestina-Israel tentang status final Palestina.
- ◆ September 2000 direncanakan Palestina memperoleh hak kemerdekaan (?)

12 Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Irak.

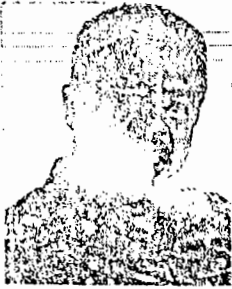
Semenjak Irak menyerbu Kuwait 2 Agustus 1990, 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan 12 resolusi. Resolusi terakhir nomer 678 menjadi alasan pembenaran Sekutu untuk menyerang Irak sehingga meletus Perang Teluk II. Pihak Amerika bersikeras agar Irak menaati semua resolusi tersebut sebagai syarat penghentian baku bunuh. Resolusi-resolusi tersebut pada intinya adalah :

- 1) Resolusi Nomer 660 : Dewan mengutuk invasi Irak atas Kuwait dan menuntut Baghdad supaya segera dan tanpa syarat menarik semua pasukannya pada posisi 1 Agustus 1990.
- 2) Resolusi Nomer 661 : Dewan menetapkan sanksi ekonomi ketat terhadap Irak, kecuali untuk kepentingan kemanusiaan.
- 3) Resolusi Nomer 662 : Dewan menyatakan bahwa aneksasi Kuwait tidak sah dan menuntut Irak memulihkan pemerintahan sah Kuwait.
- 4) Resolusi Nomer 664 : Dewan meminta Baghdad supaya mengizinkan warga asing meninggalkan Irak dan Kuwait serta membatalkan perintah penutupan misi diplomatik di Kuwait.
- 5) Resolusi Nomer 665 : Dewan mengizinkan negara-negara untuk menggunakan angkatan lautnya secara terbatas demi menjamin pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap Irak.
- 6) Resolusi Nomer 666 : Dewan menyetujui pengiriman makanan ke Irak dan Kuwait demi kemanusiaan, asalkan distribusinya dilakukan oleh badan-badan internasional yang disetujui.

- 7) Resolusi Nomer 667 : Dewan mengutuk serangan yang dilancarkan pasukan Irak terhadap misi diplomatik Perancis dan negara lainnya di Kuwait yang diduduki.
- 8) Resolusi Nomer 669 : Dewan membentuk sebuah komisi sekaligus prosedurnya untuk mengevaluasi permintaan bantuan dari negara-negara yang menderita akibat embargo perdagangan.
- 9) Resolusi Nomer 670 : Dewan melarang lalulintas udara dengan Irak dan Kuwait, kecuali karena alasan kemanusiaan.
- 10) Resolusi Nomer 674 : Berdasarkan hukum internasional Irak harus bertanggung jawab atas setiap kerugian, kerusakan dan korban di Kuwait serta negara-negara ketiga.
- 11) Resolusi Nomer 677 : Dewan meminta Sekjen PBB untuk mengamankan sebuah salinan daftar penduduk Kuwait sebelum invasi.
- 12) Resolusi Nomer 678 : Dewan memberi kekuasaan kepada negara-negara untuk menggunakan “segala sarana yang diperlukan” terhadap Irak jika tidak mundur dari Kuwait sebelum atau pada tanggal 15 Januari 1991 dan untuk “memulihkan perdamaian internasional di kawasan itu”.

(Sumber : Jakarta Jakarta No. 244, 2-8 Maret 1991)

17 Juli 1990



Saddam Hussein

Presiden Irak, Saddam Hussein menuduh Kuwait dan Uni Emirat Arab curang dalam memproduksi minyak. Tuduhan ini merupakan awal dari ketegangan di Teluk Persia. Menurut tuduhan Saddam, kedua negara ini memproduksi minyak, melebihi kuota yang ditetapkan OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak). Akibatnya, harga minyak jatuh dan Irak dirugikan 14 miliar dolar AS.

Irak mengancam akan menggunakan kekuatan militer, jika kedua negara ini tetap melanjutkan tindakannya yang merugikan Irak itu.

18 Juli

Majelis Permusyawaratan Rakyat Kuwait bersidang. Kemudian Kuwait mengirimkan utusannya ke Arab Saudi guna menjelaskan permasalahannya.

19 Juli

Menteri Luar Negeri Kuwait mengirim surat kepada Liga Arab, meminta agar Liga mengadili tuduhan Irak.

20 Juli

Kuwait menyiagakan tentaranya yang tak begitu banyak itu.

22 Juli

Menlu Irak berkunjung ke Kairo, Mesir untuk menjumpai Presiden Hosni Mubarak. Sementara itu tentara Irak sejumlah 30.000 prajurit mulai bergerak menuju perbatasan Irak - Kuwait.

24 Juli



Hosni Mubarak

Presiden Mubarak berkunjung ke Baghdad dan Kuwait, mencoba menengahi ketegangan antara Irak dengan Kuwait.

Dalam pertemuan OPEC di Jenewa, dicapai kesepakatan baru tentang Kuota produksi minyak.

26 Juli

Kesepakatan kuota OPEC yang baru ditandatangani di Jenewa. Kuwait dan Uni Emirat Arab, diminta mematuhi kesepakatan itu.

27 Juli

Senat AS menetapkan penghentian bantuan pertanian ke Irak dan larangan proses alih teknologi ke Irak sepanjang menyangkut pengetahuan amunisi dan persenjataan militer.

31 Juli

Irak dan Kuwait menandatangani perjanjian darurat secara rahasia di Jeddah. Dari Kuwait, tampil Putra Mahkota/PM Sheikh Saad al Abdullah al-Sabah sedang dari Irak, Izzat Ibrahim, Wakil Pemimpin Dewan Komando Revolusioner Irak Televisi Arab Saudi memperlihatkan, Saad merangkul Izzat Ibrahim.

Dalam pertemuan tersebut, Irak menyinggung masalah memorandum yang pernah disampaikan Irak kepada Liga Arab tanggal 15 Juli 1990. Dalam memo tersebut, Irak menuduh Kuwait dan Uni Emirat Arab melakukan sabotase terhadap perekonomian Arab dengan memproduksi lebih banyak minyak mentah dan menurunkan harga minyak. Kuwait dan Uni Emirat Arab, membantah tuduhan itu.

Sementara itu, sekitar 100.000 pasukan Irak digerakkan menuju perbatasan Irak - Kuwait.

1 Agustus

Pembicaraan antara wakil Irak dan wakil Kuwait gagal. Wakil Irak, Izzat Ibrahim, wakil ketua Dewan Komando Revolusioner Irak, meninggalkan Jeddah tanpa menentukan jadwal pertemuan kedua dengan perunding Kuwait, Putra Mahkota/PM Sheikh Saad al-Sabah.

2 Agustus

Tentara Irak, dinihari menyerbu Kuwait dan menguasainya. PBB dan sejumlah negara mengutuk tindakan tersebut dan meminta agar Irak menarik mundur pasukannya.

Amerika membekukan segenap aset Irak dan Kuwait yang ada di AS, serta menghentikan hubungan ekonomi dengan Irak.

3 Agustus



Ali Alatas

Menlu Ali Alatas menyatakan sangat terkejut dan menyekalkan terjadinya serangan Angkatan Bersenjata Irak terhadap Kuwait. Indonesia masih menunggu perkembangan lebih lanjut dan memantau terus perkembangan yang terjadi melalui laporan KBRI di Kuwait.

Sedangkan AS dan Uni Soviet sepakat untuk menyatakan kutukan secara bersama terhadap penyerbuan Irak ke Kuwait. Uni Soviet menunda penjualan senjata ke Irak. Senjata Irak, sebagian besar adalah buatan Soviet, termasuk hampir seluruh 5.500 tank-nya, sebagian dari rudal-rudalnya dan banyak di antara pesawat-pesawat udara tempurnya dan artileri.

3 Agustus

Liga Arab yang mengadakan pertemuan darurat di Kairo sangat mengutuk intervensi Irak ke Kuwait dan menuntut penarikan segera pasukan Irak dari wilayah yang didudukinya serta tidak akan mengakui sesuatu pun sebagai hasil serbuan itu. Sebanyak 14 dari 21 anggota Liga mendukung kutukan itu, sedang 6 lainnya abstain atau menolaknya. Ke-6 negara itu adalah: Sudan, Palestina, Yordania, Mauritania, Irak dan Yaman. Libia tak memberi suara.

Pernyataan ini, berarti Liga tetap mengakui Emir Kuwait, Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah sebagai pemimpin negara kaya minyak itu.

Pertemuan itu akhirnya menghasilkan pernyataan sebagai berikut:

1. Irak harus menarik mundur tentaranya dari wilayah Kuwait.

2. Irak harus menghentikan usahanya untuk mengganti pemerintahan di Kuwait secara paksa dan membiarkan masalah intern itu diputuskan sendiri oleh rakyat Kuwait secara bebas.

3. Kedua negara harus sepakat untuk menciptakan suatu prosedur guna mengatasi kericuhan mereka lewat perundingan.

Mesir, merupakan pengecualian pertama invasi itu disusul Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk (GCC) terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Kuwait.

4 Agustus

Masyarakat Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Irak. Kanada dan Jepang juga menerapkan embargo terhadap minyak Kuwait dan Irak. Penginderaan satelit menunjukkan Irak bukan menarik mundur pasukannya di Kuwait melainkan memperkuatnya.

Masyarakat Eropa sepakat untuk menghentikan impor minyak dari Irak dan melarang pengiriman senjata ke negara tersebut. Tahun lalu, Irak mengekspor lebih dari 30 juta ton minyak mentah ke pasaran Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

Reuter melaporkan, Rezim Saddam Hussein menembak mati 120 perwira militer yang menolak ambil bagian dalam menyerbu Kuwait dan menyebutkan penyerbuan itu tidak masuk akal dan tidak dibenarkan.

Eksekusi mati itu, menurut koran Mesir *Al Ahram*, dilakukan hari Jumat (3 Agustus) setelah Presiden Saddam menyetujui hukuman mati tersebut.

6 Agustus



Raja Fahd

Irak mengumumkan akan menarik mundur pasukannya dari Kuwait. Gelombang pertama yang akan ditarik mundur itu adalah tank-tank yang menyerbu Kuwait. Tapi Presiden AS, Bush membantah keterangan ini dan menuduh pemerintah Irak sebagai pembohong. "Tak ada bukti-bukti pasukan pendudukan Irak telah ditarik kembali!" kata Presiden Bush.

Raja Fahd dari Arab Saudi meminta bantuan luar negeri guna memperkuat pertahanannya untuk menghadapi kemungkinan serbuan Irak. AS mengirim satu skuadron F-15 ke Pangkalan Udara Arab Saudi dan pasukan Divisi Lintas Udara ke-82.

Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi guna penerapan sanksi ekonomi terhadap Irak dan Kuwait. Ratusan warga Barat di Kuwait ditangkapi dan dibawa ke Baghdad guna dijadikan sandera.

Presiden Irak, Saddam Hussein menegaskan, Irak tak akan mengembalikan Kuwait yang telah didudukinya.

7 Agustus

Presiden AS, Bush memerintahkan pengiriman pasukan ke Teluk Persia untuk melindungi Arab Saudi dari serbuan Irak. Operasi tersebut diberi nama Operasi Padang Pasir.

Swiss yang dikenal sebagai negara netral, buat per-

tama kali dalam sejarah mulai berpihak. Swiss ikut melaksanakan embargo terhadap Irak. Turki menutup aliran minyak Irak ke Mediteranian.

8 Agustus

Pemerintah Irak mengumumkan Kuwait menjadi bagian wilayahnya. Inggris mengirim tambahan pasukan laut dan udaranya guna membantu Arab Saudi. Sekitar 50 kapal perang AS, Inggris, Perancis berpatroli di Teluk atau berkumpul di wilayah itu. Salah satu tujuan, untuk memblokir setiap ekspor minyak Irak melewati laut.

9 Agustus

Dewan Keamanan PBB menegaskan, aneksasi yang dilakukan Irak sama sekali tak berdasar hukum.

Irak menutup semua pintu perbatasan dan melarang orang-orang asing meninggalkan negara itu. Hanya diplomat yang diperbolehkan meninggalkan Irak (dan Kuwait).

Irak meminta semua kedubes asing di Kuwait untuk memindahkan operasi mereka ke Baghdad dalam waktu 2 minggu dan menunda pembayaran utang sebesar miliaran dolar kepada Kuwait. Sekitar 65 negara, termasuk Irak, mempunyai kedutaan di Kuwait.

Dewan Keamanan PBB menolak aneksasi Kuwait oleh Irak dan meminta Baghdad menyerahkan negara kecil itu kepada pemerintah yang lama. Yaman, sekutu Irak dan satu-satunya negara Arab di Dewan Keamanan menyuarakan pendapatnya dan meminta Irak membatalkan aneksasinya atas Kuwait.

Tidak terdapat reaksi segera dari Presiden Irak Saddam Hussein yang telah mengumumkan bahwa penggabungan itu bersifat "kekal dan tak terpisahkan!"

Iran yang pernah berperang lawan Irak selama 8 tahun, memperingatkan Irak, bahwa Teheran "tidak akan mentolerir" tindakan pencaplokan Baghdad terhadap Kuwait, demikian kantor berita Iran, *IRNA*. Iran mengimbau agar Irak segera melakukan penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait.

10 Agustus

Pada pemimpin negara-negara Arab (Liga Arab) yang moderat mengeluarkan kecaman baru terhadap Irak dan sepakat menggerakkan suatu kekuatan Arab guna mempertahankan Arab Saudi terhadap ancaman Irak. Sebanyak 12 negara telah memberikan suara untuk resolusi itu, sementara Irak, Libia dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menentangnya.

Aljazair dan Yaman tidak memberi suara, sementara Sudan, Yordania, Mauritania menyatakan mereka mempunyai syarat-syarat tertentu.

Sementara itu, Irak mengumumkan Perang Jihad terhadap AS dan Israel.

11 Agustus

Australia akan mengirim 2 kapal fregat dan kapal perlengkapan ke Timur Tengah, demikian keputusan Perdana Menteri Bob Hawke setelah dihubungi per telepon oleh Presiden AS, Bush. Keputusan Hawke untuk mengirim 3 kapal perang itu merupakan kesediaan negara non-Eropa pertama dan menambah jumlah kapal perang di Teluk Persia menjadi 60 buah kapal perang.

Pasukan Mesir dan Maroko mulai mendarat di Arab Saudi.

12 Agustus

Komandan pasukan AS di Timur Tengah, Jenderal H. Norman Schwarzkopf (Panglima Komando Pusat = *US Central Command*) dari AS mengatakan, penempatan pasukan AS di Arab Saudi berjalan sesuai dengan rencana dan Irak "akan membayar mahal jika menyerang Arab Saudi!"

Schwarzkopf memimpin pasukan AS di Timur Tengah dengan markas di Florida dengan markas pusat komando di Arab Saudi. Tapi ditegaskan bahwa markas besar utama secepatnya akan dibentuk di Arab Saudi dan Schwarzkopf sendiri yang akan memimpin. Dari meja komandonya Schwarzkopf punya hubungan langsung dengan Menteri Pertahanan Dick Cheney, Ketua Gabungan Kepala Staf, Jenderal Colin Powell dan setiap komandan militer AS di seluruh dunia.

Presiden Saddam Hussein berjanji akan menarik pasukannya dan membebaskan Kuwait, jika Israel mundur dari Jalur Gaza serta Tepi Barat, serta Syria mundur dari Libanon.

Sebaliknya Presiden AS, Bush menolak tegas tuntutan Presiden Saddam Hussein yang mengaitkan invasi Irak ke Kuwait dengan persengketaan Israel - Arab dan konflik di Libanon, demikian juru bicara Gedung Putih, Marlin Fitzwater dalam surat pernyataan tertulis.

Saddam mengaitkan pengunduran Irak dari Kuwait dengan pengunduran secepatnya Israel dari wilayah-wilayah yang didudukinya di Palestina, Syria dan Libanon. Saddam juga menuntut penarikan mundur 40.000 pasukan Syria dari Libanon dan sejumlah tentara yang dikirim ke Arab Saudi atas permintaan Raja Fahd yang cemas terhadap konsentrasi sekitar 120.000 pasukan Irak di Kuwait.

13 Agustus

AS akan mengirim kapal induk ke-4, USS John F. Kennedy ke kawasan Timur Tengah dan menegaskan bahwa blokade laut terhadap Irak akan didukung dengan tembakan-tembakan armadanya di Teluk, apabila diperlukan. Kapal induk itu membawa 80 pesawat dan berangkat dari pangkalannya di Norfolk, Virginia.

Belanda dan Pakistan bersedia ikut berpartisipasi dalam membantu pasukan gabungan multinasional.

14 Agustus

Kapal-kapal perang Inggris mulai melakukan pengecatan terhadap lalu lintas kapal dari dan ke Irak. Kapal-kapal perang AS melakukannya dua hari kemudian.

19 Agustus

Presiden Saddam Hussein menyatakan bersedia membebaskan semua sandera, asal Presiden Bush membuat pernyataan tertulis akan menarik seluruh pasukan AS dari Arab Saudi dan embargo dihentikan.

AS menolak tawaran Presiden Saddam tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Marlin Fitzwater menjelaskan, proposal Irak sama sekali tidak menyinggung seruan PBB dan Liga Arab agar Irak menarik diri dari Kuwait.

Iran dan Irak sepakat untuk menambah jumlah tawanan perang yang dibebaskan di bawah prakarsa perdamaian Perang Teluk, yaitu dari 1.000 orang pada pihak masing-masing setiap hari, menjadi 8.000 orang. Palang Merah mencatat nama 17.000 tawanan perang

Iran dan 50.000 prajurit Irak yang tertawan, tapi ditambahkan mungkin masih ada 15.000 tawanan Iran lain dan juga 20.000 dari keturunan Irak.

19 Agustus

Irak mengabaikan permintaan Yordania untuk mengurangi banjir pengungsi Arab dan pekerja-pekerja Asia dari wilayah Irak dan Kuwait ke Yordania. Yordania meminta Irak untuk membatasi hingga 5.000 pengungsi perhari melintasi perbatasan, agar menyediakan para petugas di Yordania mengatur mereka dan menyediakan tempat penampungan. Namun Irak tidak menanggapi imbauan ini. Menurut petugas-petugas perbatasan, pada hari Minggu sejumlah 13.000 pengungsi melintasi perbatasan.

20 Agustus

Pemerintah Irak mengumumkan, warga negara Indonesia akan diizinkan meninggalkan negeri itu karena keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak mengirim pasukan ke Arab Saudi.

Irak hari Minggu 19 Agustus 1990 berjanji akan membebaskan warga negara yang negaranya mengamobil sikap netral dalam krisis Teluk dan memperingatkan akan menghukum negara-negara yang agresif dengan menggunakan warga mereka sebagai tameng hidup terhadap serangan. Tidak diketahui berapa jumlah orang Indonesia yang berada di Kuwait dan Irak. Sekitar 21.000 orang Barat terperangkap pada saat Irak menyerbu Kuwait tanggal 2 Agustus 1990. Ini termasuk 3.000 warga AS dan 4.000 warga Inggris.

20 Agustus

Presiden AS, Bush mengatakan Irak mengirim sandera orang-orang Barat ke instalasi-instalasi penting untuk dijadikan perisai hidup guna menangkalkan kemungkinan serangan.

Pemimpin Libia Muammar Khadafi mengutuk Irak atas penggunaan orang asing sebagai sandera dalam krisis Teluk. "Saya menentang penggunaan orang sipil dan pekerja sebagai sandera. Ini merupakan masalah prinsip," kata Khadafi kepada pers.

Pemimpin Libia itu juga mengecam Arab Saudi karena mengundang pasukan AS untuk membantu mempertahankan negaranya terhadap kemungkinan serangan Irak. Ia mengatakan, keputusan tersebut melanggar Piagam Liga Arab.

Lebih dari 100.000 tentara AS sudah berada atau dalam perjalanan ke Arab Saudi, Mesir, Maroko, Suriah, Bangladesh dan Pakistan juga mengirimkan pasukan.

21 Agustus

AS menolak tawaran terbaru Irak untuk merundingkan penyelesaian krisis Teluk. Juru bicara Gedung Putih, Marlin Fitzwater mengatakan, pesan Presiden Irak Saddam Hussein lewat televisi yang mengajak Presiden Bush supaya meneari penyelesaian damai atas krisis Teluk, atau menghadapi bahaya terjadinya bencana global, tak banyak berbeda dengan ocehan sebelumnya.

Penguasa Irak memberitahu para Dubes negara-negara Barat bahwa warga negara dari 7 negara anggota Masyarakat Eropa yang berada di Kuwait diizinkan untuk pergi, demikian seorang pejabat Kementerian

Luar Negeri Italia. Yang akan dibebaskan adalah warga negara Italia, Belgia, Spanyol, Denmark, Belanda, Irlandia dan Yunani. Mereka diizinkan meninggalkan Kuwait lewat Yordania dan Turki.

Pemerintah AS mulai melakukan mobilisasi guna memperoleh tambahan pasukan cadangan. Seorang pejabat Pentagon menjelaskan, pemanggilan itu bisa melibatkan sekitar 40.000 prajurit pada tahap pertama.

24 Agustus

Kedutaan Besar AS dan sejumlah kedutaan negara-negara Barat yang ada di Kuwait, tidak mau pindah ke Baghdad.

25 Agustus

Dewan Keamanan PBB mengizinkan penggunaan kekuatan tentara guna menegakkan pelaksanaan sanksi ekonomi.

26 Agustus

Kapal tempur (*battleship*) AS, USS Wisconsin tiba di Teluk setelah berlayar dengan kecepatan tinggi dari Laut Tengah sejak 2 Agustus yl.

Wisconsin adalah satu-satunya kapal perang AS di Teluk yang mampu meluncurkan peluru kendali jelajah (*Cruise missile*) jenis Tomahawk ke arah Kuwait atau Irak sampai sejauh 700 km. Kapal tempur itu juga satu-satunya kapal di Teluk, bahkan di dunia, yang mampu meluncurkan peluru seberat mobil sedan hingga sejauh 39 km dan meratakan bangunan apa saja yang dijadikan sasaran.

Kapal-kapal perang AS lainnya di Teluk Persia ditugaskan untuk melaksanakan blokade total.

27 Agustus

Presiden George Bush mengatakan ia tidak punya dasar berkompromi dengan Irak untuk menyelesaikan krisis Teluk, walaupun terdapat berbagai usaha diplomatik.

Bush menyambut baik usaha diplomatik Sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar untuk bertemu dengan Menlu Irak, Tareq Aziz di Amman, Yordania. Tapi dia akan menentang setiap langkah Sekjen PBB yang menuju kompromi dalam soal tuntutan AS dan PBB, mengenai mundurnya Irak dari Kuwait, pemerintah Emir Kuwait dipulihkan dan semua orang asing yang berada di Irak dan Kuwait dapat bebas pergi. "Kami akan menentang setiap kompromi atas hal-hal tersebut yang merupakan prinsip dasar PBB," tambahnya.

28 Agustus

Saddam Hussein mengatakan Kuwait menjadi provinsi ke-19 dari Republik Irak. Dijanjikan, sandera anak-anak dan wanita akan dibebaskan.

30 Agustus

Irak mulai memindahkan para sandera wanita dan anak-anak dari berbagai instalasi yang mungkin menjadi sasaran perang di Baghdad dan mempersiapkan mereka untuk dipulangkan.

Menurut kantor berita Arab, INA, 237 wanita dan anak-anak warga asing, akan meninggalkan berbagai pangkalan dan instalasi sipil, di mana mereka disekap sebagai "tamu-tamu" paksaan.

1 September

Setelah menghabiskan 40 miliar dolar AS (Rp 74 triliun) guna membantu Irak memerangi Iran, Arab Saudi dan sekutunya di Teluk kini harus menyediakan dana yang lebih besar untuk menahan agresi Irak.

Menurut *Washington Post*, para pejabat AS merencanakan untuk menyediakan lagi sejumlah 24 pesawat F-15 awal tahun 1991 sebagai bagian dari perjanjian perdagangannya senilai 6,8 miliar dolar AS.

Pemerintah AS telah mendesak untuk segera mengirimkan 2.000 senjata anti tank TOW dan 1.100 kendaraan bersenjata yang telah dipesan lebih dulu oleh Riyadh dalam satu paket seharga 4 miliar dolar AS.

4. September

Presiden Abdou Diouf dari Senegal menyatakan ikut bergabung mendukung pasukan multinasional.

10 September

Presiden AS, Bush dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengingatkan Irak, bahwa kedua negara adikuasa itu akan bertindak lebih keras jika pasukan Irak tak ditarik dari Kuwait.

17 September

Uni Soviet dan Arab Saudi membuka kembali hubungan diplomatik yang terputus selama 52 tahun.

Setidaknya 12 negara Eropa mengusir atase militer Irak dari wilayah mereka, sebagai pembalasan terhadap tindakan pasukan Irak yang memasuki kedutaan mereka di Kuwait.

22 September

Harga minyak dunia mencapai titik tertinggi dalam sembilan tahun terakhir.

23 September

Saddam Hussein mengancam akan menyerang ladang minyak Arab Saudi, jika Irak mengalami kesulitan ekonomi akibat embargo dunia.

25 September

Dewan Keamanan PBB membolehkan lalu lintas barang via udara, khusus bagi keperluan kemanusiaan.

3 Oktober

Organisasi Konferensi Islam dalam pertemuan di PBB, mengutuk invasi Irak.

23 Oktober

Bazar sandera berlangsung di Baghdad, Sekitar 400 sandera warga Perancis dan 33 warga Inggris akan dilepaskan Irak. Utusan khusus dari berbagai negara mulai berdatangan ke Baghdad, merundingkan pelepasan warga mereka yang dijadikan sandera.

26 Oktober

Direktur CIA (*Central Intelligence Agency*) William Webster, mengatakan keamanan di Teluk Persia tak akan terjamin, selama Saddam Hussein masih berkuasa di Irak.

27 Oktober

Dibentuk Partai Ummah, oposisi, yang meliputi 17 organisasi politik Irak yang berkedudukan di luar negeri. Partai tersebut menentang kebijaksanaan Saddam.

5 November

Arab Saudi setuju pasukan AS dikomandoi oleh perwira AS, jika kekuatan militer gabungan digunakan dalam penyerangan terhadap Irak.

7 November

Sekitar 74 sandera warga Jepang dibebaskan. Irak menjanjikan akan membebaskan 120 sandera lagi, sebagian besar di antaranya adalah warga Jerman.

18 November

Presiden Saddam Hussein memecat Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Nizar Khazraji, yang dianggap membangkang terhadap sikap Irak menguasai Kuwait.

Presiden Bush memerintahkan dimulainya pemberangkatan 200.000 orang pasukan tambahan ke Teluk Persia. Jumlah pasukan AS di Teluk Persia akan menjadi 430.000 orang.

19 November

Irak mengatakan akan menambah kekuatan pasukannya yang ada di Kuwait, sehingga menjadi 600.000 orang.

20 November

Seluruh sandera warga Jerman dibebaskan.

22 November

Presiden Bush mengunjungi pasukan AS dan tentara multinasional di Arab Saudi.

27 November

Tercatat 4.162 pencegahan lalu lintas laut dilakukan oleh pasukan multinasional di Teluk Persia.

28 November

Penentangan terhadap pendirian Bush di dalam negeri meningkat. Dua mantan panglima angkatan bersenjata AS, Jenderal (purn) David C. Jones dan Marsekal (purn) William J. Crowe mengungkapkan pendapat mereka di hadapan Kongres AS. Isinya, meminta agar AS menghindari penggunaan kekuatan militer dan agar batas waktu sanksi ekonomi diperpanjang.

29 November

Presiden Bush mengusulkan perundingan dengan Irak, ia merencanakan mengundang Menteri Luar negeri Irak, Tareq Aziz ke Washington 17 Desember dan meminta Saddam Hussein segera mengundang Menlu AS James Baker ke Baghdad. Pihak Baghdad menyambut hal itu dengan dingin.

30 November

Dewan Keamanan PBB menerbitkan ketetapan Nomor 678. Memerintahkan agar Irak menarik mundur pasukannya dari Kuwait serta mematuhi segenap ketentuan yang ditetapkan PBB selambat-lambatnya 15 Januari 1991. Jika Irak membangkang, maka Irak akan dikenai tindakan lain yang dianggap perlu. Ketetapan itu, diterjemahkan oleh pihak AS dan sekutunya sebagai izin penggunaan kekuatan militer jika Irak tak mau mematuhi ketentuan PBB sampai 15 Januari 1991.

6 Desember

Saddam Hussein meminta agar Parlemen Irak membebaskan semua sandera.

8 Desember

Pemerintah Irak menjadwalkan menerima kunjungan Menlu Baker 12 Januari 1991, sebagai jawaban atas kemungkinan diterimanya Menlu Tareq Aziz oleh Bush 17 Desember. Pihak AS meminta agar pertemuan Baker-Saddam Hussein diselenggarakan selambat-lambatnya 3 Januari 1991.

19 Desember 1990

Deputi Panglima AS di Teluk Persia, Letjen Calvin Waller menegaskan, pasukan AS tak akan siap melakukan serangan sebelum 15 Januari 1991.

3 Januari 1991

Presiden Bush menawarkan kemungkinan pertemuan antara Menlu Baker dengan Menlu Aziz di Jenewa.

4 Januari

Tawaran diterima oleh pihak Irak. Baker dan Aziz akan bertemu di Jenewa 9 Januari 1991.

6 Januari

Menlu AS, Baker berangkat keliling Eropa dan Timur Tengah, ia membawa surat pribadi Bush untuk Presiden Saddam Hussein.

8 Januari

Presiden Bush minta agar Kongres mendukung sikapnya dalam penyelesaian krisis Teluk Persia. Sedang Baker bertemu dengan Presiden Francois Mitterrand di Paris.

9 Januari

Pertemuan Baker-Aziz di Jenewa berakhir buntu. Menlu Aziz tak bersedia menyampaikan surat Bush kepada Saddam Hussein. Alasannya, bahasa surat itu tak sopan.

12 Januari

Kongres AS melalui pemungutan suara yang sengit, akhirnya memberi wewenang kepada Presiden Bush guna memanfaatkan kekuatan militer dalam rangka menegakkan ketetapan PBB pada krisis Teluk Persia.

13 Januari

Sekretaris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar, berkunjung ke Baghdad dan berjumpa dengan Saddam Hussein.

14 Januari

Perez de Cuellar melaporkan kunjungannya dalam sidang PBB. Muncul beberapa konsep guna menengahi pertikaian. Perancis mengusulkan agar permintaan Irak tentang penarikan kekuatan Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta kekuatan Syria dari Libanon, dipertimbangkan dulu. Pihak non-blok mengusulkan saran serada. Sebaliknya, Inggris dan AS yang juga didukung oleh Uni Soviet mengatakan, Irak harus diserang jika melanggar batas waktu yang telah ditetapkan PBB.

15 Januari

Sekjen PBB, beberapa jam sebelum batas waktu berakhir, mengimbau agar Irak menarik mundur pasukannya dari Kuwait dan mematuhi ketentuan PBB. Ia menjamin, Irak tak akan diserang jika segera menarik mundur pasukannya.

Pihak Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan pertemuan.

16 Januari

Ada pihak yang khawatir Dewan Keamanan PBB berubah haluan dan memperpanjang batas waktu bagi Irak menarik mundur pasukannya dari Kuwait.

17 Januari

Perang dimulai. Pasukan multinasional yang dipelopori AS, mulai menyerang Irak dan membom tempat-tempat militer strategis yang ada di Irak maupun Kuwait.

18 Januari

Serangan pasukan udara AS dan Inggris serta pasukan multinasional dilanjutkan. Beberapa sasaran strategis, berupa tempat-tempat peluncuran rudal Scud milik Irak, dihancurkan dalam penyerangan tersebut.

Pesawat-pesawat tempur AS, Arab Saudi dan Inggris kembali melancarkan serangan untuk menghancurkan sasaran yang lolos pada serangan sebelumnya. AS dan Arab Saudi menggunakan pesawat F-15 dan Inggris menggunakan pesawat Tornado dalam *Operasi Badang Padang Pasir*.

19 Januari

Tujuh sampai 10 gelombang serangan udara yang dilancarkan pesawat tempur dan pembom AS selama 3 hari akhir pekan dari pangkalan strategis Incirlik di Turki Selatan, terhadap pusat persenjataan kimia, peluru kendali mobil dan sasaran militer lainnya di Irak Utara dan Barat.

Konvoi udara terdiri dari 38 jet tempur dan pembom F-15, F-16 dan F-111A berlangsung pada dini hari Jumat, Sabtu dan Minggu dengan misi utama menghancurkan peluncur rudal penarget Israel. Penggunaan pangkalan oleh pesawat-pesawat AS, telah disetujui parlemen Turki dengan 250 suara setuju dan 148 suara menentang.

Pihak Irak membalas dengan meluncurkan tujuh peluru kendali Scud ke Tel Aviv dan Haifa di Israel, sebagaimana yang pernah dikemukakannya dalam ancaman menghadapi kemungkinan serangan AS dan sekutunya. Rudal Scud lainnya yang ditembakkan ke Arab Saudi Timur, dihancurkan oleh rudal anti-rudal Patriot yang ditembakkan dari pangkalan AS di padang pasir.

Dari Washington diberitakan, Presiden Bush berjanji pada Israel bahwa AS akan membalas tindakan Irak tersebut.

21 Januari

Irak menembakkan 10 rudal Scud - B ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh, kl. 600 km dari perbatasan Irak. Namun, 9 rudal berhasil disergap oleh misil Patriot dan satu dibiarkan jatuh di laut, demikian jurubicara Angkatan Udara AS. Ini adalah pertama kali Irak menyerang ibu kota Arab Saudi. Sebelumnya, Irak melancarkan 2 kali serangan Scud-B ke Israel dan juga ke kota Dhahran di bagian Timur Kuwait.

22 Januari

Pernyataan ini berarti bahwa harapan Baghdad akan terjadinya perang Irak-Israel dengan perspektif perang.

Pemerintah Syria menegaskan, Damaskus tidak akan berbalik dan berpihak pada Baghdad jika Israel terlibat dalam Perang Teluk.

Arab-Israel guna mengalahkan koalisi multinasional belum terpenuhi.

Pernyataan ini, mungkin merupakan hasil pembicaraan George Bush-Hafid el-Assad sebelum Perang Teluk pecah. Inti pembicaraan antara kedua kepala negara AS dan Syria, belum diketahui.

23 Januari

Sebuah peluru kendali Scud Irak lolos dari sergapan rudal Patriot di wilayah udara Israel dan menghantam kawasan perumahan di Tel Aviv, mengakibatkan 77 orang luka-luka dan 3 lainnya meninggal.

Menhan Israel, Moshe Arens mengatakan, Israel akan membalas serangan rudal Irak dan tidak memerlukan izin AS untuk melakukannya.

AS menyerukan kepada Raja Hussein dari Yordania untuk tetap netral dalam Perang Teluk, demikian juru bicara Gedung Putih, Marlin Fitzwater. Yordania terletak antara Israel dan Irak.

26 Januari

Tujuh pesawat Irak mendarat di wilayah Iran, menimbulkan spekulasi semakin besarnya pertikaian di tubuh Angkatan Udara Irak pada saat koalisi multinasional meningkatkan serangan udara terhadap Irak. Pentagon menyebut, jumlah pesawat Irak yang terbang ke Iran berjumlah 24 buah.

Seorang pejabat Iran mengatakan, setiap pesawat asing yang mendarat di Iran akan ditahan sampai perang selesai.

29 Januari

Pemerintah Jerman yang mendapat kritikan keras dari para sekutunya karena hanya berperan kecil dalam konflik militer di Teluk, menyatakan pihaknya akan memberi bantuan tambahan sebesar 5,5 miliar dolar AS kepada pasukan multinasional di Teluk.

Juru bicara pemerintah, Dieter Vogel mengatakan, bantuan sebesar 5,5 miliar itu merupakan sumbangan Jerman dalam kurun waktu tiga bulan pertama 1991.

30 Januari

Sekjen PBB, Perez de Cuellar menolak tuduhan Irak bahwa PBB dan Dewan Keamanan bertanggung jawab atas perang Teluk.

Menlu Irak Tareq Aziz mengirim surat kepada Perez bertanggal 24 Januari 1991 yang mengatakan "Anda pribadi (Perez) memikul tanggung jawab atas sejarah dan umat manusia karena kejahatan-kejahatan keji yang dilakukan terhadap rakyat Irak yang tengah bertempur demi kemerdekaan mereka".

Aziz mengancam keras Sekjen PBB bersama 12 negara anggota Dewan Keamanan yang memvoting resolusi 29 November 1990 yang mengesahkan penggunaan kekuatan militer di Teluk.

Perez menjawab melalui surat pula a.l. bahwa usaha kami untuk menghindari tragedi terbuka akan gagal, kecuali Irak dapat menyatakan kesediaannya untuk mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan.

Resolusi tersebut mengimbau penarikan mundur seluruh tentara Irak dari Kuwait yang diserbunya tanggal 2 Agustus 1990 dan pemulihan kekuasaan pemerintahan negeri itu.

Perez juga telah menjanjikan pada Saddam Hussein, bahwa seandainya Irak mau bekerja sama, Perez akan berusaha keras untuk mewujudkan perdamaian abadi di seluruh kawasan Timur Tengah, yang merupakan tuntutan utama Saddam Hussein.

31 Januari

Pasukan darat terdiri dari 2 batalion dan sejumlah tank T-55 Irak, sejak pagi menduduki kota Khafji di Arab Saudi, 20 km dari perbatasan Saudi-Kuwait.

Tapi Radio Baghdad mengatakan, Irak tidak punya maksud untuk menduduki wilayah Arab Saudi tersebut.

Ini adalah pertama kali pasukan Irak melakukan gerakan darat ke wilayah Arab Saudi, walaupun para ahli menduga sifatnya hanya merupakan penyerangan penjahagan belaka.

1 Februari



John Major

Radio Baghdad menyiarkan bahwa Irak akan menghukum Presiden AS George Bush dan para pemimpin Perancis, Inggris dan Arab Saudi, karena mereka memerintahkan para penerbang Sekutu membunuh penduduk sipil Kuwait/Irak.

Menurut radio itu, Presiden Bush, Perdana Menteri John Major, Presiden Francois Mitterrand dan Raja Fahd harus bertanggung jawab atas tewasnya para warga sipil, karena serangan udara dan para penerbang yang tertawan akan diperlakukan sebagai penjahat perang.

5 Februari

Tentara Syria, untuk pertama kalinya terlibat pertempuran dengan pasukan Irak yang mencoba melintasi perbatasan Arab Saudi - Irak demikian seorang jurubicara militer Arab, Kolonel Ahmed al-Robayan.

Menurut Kolonel itu, sekitar 30 prajurit Irak mencoba melintasi perbatasan dan masuk Arab Saudi sebelah utara, tapi dipukul mundur oleh tembakan artileri Syria. Artileri Syria, memaksa pasukan Irak mundur. "Kami percaya, ini adalah pertempuran pertama bagi satuan Syria di dalam perang ini," ujar Kolonel Robayan.

Menurut Damaskus, para prajurit Syria (sekitar 20.000 pasukan dan beberapa ratus tank) di Arab Saudi akan digunakan hanya untuk mempertahankan kerajaan tersebut, bukan untuk tujuan-tujuan ofensif.

6 Februari



James Baker

Irak memutuskan hubungan diplomatik dengan 6 negara yang tergabung dalam koalisi multinasional. Ke-6 negara itu adalah, AS, Inggris, Perancis, Italia, Mesir dan Arab Saudi.

Pesawat-pesawat tempur dari negara-negara tersebut, kecuali Mesir, telah membom Irak sebagai bagian dari perang udara sejak 17 Januari yl. Hampir semua dari ke-6 negara tersebut telah menarik para diplomatnya dari Baghdad dan meminta Irak mengurangi jumlah diplomatnya di masing-masing negara.

Sejumlah 95 pesawat tempur dan 25 pesawat transport Irak kini berada di Iran, artinya seluruhnya berjumlah 120 pesawat berada di Iran. Iran berjanji, akan menahan semua pesawat tersebut, sampai perang berakhir.

Sementara itu, Menlu AS, James Baker menaksir, biaya perang yang telah dikeluarkan Sekutu sampai kuartal I tahun 1991 berkisar 51 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 98 triliun.

Anggaran yang diperlukan selama tahun 1990 oleh pihak Sekutu berkisar 9,7 miliar dolar. Sedang tambahannya dalam kuartal pertama tahun 1991 ini berkisar 41 miliar dolar AS.

9 Februari

Persoalan Perang Teluk makin meluas dari hari ke hari, sasarannya melebihi dari mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB, kata Archbishop Aram Keshishim, pemimpin Gereja Apostolik Armenia dari Libanon, dalam konferensi pers pada Sidang Raya Dewan Gereja se-Dunia di Canberra, Australia.

Target Perang Teluk sudah beralih dari usaha penarikan mundur tentara Irak dari Kuwait, ke arah penghancuran masyarakat Irak, pelumpuhan persenjataan Irak, penguasaan sumber minyak serta peningkatan pengaruh militer dari pihak tertentu di Kawasan Teluk.

Archbishop Aram menegaskan, Perang Teluk bukan konflik antara umat beragama, melainkan semata-mata konflik kepentingan politik dan militer. Konflik ini timbul karena ada suatu kekuatan yang merasa dirinya sebagai polisi dunia dan membentuk sekutu dengan 30 negara, berhadapan dengan kekuatan lain yang merasa dirinya sebagai penguasa tunggal di kawasan Timur Tengah.

9 Februari

Irak menolak usul perdamaian Iran serta Gerakan Nonblok dan percaya mereka dapat bertahan terhadap serangan dari koalisi multinasional pimpinan AS.

Presiden Iran, Hashemi Rafsanjani, mengatakan kecewaannya dan menambahkan Iran akan terus berupaya mengakhiri Perang Teluk. Usul perdamaian Iran a.l. menyerukan Irak mundur dari Kuwait serta penarikan semua kekuatan asing dari Teluk.

13 Februari

Sejumlah bom yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat AS menghantam bangunan perlindungan serangan udara, menewaskan dan menciderai ratusan orang sipil.

Pihak AS mengatakan bangunan ini merupakan pusat pengendalian komando Perang Teluk dan merupakan sasaran militer yang sah. Pers Barat mengutip regu penolong dan penduduk di lokasi kejadian tersebut, mengatakan lebih 400 orang — kebanyakan wanita dan anak-anak, tewas.

Menteri Kesehatan Irak, Abdul Salam Mohamad Saeed mengatakan, tidak ada instalasi militer di wilayah tsb. Ia mengatakan, "Ini merupakan tindakan kriminal, merupakan usaha yang direncanakan terlebih dahulu untuk menyerang orang-orang sipil!"

16 Februari



Esmat Abdel Maquid

Delapan negara Arab yang tergabung dalam koalisi multinasional menolak tawaran Irak untuk mundur dari Kuwait.

Penolakan ini mehibulkan spekulasi bahwa perang darat yang terbesar dalam sejarah akan segera terjadi dan tidak mungkin tertunda hanya karena ada penawaran Baghdad itu.

Ke-8 negara Arab yang bergabung dalam koalisi anti-Irak, menganggap tawaran Irak tersebut merupakan "sesuatu yang tidak serius". Menlu Mesir, Syria, Arab Saudi, Kuwait, Persatuan Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Oman, setelah pertemuan di Kairo mengatakan, usul Irak tersebut tidak dapat diterima dan "ditolak secara keseluruhan", demikian dibacakan Menlu Mesir, Esmat Abdel Maquid.

Maroko yang juga mengirim pasukannya ke Teluk menolak untuk menghadiri pertemuan tersebut di Kairo. Dewan Komando Revolusioner Irak menyebutkan Baghdad akan mempertimbangkan untuk mundur dari Kuwait sesuai resolusi DK-PBB 660 dan mengajukan sejumlah persyaratan.

Yaitu penarikan mundur Israel dari wilayah pendudukan, ditariknya kekuatan multinasional dari Teluk dan penghentian pendudukan Syria atas Libanon, pembentukan "pemerintahan yang demokratis di Kuwait", penggantian kerugian perang oleh pihak Koalisi multinasional kepada Irak dan pembatalan semua utang Irak.

17 Februari

Presiden George Bush membenarkan, salah satu sasaran pasukan AS dan Sekutu dalam perang Teluk

adalah menggulingkan Presiden Irak, Saddam Hussein. "Memang itu tujuannya!" ujar Bush kepada wartawan.

Pernyataan ini merupakan ungkapan Bush yang pertama kali yang menyangkut posisi Saddam Hussein. Sebelumnya, Presiden Bush selalu mengatakan, tugas pasukan AS dalam perang Teluk adalah memaksa Irak menarik pasukannya dari Kuwait.

19 Februari



Tareq Aziz

Dua belas Menteri Luar Negeri Eropa bertemu untuk membahas suatu rencana perdamaian Teluk dan skenario mereka sesudah perang bagi Timur Tengah.

Presiden Gorbachev secara diam-diam membuat tawaran perdamaian kepada Menlu Irak, Tareq Aziz dan menghendaki suatu jawaban secepat mungkin untuk menghindari terjadinya suatu ofensif darat dari pihak multinasional.

Tapi menurut pihak Gedung Putih, Presiden Bush menilai rencana itu tidak akan menghentikan perang.

Jean-Jacques Kasel, pembantu Jacques Roos, Menlu Luxemburg dan ketua pertemuan para menteri Masyarakat Eropa mengatakan rencana Moskow itu disambut baik oleh 12 negara Eropa.

21 Februari



Dick Cheney

Presiden AS, Bush menegaskan perang darat akan segera dilancarkan, karena rencana perdamaian dari Uni Soviet yang ditanggapi Irak melalui radio Baghdad, dinilai Washington sebagai tidak sesuai dengan kehendak Sekutu.

Menteri Pertahanan AS, Dick Cheney mengatakan setiap gencatan senjata sekarang ini bisa membahayakan pasukan koalisi multinasional. Tanpa menantikan jawaban Irak atas proposal Gorbachev, Bush menolak negosiasi yang diupayakan Irak dan Uni Soviet di Moskow itu. Dia mengatakan, "Tujuan telah ditetapkan sehingga tidak akan ada konsesi!"

Bush tidak merinci proposal Gorbachev. Dan mengatakan, "Presiden Gorbachev meminta saya merahasiakan rincian proposalnya. Dan saya melaksanakan hal itu."

21 Februari

Delapan butir usul perdamaian Uni Soviet yang diumumkan juru bicara Soviet, adalah sbb.:

1. Irak menarik mundur secara penuh dan tanpa syarat, seluruh kekuatannya dari Kuwait yang ditempatkan di wilayah itu sejak 2 Agustus 1990.
2. Penarikan mundur pasukan dimulai pada hari kedua setelah penghentian permusuhan.
3. Penarikan mundur kekuatan Irak akan dilakukan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.
4. Setelah 2/3 penarikan mundur tentara Irak dari Kuwait, sanksi-sanksi ekonomi PBB terhadap Irak akan dihentikan.



5. Setelah selesai penarikan mundur seluruh pasukan Irak dari Kuwait, semua perjuangan dihentikan. Sehingga, resolusi-resolusi DK-PBB tidak berlaku lagi.

6. Segera setelah gencatan senjata, semua tawanan perang akan dibebaskan secepatnya.

7. Penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait akan dipantau negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik, yang dipercayakan oleh DK-PBB.

8. Penetapan rincian-rincian dan spesifikasi-spesifikasi hasil terakhir akan diumumkan hari Jumat 22 Februari, kepada negara-negara anggota DK-PBB sekarang.

22 Februari

Syarat-syarat yang diajukan AS, setelah berkonsultasi dengan para sekutunya, agar Irak mengumumkan secara terbuka penerimaannya atas batas waktu pukul 00.00 hari Minggu untuk menghindari perang darat oleh pihak Sekutu untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait, adalah sbb.:

1. Irak harus memulai penarikan pasukan besar-besaran dari Kuwait pukul 17.00 GMT hari Sabtu (Minggu pagi WIB).

2. Irak harus menyelesaikan penarikan mundur dalam waktu seminggu.

3. Dalam 48 jam pertama waktu pengunduran, Irak harus memindahkan seluruh pasukannya dari Kuwait City dan mengizinkan pemulihan segera atas pemerintah sah di Kuwait.

4. Irak harus mundur dari seluruh pertahanannya di sepanjang perbatasan Arab Saudi - Kuwait dan Arab Saudi - Irak dari pulau Bubiyan dan Wardah dan dari ladang minyak Rumasila.

5. Dalam waktu seminggu yang ditetapkan, Irak harus mengembalikan pasukannya ke posisi tanggal 1 Agustus 1990 sesuai dengan resolusi DK-PBB no. 660.

6. Dalam kerja sama dengan Palang Merah Internasional, Irak harus membebaskan seluruh tawanan perang dan "rakyat sipil" serta mengembalikan jenazah perajurit yang tewas. Langkah ini harus dimulai segera bersamaan dengan dimulainya penarikan pasukan dan harus selesai dalam 48 jam.

7. Irak harus memindahkan semua ranjau-ranjau, termasuk di instalasi minyak Kuwait dan mengirim seorang perantara militer untuk bekerja sama dengan Kuwait dan negara-negara koalisi lainnya mengenai rincian penarikan pasukan.

8. Irak harus menghentikan tembakan ke udara atas pesawat terbang yang melintas Irak dan Kuwait, khususnya pesawat transpor yang membawa pasukan keluar Kuwait dan mengizinkan pesawat-pesawat koalisi secara khusus mengontrol dan menggunakan wilayah udara Kuwait.

9. Irak harus menghentikan seluruh tindakan perusakan atas rakyat dan kekayaan Kuwait dan membebaskan semua tahanan Kuwait.

10. AS dan sekutunya tidak akan menyerang pasukan Irak yang sedang mundur dan akan menahan diri sejauh penarikan pasukan itu sejalan dengan aturan dan tidak terjadi penyerangan atas pasukan negara-negara lain.

11. Setiap pelanggaran atas pengertian-pengertian itu, akan mengakibatkan suatu "balasan segera dan menyakitkan" dari pasukan koalisi.

22 Februari

AS telah menyalahkan bom-bom napalm, salah satu dari bom yang kontroversial dalam perang Korea yl. ke

wilayah Irak, demikian juru bicara Marinir AS dan menambahkan, bom-bom itu hanya untuk menghancurkan ladang-ladang minyak.

23 Februari

Presiden AS, George Bush menolak 2 usulan perdamaian Uni Soviet untuk mengakhiri perang Teluk dan tetap pada batas waktu pukul 12.00 (waktu Washington) bagi Irak untuk mundur atau menghadapi serangan darat.

Sekutu berusaha memperketat waktu penarikan mundur, memaksa Irak untuk meninggalkan tank-tanknya, senjata-senjata berat dan peralatan lainnya. Sehingga, mengurangi kekuatan militer negara itu di masa datang.

24 Februari

Perang darat di kawasan Timur Tengah antara pasukan multinasional dengan pasukan Irak, untuk memaksa Irak mundur dari Kuwait meletus Minggu pagi WIB.

Pasukan-pasukan koalisi multinasional, di berbagai tempat melintasi perbatasan Arab Saudi - Kuwait.

Lebih dari satu juta prajurit dari kedua belah pihak, saling berhadapan di perbatasan Kuwait - Arab Saudi.

Sementara itu, Minggu pagi kota Riyadh mengalami serangan rudal Scud dari Irak. Tapi rudal ini dicegat oleh rudal-anti-rudal Patriot yang tetap siaga.

25 Februari

Lebih dari 15.000 serdadu Irak yang mengalami pemboman berat selama 38 hari menyerah ketika pasukan Sekutu bergerak memasuki wilayah Kuwait.

Di samping pesawat-pesawat tempur, tank-tank dan kendaraan militer lainnya yang menyerbu Kuwait, sejumlah 300 helikopter Sekutu juga menusuk jauh ke wilayah Kuwait dan Irak. Serbuan ini, diperkirakan merupakan serangan helikopter terbesar dalam sejarah militer modern. Helikopter-helikopter dari Divisi Serbu Udara ke-101 membawa lebih dari 2.000 prajurit, 50 kendaraan militer dan meriam-meriam serta berton-ton bahan bakar dan amunisi.

Dalam pada itu sekitar 700 - 800 wartawan berada di Dhahran. Dari jumlah ini kira-kira 160 wartawan diizinkan mendampingi pasukan Sekutu memasuki Kuwait. Sedangkan di Riyadh, terdapat kurang lebih 520 wartawan yang meliputi kegiatan-kegiatan perang di markas besar koalisi pimpinan AS.

Sementara itu, rakyat dan pemerintah Kuwait dalam pengasingan memperingati Hari Kemerdekaan Kuwait tanggal 25 Februari 1991 yang diharapkan sekaligus merupakan Hari Pembebasan negara itu.

26 Februari

Presiden Irak Saddam Hussein memerintahkan pasukan Irak untuk mundur dari Kuwait (berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 660) ke posisi-posisi tanggal 1 Agustus 1990, sehari sebelum invasi ke Kuwait.

Tetapi pihak AS menyambut dingin pernyataan yang

disiarkan radio Baghdad itu. "Kami akan terus melancarkan peperangan," ujar juru bicara Gedung Putih, Marlin Fitzwater, setelah pejabat-pejabat senior AS menganalisa pengumuman Irak untuk mundur itu.

Sampai Selasa pagi (hari kedua serbuan Sekutu), jumlah tawanan perang Irak dilaporkan telah mencapai sekitar 20.000 prajurit.

27 Februari

Pasukan Sekutu berhasil menguasai Kuwait City, ibu kota Kuwait, yang telah diduduki Irak, selama kurang lebih 7 bulan.

Sementara itu pasukan Korps ke-18 Angkatan Darat AS, terus berusaha memutuskan semua jalur jalan mundur pasukan elit Irak, Pengawal Republik. Sedangkan Divisi Serbu Udara 101 dan pasukan Perancis telah menerobos ke jantung Irak, antara Baghdad dan Basra, dekat sungai Eufkrat, Mereka mengempung semua jalur mundur pasukan Pengawal Republik.

Pada hari itu juga, Irak menawarkan gencatan senjata pada pihak Koalisi multinasional dengan bersedia mematuhi sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk membatalkan klaim atas Kuwait dan siap membayar pampasan pada Kuwait.

Tawaran ini disampaikan Menlu Irak, Tareq Aziz kepada Uni Soviet yang selanjutnya meneruskannya kepada AS. Jawaban Presiden Bush, menurut jurubicara Gedung Putih, Marlin Fitzwater adalah: "Tembakan dihentikan segera mungkin secara militer, namun usul baru Irak tetap sebagai suatu tawaran bersyarat dan masih kurang dari apa yang diperlukan".

Sementara itu, ke-5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Uni Soviet, AS, Inggris, Perancis dan RRC sependapat bahwa Irak harus menerima ke-12 resolusi DK-PBB secara keseluruhan.

27 Februari

Tiga divisi tank AS, berhasil menghancurkan sisa-sisa pasukan Pengawal Revolusi (PPR) Saddam Hussein dalam perang tank yang menghancurkan sekitar 700 tank Irak. Perang tank ini yang berlangsung dekat kota Basra, dinilai sebagai perang tank terbesar setelah Perang Dunia II.

Perang tank ini melibatkan 470 tank AS dan 330 kendaraan bersenjata yang berasal dari 3 unit Korps VII, yakni Divisi Tank I dan III serta Resimen Tank II. Korps VII terdiri dari 70.000 prajurit, termasuk 2 divisi tank dengan prajurit masing-masing 16.500 prajurit, sedangkan Resimen Tank II yang bertempur bersama Korps Tank VI terdiri dari 4.500 prajurit.

Sasaran utama mereka adalah Divisi Hamnurabi PPR yang berusaha melindungi pasukan Irak dari Divisi PPR lainnya, yang mengundurkan diri. Divisi PPR itu memiliki 250 - 300 tank.

Pertiraaan tidak resmi menyebutkan, kerusakan di Kuwait meningkat 2 kali lipat menjadi US\$ 100 miliar dalam beberapa hari terakhir sebelum pasukan Irak mundur dari Kuwait.

Pihak multinasional menuduh Irak, terus melakukan "kebijakan bumi hangus" memerintahkan pasukannya

membakar sumur-sumur minyak dan menghancurkan gedung-gedung pada saat mereka menarik diri dari Kuwait.

Sukses pasukan koalisi pimpinan AS dalam mengalahkan tentara Irak yang kemudian keluar dari Kuwait, sebagian besar berkat operasi perbekalan besar-besaran dan efektif, demikian pengumuman Panglima Koalisi.

Panglima Operasi "Badai Padang Pasir" Jenderal AS, Norman Schwarzkopf menjelaskan bahwa pasukan Koalisi menguasai perang darat antara lain karena memiliki cukup perbekalan untuk bertahan 60 hari, andaikata perang menjadi berkepanjangan.

Perwira tinggi, William Pagonis yang mengatur operasi suplai/perbekalan pihak Koalisi sejak Agustus 1990, dianggap berhasil, sehingga ia dinaikkan pangkatnya dari Mayjen menjadi Letnan Jenderal mulai bulan Februari 1991.

28 Februari

Presiden AS, George Bush menegaskan penyerangan terhadap Irak untuk sementara dihentikan terhitung mulai Rabu (27/2) pukul 24.00 waktu setempat (Kamis 28/2 pukul 12.00 WIB).

Gencatan senjata ini diberlakukan dengan berbagai persyaratan antara lain Irak tak boleh menyerang pasukan multinasional dan menembakkan peluru kendalinya. Bush juga menegaskan, Irak harus segera membebaskan seluruh tahanan perang dari pihak AS dan Sekutunya maupun dari pihak lainnya. Juga seluruh warga Kuwait yang ditahan. Bush tak lagi menyebut keharusan Irak mematuhi 12 resolusi PBB. "Irak harus memenuhi segala ketentuan Dewan Keamanan PBB yang relevan," katanya. Bush juga sempat mengatakan, masyarakat Irak bukan musuh Amerika dan Sekutunya.

Dengan demikian pendudukan Kuwait oleh Irak yang dimulai tanggal 2 Agustus 1990 berakhir 27 Februari 1991. Perang Teluk (antara pasukan Koalisi multinasional pimpinan AS dengan pasukan Irak) yang dimulai 17 Januari 1991 berakhir 28 Februari 1991 dengan gencatan senjata dan "perang darat" yang dimulai 24 Februari berlangsung hanya 100 jam atau kurang lebih 4 hari lebih sedikit.

(Sumber : Suara Pembaharuan, Tahun 1991)

